



P20
INDONESIA
2022

PARLIAMENTARY



LAPORAN PELAKSANAAN DAN PARTISIPASI DELEGASI DPR RI



THE EIGHTH G20 PARLIAMENTARY SPEAKERS' SUMMIT (P20)

"STRONGER PARLIAMENTS FOR SUSTAINABLE RECOVERY"



JAKARTA - INDONESIA, 5 - 7 OKTOBER 2022





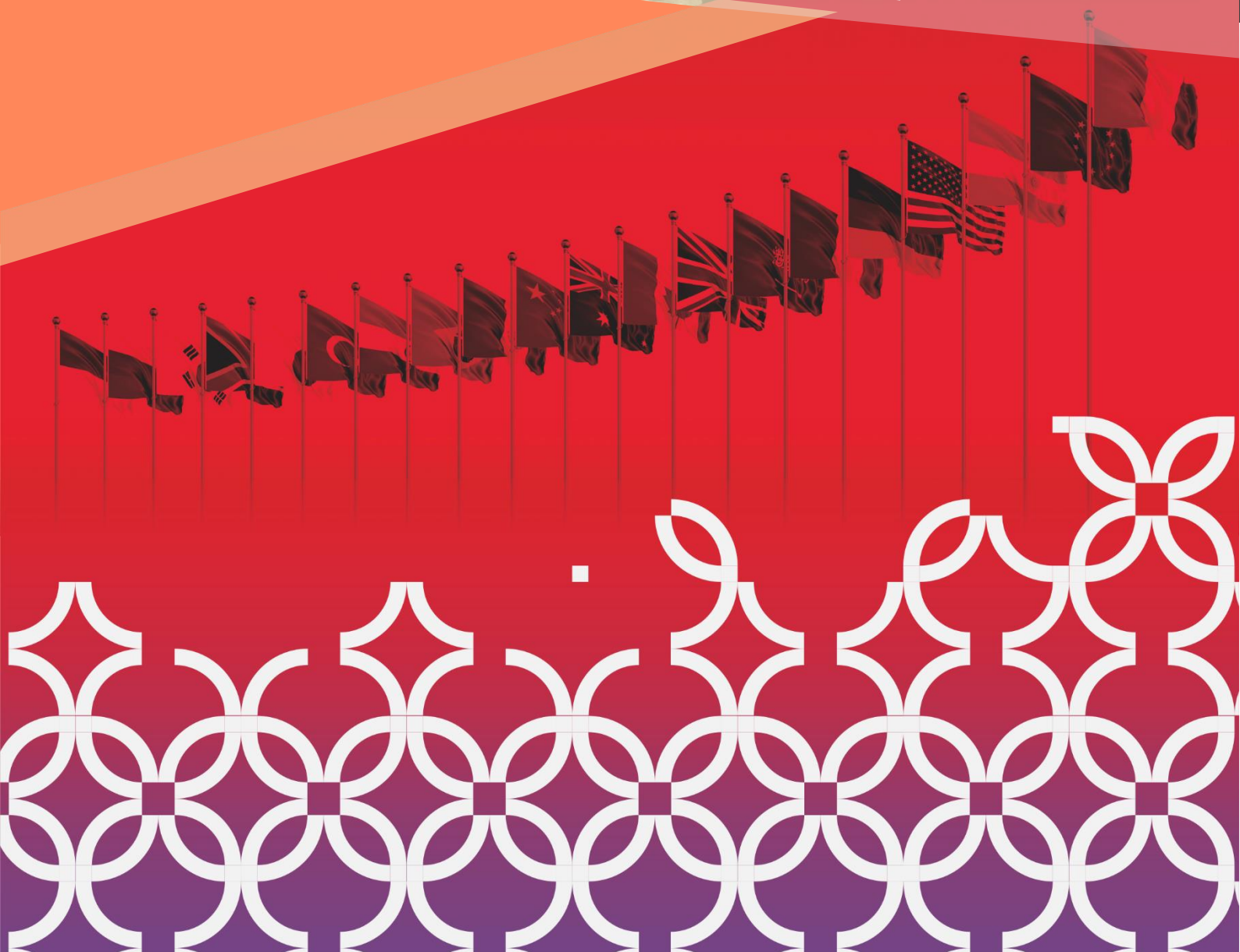
DAFTAR ISI



I. Pendahuluan	1
A. Indonesia sebagai penyelenggara Konferensi The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)	1
B. Persiapan penyelenggaraan Konferensi The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)	2
C. Keikutsertaan Delegasi DPR RI dalam Konferensi The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)	2
D. Susunan Delegasi	3
E. Dukungan Substansi dalam pelaksanaan Konferensi The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)	5
II. Pelaksanaan P20 Summit	7
A. Agenda of The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)	7
B. Parliamentary Forum in the context of The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)	13
1. Parliamentary Forum Opening Session	14
2. Sesi Pertama - The role of the P20 in the context of inter-parliamentary cooperation to strengthen multilateralism in the 21st century	19
3. Sesi Kedua - How can parliaments help reach emissions reduction targets and facilitate global cooperation on climate change in times of multiple crises?	24
C. Meeting to finalize the Draft Joint Statement	28
D. Opening Session	30
1. Video Message from Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations	30
2. Pidato dari Mr. Duarte Pacheco, President of the Inter-Parliamentary Union (IPU)	31
3. Pidato dari Dr. (HC) Puan Maharani, Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia	32
4. Pidato dari HE. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia	34



E. Thematic Sessions	35
1. First Session – Accelerating Sustainable Development and the Green Economy	35
2. Second Session – Emerging Issues: Food and Energy Security, and Economic Challenges	42
3. Third Session – Effective Parliament, Vibrant Democracy	51
4. Fourth Session – Social Inclusion, Gender Equality, and Women Empowerment	62
F. Closing Session	72
1. Pidato penutup dari Mr. Duarte Pacheco, President of the Inter-Parliamentary Union (IPU)	72
2. Pidato penutup dari Dr. (HC) Puan Maharani, Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia	73
G. Pertemuan Bilateral	74
1. Pertemuan Bilateral Ketua DPR RI	74
2. Pertemuan Bilateral Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB)	87
H. Social Functions	91
1. Working dinner hosted by the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation, the House of Representatives of the Republic of Indonesia	91
2. Working dinner hosted by the Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia	92
3. Tree Planting to Commemorate P20 Indonesia	92
4. Working lunch hosted by the Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia	93
III Penutup	96
A. Anggaran	96
B. Keterangan Lampiran	96
C. Kata Penutup	101
IV. Lampiran	103



I. PENDAHULUAN



A. INDONESIA SEBAGAI PENYELENGGARA KONFERENSI THE 8th G20 PARLIAMENTARY SPEAKERS' SUMMIT (P20)

G20 adalah kelompok informal dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB). G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia.

Presidensi (ketuan rumahan) G20 dilakukan secara bergiliran setiap tahun di antara para anggotanya, dengan negara yang memegang presidensi bekerja sama dengan negara presidensi sebelumnya maupun sesudahnya, yang juga dikenal sebagai "Troika", untuk memastikan kesinambungan agenda. Saat ini Italia, Indonesia, dan India adalah negara Troika.

G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Agenda dan koordinasi kerja dilakukan oleh *G20 leaders' personal representatives* yang dikenal dengan Sherpa, bersama dengan menteri keuangan dan gubernur bank sentral.

Setiap tahun, G20 selalu memperkuat forumnya melalui engagement groups. Salah satu pemangku kepentingan strategis G20 Engagement Group adalah parlemen. KTT G20 untuk Ketua Parlemen atau juga dikenal sebagai Parliamentary 20 (P20), adalah forum yang dihadiri oleh para Ketua parlemen dari negara-negara G20 yang bertujuan untuk membawa dimensi parlementer ke tata kelola global, meningkatkan kesadaran dan membangun dukungan politik untuk komitmen internasional dan membantu memastikan bahwa komitmen tersebut dapat diimplementasikan secara efektif ke dalam realitas nasional.

Sebagai wakil rakyat, parlemen akan menyuarakan aspirasi masyarakat negara G20 secara keseluruhan dan memberikan kontribusi yang holistik, beragam, dan inovatif. Oleh karena itu, Parlemen dapat dan harus memberikan kontribusi yang substantif terhadap pencapaian tujuan utama negara-negara G20.

Dengan latar belakang tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bekerjasama dengan *Inter-Parliamentary Union* (IPU) akan bersama-sama menjadi tuan rumah Pertemuan Ketua Parlemen (P20) "the 8th G20



Parliamentary Speaker's Summit (P20)”, pada awal bulan Oktober 2022, sebelum dilaksanakannya “*the G20 Leaders' Summit*”.

Pelaksanaan P20 bertujuan untuk: Mendorong keterlibatan parlemen sebagai mitra strategis pemerintah dengan tujuan untuk memperkuat sinergi antara aspek eksekutif dan legislative dalam isu-isu utama agenda G20; Memperkuat interaksi antara Ketua Parlemen negara-negara G20 dengan parlemen negara-negara mitra, PBB dan organisasi internasional terkait lainnya; Mengidentifikasi peran parlemen dalam rangka merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan parlemen-parlemen G20 terkait isu-isu yang dibahas di KTT G20; dan Membantu memastikan pemulihan dari krisis ekonomi terjadi secara inklusif bagi seluruh negara dan kelompok rentan, tidak hanya bagi G20.

B. PERSIAPAN PENYELENGGARA KONFERENSI THE 8th G20 PARLIAMENTARY SPEAKERS SUMMIT (P20)

Pembentukan Panitia Pengarah (*Steering Committee*) sangat dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya mempersiapkan konferensi. Langkah-langkah tersebut juga kemudian harus didukung oleh pembentukan Panitia Persiapan dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) yang bertanggung jawab mempersiapkan berbagai hal sebelum pelaksanaan sidang juga untuk membantu kelancaran tugas-tugas Panitia Pengarah selama masa persiapan hingga penyelenggaraan sidang.

Oleh karena negara-negara yang akan hadir dalam Konferensi *The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)* cukup banyak, maka demi terwujudnya kesuksesan acara dibutuhkan jasa profesional (*Professional Conference Organizer/PCO*) yang dapat bekerja *full-time* mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan bidang teknis. Untuk memilih jasa profesional tersebut perlu untuk dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa yang dapat menyeleksi, memilih, dan mengawasi penyedia jasa profesional (PCO) yang dianggap kompeten dan memenuhi persyaratan yang diminta.

Dalam penyelenggaraan Konferensi ini, DPR RI juga melakukan kerjasama dengan Inter-Parliamentary Forum (IPU). Kerjasama dilaksanakan dalam hal antara lain: penyusunan Concept Note P20, pembuatan dan penyampaian undangan P20 yang ditandatangani bersama oleh Ketua DPR RI dan President IPU, pendistribusian dokumen pendukung pelaksanaan summit, penyusunan *draft joint statement*, dan pelaksanaan pembahasan isu-isu tematik pada P20 Summit.

C. KEIKUTSERTAAN DELEGASI DPR RI DALAM KONFERENSI THE 8th G20 PARLIAMENTARY SPEAKERS SUMMIT (P20)

Partisipasi Delegasi DPR RI menghadiri the 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) didasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 70/PIMP/I/2022-2023 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menghadiri

Konferensi The 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) di Jakarta tahun 2022.

D. SUSUNAN DELEGASI

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 70/PIMP/I/2022-2023 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menghadiri Konferensi The 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) di Jakarta tahun 2022, Delegasi DPR terdiri atas:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI/ KOMISI	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI	A-188	PDI Perjuangan / Komisi I	Ketua DPR RI	PENASEHAT
2.	H. LODEWIJK F. PAULUS	A-281	PG / Komisi I	Wakil Ketua DPR RI/ KORPOLKAM	KOORDINATOR
3.	Dr. H. FADLI ZON, S.S., M.Sc.	A-86	P. Gerindra / Komisi I	Ketua BKSAP	KETUA
4.	GILANG DHIELAFARAREZ, SH.,LL.M	A-179	PDI Perjuangan / Komisi III	Watua BKSAP	WAKIL KETUA
5.	PUTU SUPADMA RUDANA, MBA.	A-563	P. Demokrat / Komisi VI	Watua BKSAP	WAKIL KETUA
6.	Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng.	A-422	PKS / Komisi II	Watua BKSAP	WAKIL KETUA
7.	Ir. H. A. HAFISZ TOHIR	A-487	PAN / Komisi XI	Watua BKSAP	WAKIL KETUA
8.	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S. Sos., MCOMN&MEDIAS T . (Kapoksi)	A-262	PDI-P / Komisi I	Anggota BKSAP	ANGGOTA
9.	KRISDAYANTI	A-212	PDI-P / Komisi IX	Anggota BKSAP	ANGGOTA
10.	Ir. HUGUA	A-259	PDI-P / Komisi II	Anggota BKSAP	ANGGOTA
11.	INA AMMANIA	A-218	PDI-P / Komisi VIII	Anggota BKSAP	ANGGOTA
12.	CHARLES HONORIS	A-162	PDI-P / Komisi IX	Anggota BKSAP	ANGGOTA
13.	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS	A-185	PDI-P / Komisi X	Anggota BKSAP	ANGGOTA
14.	VANDA SARUNDAJANG	A-254	PDI-P / Komisi X	Anggota BKSAP	ANGGOTA
15.	Dra. ANDRIANA CHARLOTTE DONDOKAMBAY, M.Si	A-252	PDI-P / Komisi IX	Anggota BKSAP	ANGGOTA

NO	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI/ KOMISI	JABATAN	KETERANGAN
16.	YOHANES FRANSISKUS LEMA S.IP.,M.Si	A-239	PDI-P / Komisi IV	Anggota BKSAP	ANGGOTA
17.	KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si	A-243	PDI-P / Komisi I	Anggota BKSAP	ANGGOTA
18.	H. ANDI ACHMAD DARA , SE	A-326	PG / Komisi XI	Anggota BKSAP	ANGGOTA
19.	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M	A-305	PG / Komisi VI	Anggota BKSAP	ANGGOTA
20.	RAVINDRA AIRLANGGA, M.S	A-292	PG / Komisi IV	Anggota BKSAP	ANGGOTA
21.	DRS. H. DARUL SISKI	A-271	PG / Komisi IX	Anggota BKSAP	ANGGOTA
22.	PUTERI ANETTA KOMARUDIN	A-295	PG / Komisi XI	Anggota BKSAP	ANGGOTA
23.	Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.SOS., M.SI.	A-324	PG / Komisi III	Anggota BKSAP	ANGGOTA
24.	DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI, B.A., M.Sc	A-322	PG / Komisi VII	Anggota BKSAP	ANGGOTA
25.	Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si.	A-78	P. Gerindra / Komisi X	Anggota BKSAP	ANGGOTA
26.	KATHERINE ANGGELA OENDOEN	A-123	P. Gerindra / Komisi VII	Anggota BKSAP	ANGGOTA
27.	R.WULANSARI	A-96	P. Gerindra / Komisi VII	Anggota BKSAP	ANGGOTA
28.	IR.H.KAMRUSSAMA D, ST, M.Si	A-79	P. GERINDRA/ Komisi XI	Anggota BKSAP	ANGGOTA
29.	FADHLULLAH, SE	A-59	P. Gerindra / Komisi I	Anggota BKSAP	ANGGOTA
30.	HASBI ANSHORY, SE, MM	A-355	P. Nasdem / Komisi I	Anggota BKSAP	ANGGOTA
31.	ARKANATA AKRAM, S.T., B.E. (Hons) MEng.Sc.	A-392	P. Nasdem / Komisi VII	Anggota BKSAP	ANGGOTA
32.	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si	A-57	PKB / Komisi X	Anggota BKSAP	ANGGOTA
33.	Drs. FATHAN	A-18	PKB / Komisi XI	Anggota BKSAP	ANGGOTA
34.	ARZETI BILBINA, SE, M.A.P.	A-32	PKB / Komisi IX	Anggota BKSAP	ANGGOTA
35.	HERU WIDODO, S.PSi	A-55	PKB / Komisi III	Anggota BKSAP	ANGGOTA
36.	MUSLIM, SHI, MM	A-523	PD / Komisi VI	Anggota BKSAP	ANGGOTA

NO	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI/ KOMISI	JABATAN	KETERANGAN
37.	H. HASANI BIN ZUBER, S.IP	A-559	PD / Komisi VIII	Anggota BKSAP	ANGGOTA
38.	LINDA MEGAWATI, SE, M.Si	A-545	PD / Komisi IX	Anggota BKSAP	ANGGOTA
39.	DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN.SH, LL.M	A-546	PD / Komisi XI	Anggota BKSAP	ANGGOTA
40.	H. SYAHRUL AIDI MA'AZAT, L.C., M.A	A-418	PKS / Komisi V	Anggota BKSAP	ANGGOTA
41.	Dr. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si .	A-492	PAN / Komisi VII	Anggota BKSAP	ANGGOTA
42.	drh. Hj. DEWI CORYATI, M.SI	A-489	PAN / Komisi X	Anggota BKSAP	ANGGOTA
43.	PRIMUS YUSTISIO, SE, M.Ap	A-498	PAN / Komisi XI	Anggota BKSAP	ANGGOTA

E. DUKUNGAN SUBSTANSI DALAM PELAKSANAAN KONFERENSI THE 8th G20 PARLIAMENTARY SPEAKERS SUMMIT (P20)

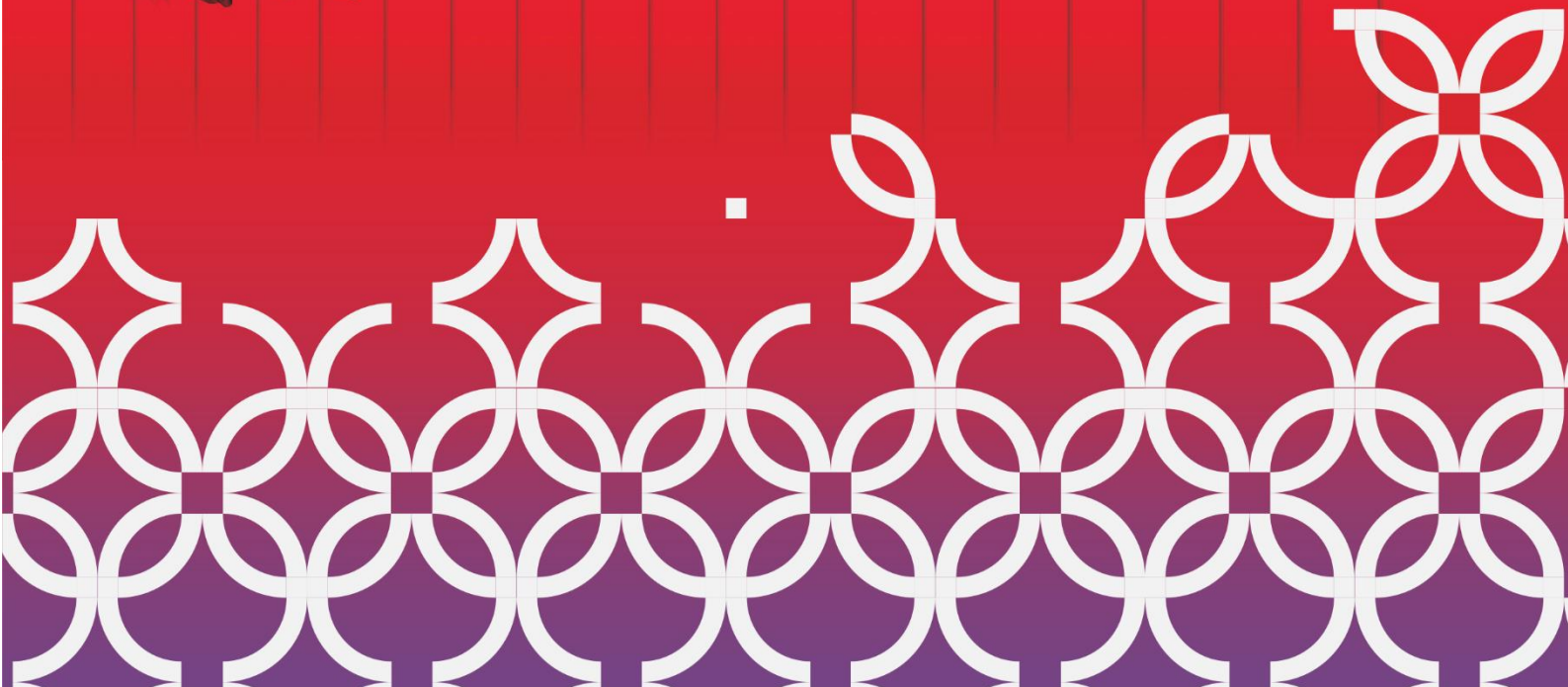
Substansi dan Materi yang digunakan dalam pelaksanaan P20 disiapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, dalam hal ini Biro Kerjasama Antar Parlemen, bersama dengan Inter-Parliamentary Union (IPU), serta dengan dukungan dari Pusat Penelitian Setjen DPR RI dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

nusantara



THE 8th G20 PARLIAMENTARY SPEAKERS' SUMMIT

Strategic Parliaments for Sustainable Recovery
7 October 2022 | Jakarta



II. PELAKSANAAN P20 SUMMIT



A. AGENDA OF THE 8th G20 PARLIAMENTARY SPEAKERS SUMMIT (P20)

Wednesday, October 5, 2022		Venue
10:00 – 12:00	<ul style="list-style-type: none">• Arrival of Delegates• Registration	Nusantara building, main lobby
10:00 – 17:00	Time allocated for Bilateral Meetings	Bilateral Meeting Rooms
14:00 – 16:00	<p>Parliamentary Forum in the context of the G20 Parliamentary Speakers' Summit</p> <p>Youth Voice:</p> <p>Aeshnina Azzahra Aqilani, Environmental Youth Activist</p> <p>Farwiza Farhan, Leader of Forest, Nature and Environment (HAKA)</p> <p>Remarks:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dr. Fadli Zon, Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation – DPR RI• Dr. (HC) Airlangga Hartarto, Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia / Indonesian G20 Sherpa (TBC)• Dr. (HC) Puan Maharani, Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia <p>First session: The role of the P20 in the context of inter-parliamentary cooperation to strengthen multilateralism in the 21st century</p>	Plenary Meeting Room 2, Nusantara II Building, 3 rd floor



	<p>Moderator:</p> <p>Mr. Philips J. Vermonte, Senior Fellow, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Dean, Faculty of Social Sciences Universitas Islam Internasional Indonesia (FPSB UIII)</p> <p>Panelists:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ms. Sahiba Gafarova, Speaker of the National Assembly (Azerbaijan) • Ms. Irine Yusiana Roba Putri, Member of The House of Representatives of the Republic of Indonesia / Women Political Leaders Country Ambassador for Indonesia • Mr. Muhsin Syihab, Advisor to the Minister on Inter-Institutional Relations, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia • Mr. Adhy Aman, Senior Programme Manager – Asia and the Pacific International IDEA 	
16:00 – 17:30	<p>Parliamentary Forum in the context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit</p> <p>Second session:</p> <p>How can parliaments help reach emissions reduction targets and facilitate global cooperation on climate change in times of multiple crises?</p> <p>Moderator:</p> <p>Evi Mariani, Journalist / Co-Founder and the Executive Director of Project Multatuli</p> <p>Panelists:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sir Lindsay Hoyle, Speaker of the House of Commons – United Kingdom • Mr. Putu Supadma Rudana, Vice-Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation – The House of Representatives of the Republic of Indonesia 	Plenary Meeting Room 2, Nusantara II Building, 3 rd floor

	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Dadan Kusdiana, Director General of New and Renewable Energies and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources (TBC) • Ms. Tiza Mafira, Director of Climate Policy Initiative & Founder of Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik 	
17.30	Assemble at Lobby Nusantara II	Lobby Nusantara II
18:00 – 20:00	Dinner hosted by The Committee for Inter-Parliamentary Cooperation – The House of Representatives of the Republic of Indonesia	The Sultan Hotel and Residence Jakarta
18:30 – 20:00	Meeting to finalize the draft joint statement	Commission V Meeting Room, Nusantara Building 1 st Floor
Thursday, October 6, 2022		Venue
09:00 – 18:00	Registration	Lobby, Nusantara Building
10:00 – 12:30	Time allocated for Bilateral Meetings	Bilateral Meeting Rooms, Nusantara building, 3 rd floor
12:45 – 14.00	<ul style="list-style-type: none"> • The Arrival of Delegates at the main building • Photo Session of each Head of Delegation with the Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia • Courtesy Call on the President of the Republic of Indonesia 	Nusantara building, 3 rd floor
14:00 – 14:30	<p>Opening Session</p> <p>Short Video about the House of Representatives of the Republic of Indonesia</p> <p>Video message:</p> <p>Mr. António Guterres, Secretary General of United Nations</p> <p>Speeches:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Duarte Pacheco, President of the Inter-Parliamentary Union (IPU) 	Plenary Meeting Room, Nusantara Building, 3 rd floor

	<p>Short Video about P20</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. (HC) Puan Maharani, Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia • HE. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia 	
14:40 – 16:00	<p>1st Session – ACCELERATING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE GREEN ECONOMY</p> <p>Keynote Speeches:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sir Lindsay Hoyle, Speaker of the House of Commons (United Kingdom) • Mr. Duarte Pacheco, President of the Inter-Parliamentary Union (IPU) • Mr. Chen Zhu, Vice Chairman of the Standing Committee of the National People’s Congress (China) • Ms. Isma Yatun, Chair of the Audit Board of the Republic of Indonesia / SAI20 <p>Interventions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Lukas Sinimbo Muha, Chairperson of the National Council (Namibia) • Mr. Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, Deputy Speaker of the Congress of Deputies (Spain) • Mr. Suos Yara, Chairman of the Commission on Foreign Affairs, International Cooperation, Information and Media/MP (Cambodia) 	KK II Meeting Room, Nusantara Building 1 st Floor
16:00 – 16:20	Coffee Break	Lobby, Nusantara Building, 1 st floor
16:20 – 17:40	<p>2nd Session – EMERGING ISSUES: FOOD AND ENERGY SECURITY, AND ECONOMIC CHALLENGES</p> <p>Keynote Speeches:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ms. Valentina Matvienko, Speaker of the Federation Council (Russia) 	KK II Meeting Room, Nusantara Building 1 st Floor

	<ul style="list-style-type: none"> • Ms. Sahiba Gafarova, Speaker of the National Assembly (Azerbaijan) • Ms. Kim Young Joo, Deputy Speaker of the National Assembly (Korea) <p>Interventions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sir Lindsay Hoyle, Speaker of the House of Commons (United Kingdom) • Mr. Om Birla, Speaker of the House of the People (Lok Sabha) (India) • Mr. Mustafa Şentop, Speaker of Grand National Assembly (Türkiye) • Ms. Nicola Getrud Ruth Beer, Vice President of the European Parliament (European Union) • Mrs. Olena Kondratiuk, Deputy Chairwoman of the Verkhovna Rada (Ukraine) 	
17.40 – 19.00	<p>3rd Session – EFFECTIVE PARLIAMENT, VIBRANT DEMOCRACY</p> <p>Keynote Speeches:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Om Birla, Speaker of the House of the People (Lok Sabha) (India) • Mr. Milton Dick, Speaker of the House of Representatives (Australia) • Mr. Mustafa Sentop, Speaker of Grand National Assembly (Turkiye) • Mr. Chuan Leekpai, Speaker of the House of Representatives (Thailand) • Ms. Nicola Ruth Beer, Vice President of the European Parliament (European Union) • Mr. Gregory Meeks, Chairman of Foreign Affairs Committee House of Representatives (USA) <p>Interventions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ms. Nosiviwe Noluthando Mapisa-Nqakula, Speaker of the National Assembly (South Africa) • Mr. Jan Anthoine Bruijn, President of the Senate (Netherlands) • Mr. Tan Chuan-Jin, Speaker of Parliament (Singapore) 	<p>KK II Meeting Room, Nusantara Building 1st Floor</p> <p>Coffee is provided outside the meeting room</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Cheryl Saunders, Senior Constitution Building Expert, International IDEA / Laureate Professor of Law Emeritus, University of Melbourne 	
19.00	Assemble at Lobby Nusantara Building	Lobby Nusantara
19:30 – 21.00	Dinner hosted by the Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia	J.W Marriot Hotel, Kuningan - Jakarta
Friday, October 7, 2022		Venue
08.30 – 09.30	Tree-planting to commemorate P20 Indonesia – for all Heads of Delegation	Outdoor Area at the Parliament Building
09:30 – 11:00	<p>4th Session – SOCIAL INCLUSION, GENDER EQUALITY, AND WOMEN EMPOWERMENT</p> <p>Keynote Speeches:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ms. Nosiviwe Noluthando Mapisa-Nqakula, Speaker of the National Assembly (South Africa) • Ms. Susan Lines, President of the Senate (Australia) • Mr. Saqr Saeed Ghobash, Speaker of the Federal National Council (United Arab Emirates) <p>Interventions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Marinus Bee, Speaker of the National Assembly (Suriname) • Mr. Ratu Epeli Nailatikau, Speaker of the Parliament (Fiji) • Ms. Valentina Matvienko, Speaker of the Federation Council (Russia) • Ms. Paola Taverna, Vice President of the Senate (Italy) • Mr. Harivansh, Deputy Chairman of the Council of States (Rayja Sabha) (India) • Ms. Michiko Miyamoto, Director of the ILO Country Office for Indonesia and Timor Leste • Mr. Jamshed M. Kazi, Representative and Liason to ASEAN UN Women Indonesia 	KK II Meeting Room, Nusantara Building 1 st Floor

11:00-11:30	Closing Session Adoption of the Joint Statement Speeches: <ul style="list-style-type: none"> • Mr. Duarte Pacheco, President of the Inter-Parliamentary Union (IPU) • Dr. (HC) Puan Maharani, Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia 	KK II Meeting Room, Nusantara Building 1 st Floor
11:30	Proceed to Pustakaloka Hall	Lobby, Nusantara Building
12:00 – 13:00	Lunch hosted by the Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia	Pustakaloka Ballroom, Nusantara IV Building, Mezanine floor

B. PARLIAMENTARY FORUM IN THE CONTEXT OF THE G20 PARLIAMENTARY SPEAKERS' SUMMIT

Kegiatan G20 Parliamentary Speakers' Summit diawali dengan kegiatan Parliamentary Forum yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober pukul 14.00 s.d. 17.30 WIB di ruang Paripurna Gedung Nusantara II Komplek DPR RI. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengeksplorasi kontribusi P20 terhadap usaha global dalam mengatasi masalah yang dihadapi dunia saat ini. Kegiatan ini terdiri atas 2 sesi yang dipandu oleh moderator dari kalangan akademisi dan jurnalist serta melibatkan para penulis yang terdiri atas Ketua Parlemen dari negara-negara peserta P20, Anggota DPR RI, Kementerian/ Lembaga, para ahli dari Organisasi Internasional dan aktivis lingkungan.



Ketua DPR, Menko Perekonomian,
Wakil Ketua DPR dan Ketua BKSAP
dalam opening Parliamentary Forum

1. Parliamentary Forum Opening Session

a. *Youth voice* dari aktivis muda Indonesia

Parliamentary forum diawali dengan penyampaian harapan dari 2 orang aktivis muda Indonesia terhadap Parlemen Indonesia serta Parlemen secara keseluruhan.

1) Aeshnina Azzahra Aqilani

Aeshnina adalah seorang pelajar yang terkenal akan aksinya dalam melindungi lingkungan di Kabupaten Gresik. Dia telah menulis surat permohonan kepada beberapa duta besar negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Jerman dan Australia untuk menghentikan impor sampah yang dibuang ke Indonesia melalui Kabupaten Gresik. Selain itu, dia juga mengirim tanda tangan dari seluruh siswa di sekolahnya yang secara khusus akan dikirimkan ke kanselir Jerman, Angela Merkel. Dalam paparannya, Aeshnina menyampaikan bahwa kita harus berhenti membanjiri dunia dengan sampah plastik jika kita ingin mengatasi masalah ini. Harus terdapat pembatasan jumlah produksi plastik dan diperlukan dukungan dari Parlemen mengenai penerapan aturan ini melalui pengesahan regulasi-regulasi yang ketat.



Aeshnina Azzahra Aqilani dan Farwiza Farhan menyampaikan harapan terhadap Parlemen

2) Farwiza Farhan

Farwiza Farhan merupakan seorang aktivis lingkungan dan konservasionis hutan di kawasan ekosistem Leuser yang terletak dikawasan Aceh dan Sumatera Utara. Dia aktif di yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAKA) yang merupakan organisasi non-profit yang berfokus pada tata kelola lahan dan hutan Aceh.

Dalam pidatonya, Farwiza menekankan pentingnya perhatian dari semua pihak serta kerja bersama dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan global yang dihadapi saat ini. Kita semua harus memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia demi menjaga masa depan yang lebih baik.

b. Sambutan dari Dr. Fadli Zon, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen

Dalam pidatonya Dr. Fadli Zon menyampaikan pentingnya pertemuan dalam hal berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam menghadapi masalah global yang menjadi tantangan bersama. Sebagai anggota parlemen yang merupakan representasi masyarakat, sudah seharusnya parlemen terus berupaya untuk mewujudkan harapan masyarakat untuk kedamaian, keamanan dan kesejahteraan.



Ketua BKSAP menyampaikan
sambutannya dalam
Parliamentary Forum

Saat ini, dunia sedang menghadapi masalah global dalam bentuk kemiskinan dan pengangguran, kelaparan dan kekurangan bahan pangan, polarisasi dan perpecahan, perang dan pengungsian, kesenjangan dan disparitas, hambatan ekonomi dan krisis utang, perubahan iklim dan kerusakan keanekaragaman hayati, pandemi dan kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan, serta korupsi dan authoritarianism.

Sekarang bukan lagi saatnya untuk hanya berbicara dan saling menyalahkan. Parlemen dari seluruh dunia perlu bertindak dan berkerja sama dalam mengatasi masalah-masalah global yang sedang dihadapi. Parlemen perlu menjadi focal point untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang perlu diambil telah dilaksanakan. Parlemen juga memiliki peran penting dalam mewujudkan kerjasama global serta terciptanya multilateralisme.

c. Sambutan dari Dr. (HC) Airlangga Hartato, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Dr. (HC) Airlangga Hartato menyampaikan bahwa optimisme Presiden Joko Widodo dalam mengantisipasi resesi global yang diperkirakan akan terjadi pada tahun depan. Hal tersebut dapat terlihat dari modalitas ekonomi kita sebagai hasil dari kebijakan reformasi struktural yang ada. Kinerja perdagangan Indonesia terus mempertahankan rekor tinggi selama 28 bulan berturut-turut dengan pencapaian sekitar 24,8 miliar. Indonesia terus mendorong pemulihan ekonomi dengan menyediakan sekitar 30 miliar yang telah dialokasikan untuk mendukung tiga bidang utama, kesehatan, perlindungan sosial, dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui dukungan pariwisata, ekonomi kreatif, usaha mikro, dan kecil menengah, dan juga memperkenalkan banyak insentif pajak.



Menko Perekonomian menyampaikan sambutannya dalam Parliamentary Forum

Menko menyampaikan harapannya agar pertemuan P20 tetap fokus pada permasalahan ekonomi dan tidak terpengaruh oleh geopolitik. Oleh karena itu, besar harapan Indonesia kepada seluruh peserta pertemuan P20 untuk

sepakat bahwa G20 ditujukan sebagai *platform* ekonomi utama dalam menyelesaikan krisis yang sedang terjadi.

Pada akhir pembicaraannya, Menko juga mengingatkan kepada seluruh peserta pertemuan P20 bahwa demokrasi kita ditentukan oleh seberapa banyak kita sebagai wakil rakyat akan bertindak sesuai janji yang dibuat untuk rakyat kita. Jika kita menjanjikan mereka sistem politik yang hidup dan stabil serta udara yang lebih bersih untuk bernafas, maka melalui pertemuan ini kita harus berusaha untuk memenuhi janji-janji itu.

d. Sambutan dari Dr. (HC) Puan Maharani, Ketua DPR RI



Ketua DPR RI menyampaikan sambutannya dalam Parliametary Forum

Ketua DPR RI, Dr (HC) Puan Maharani, mengawali pidatonya dengan menyampaikan komitmen DPR RI untuk mensukseskan kontribusi parlemen dalam menyelesaikan berbagai krisis global, termasuk upaya pemulihan pandemi yang inklusif dan berkelanjutan.

Saat ini dunia sedang melakukan berbagai upaya pemulihan sosia l dan ekonomi dari dampak pandemi. Selain itu juga terdapat sejumlah agenda global dalam menuntaskan pembangunan berkelanjutan, seperti:

perubahan iklim, lingkungan hidup, ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energy, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Gejolak ekonomi global saat ini dan ketidak pastian yang berlanjut pada tahun depan, serta agenda pembangunan berkelanjutan membutuhkan respon dari kita semua. Pertemuan P20 bertujuan untuk membangun komitmen kerja bersama dalam merespon gejolak dan tantangan global tersebut.

Permasalahan global yang dihadapi sangat kompleks, sehingga membutuhkan kerja bersama semua pihak, tidak hanya pemerintah, namun juga parlemen, swasta, akademisi ataupun masyarakat sipil. Pertemuan P20 merupakan suatu kesempatan bagi parlemen sebagai penyambung suara rakyat untuk dapat mengambil peran, mulai ditingkat nasional, regional dan global melalui platform masing-masing dan menjadi pemersatu dalam memperkuat komitmen global serta menghasilkan agenda bersama yang produktif.



Suasana pelaksanaan
Parliamentary Forum 5
Oktober 2022

2. Sesi Pertama - The role of the P20 in the context of inter-parliamentary cooperation to strengthen multilateralism in the 21st century

Sesi pertama Parliamentary Forum membahas tentang peran P20 dalam konteks kerjasama antar parlemen dalam memperkuat multilateralisme di abad ke 21. Sesi ini dimoderatori oleh Philips J. Vermonte, Dekan Fakultas

Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Executive Director CSIS Jakarta. Untuk memperdalam diskusi, sesi ini mengundang 4 orang panelis dari berbagai latar untuk memperkaya diskusi mengenai peran parlemen dalam memperkuat multilateralisme ini.



a. Ms. Sahiba Gafarova, Speaker of the National Assembly Negara Azerbaijan

Azerbaijan merupakan salah satu negara tamu yang diundang pada pertemuan P20 Indonesia sebagai pemegang keketuaan Non-Aligned Movement (NAM) yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. NAM hingga saat ini memiliki 120 Anggota, 18 negara observer dan 10 observer dari Organisasi Internasional.

Dalam paparannya, Ms. Sahiba Gafarova menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini seperti kemiskinan, krisis kemanusiaan, konflik, kesenjangan sosial dan perubahan iklim tidak dapat diatasi secara terpisah-pisah. Salah satu pelajaran penting yang dapat diambil dari pandemi Covid-19 adalah tantangan global membutuhkan solusi yang bersifat global pula. Parlemen, sebagai perwakilan dari masyarakat, memegang tanggung jawab untuk membahas dan mendapatkan solusi terbaik dalam menghadapi masalah global ini. Kerjasama antar parlemen merupakan bukti dari komitmen dan usaha kita untuk berkerja sama dalam

mewujudkan dunia yang lebih baik. G20 dan P20 secara khusus, merupakan forum yang penting dalam menemukan solusi-solusi tersebut.

Dalam kerangka NAM, pada bulan Juli tahun ini, Azerbaijan telah menyelenggarakan konferensi Baku yang merupakan titik penting dalam konteks kerjasama antar parlemen. Dengan partisipasi lebih dari 40 negara anggota dan 8 organisasi internasional, Konferensi Baku telah mengadopsi statuta dan kerangka kerja dari NAM beserta logo dan bendera resminya. Sebagai salah satu organisasi kerjasama antar parlemen, NAM siap untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan organisasi lainnya untuk mewujudkan tujuan bersama. Satu hal yang perlu diingat bersama adalah untuk mencapai hasil nyata dalam mengatasi masalah global, kita semua harus memperkuat efisiensi institusi internasional, mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan yang telah diadopsi dan menghilangkan penggunaan standar ganda dan pendekatan yang selektif.



Para Wakil Ketua BKSAP dalam kegiatan Parliamentary Forum

- b. Ms. Irine Yusiana Roba Putri, Member of The House of Representatives of the Republic of Indonesia / Women Political Leaders Country Ambassador for Indonesia

Ms. Irine Yusiana Roba Putri merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan daerah pemilihan Maluku Utara.

Saat ini Ms. Irine merupakan Anggota Komisi DPR RI dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen dan berperan sebagai Women Political Leaders Country Ambassador for Indonesia.



Irine Yusiana Roba Putri sebagai panelist dalam kegiatan Parliamentary Forum

Dalam pidatonya Ms. Irine menyampaikan bahwa kerjasama internasional merupakan kunci utama dalam mengatasi berbagai tantangan global saat ini. Sejarah dunia mencatat bahwa sejak berakhirnya Perang Dunia II, multilateralisme telah berhasil menjadi kerangka kerjasama bagi negara-negara di dunia untuk mencegah konflik semacam itu terjadi lagi. Multilateralisme juga berhasil menjadi cara kerangka kerja yang berperan dalam keberhasilan G20 di masa lalu dalam mengatasi krisis keuangan global dan mempromosikan stabilitas keuangan internasional.

Demikian halnya dengan pandemi Covid-19 yang berdampak bukan hanya pada perekonomian dunia, tetapi juga mengancam pencapaian pembangunan yang telah kita capai selama bertahun-tahun serta memperdalam kesenjangan ekonomi antar negara.

Masalah-masalah ini kemudian membuat kita sadar, bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa mengatasi sendirian serta pentingnya untuk

meningkatkan kerjasama dalam mewujudkan komitmen dalam mencapai agenda bersama. Melalui diplomasi parlemen, dialog dan pertukaran praktik terbaik dari pelaksanaan fungsi parlemen (legislasi, anggaran dan monitoring), Parlemen memiliki kapasitas untuk memulihkan kepercayaan, memelihara demokrasi dan menjaga agar lembaga-lembaga multilateral tetap berjalan. Semua pihak termasuk Parlemen, perlu secara aktif berpartisipasi dalam global governance dan berkontribusi pada upaya pemenuhan berbagai kebutuhan publik yang diperlukan saat ini.

c. Mr. Muhsin Syihab, Advisor to the Minister on Inter-Institutional Relations, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Mr. Muhsin Syihab selaku co-sous Sherpa G20 Indonesia dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan antar lembaga.

Dalam paparannya, Mr. Muhsin menyampaikan bahwa Parlemen dapat mendorong munculnya perubahan lewat ratifikasi/ adopsi perjanjian-perjanjian internasional, menjabarkan SDGs kedalam program-program nasional yang sesuai dengan karakter negara, mengawasi implementasi perjanjian internasional/ resolusi untuk memastikan bahwa target global juga diterjemahkan kedalam kerangka kerja nasional dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat dan pencapaian SDGs.

Selain itu Parlemen juga memiliki peran dalam memastikan penerapan prinsip multilateralisme melalui pengawasan terhadap pemerintahan, menggunakan diplomasi parlemen dalam melaksanakan dialog-dialog dengan pihak terkait dan berkerja sama dengan parlemen-parlemen lainnya dan menghasilkan solusi yang bersifat global dan dapat diadopsi oleh pemerintah.

d. Mr. Adhy Aman, Senior Programme Manager – Asia and the Pacific International IDEA

Adhy Aman mewakili IDEA, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada isu-isu demokrasi dan elektoral yang beranggotakan 34 negara. Pada kesempatan ini ia menyatakan salah satu isu yang mendesak untuk diperhatikan adalah maraknya disinformasi yang merusak demokrasi di berbagai negara, Untuk itulah dibutuhkan transformasi digital yang melibatkan forum multilateral, karena permasalahan ini tidak hanya mempengaruhi satu negara.

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi oleh IDEA, antara lain adalah misinformasi dan informasi palsu. Penyebaran misinformasi ini dilakukan seringkali dilakukan secara sengaja yang bertujuan untuk merusak, menyebarkan kebencian, dan memanipulasi massa. Terkait dengan demokrasi di banyak negara, penyebaran informasi palsu ini dapat merusak demokrasi, sistem pemilu, dan membangun perpecahan di tengah masyarakat.

Penyebarnya misinformasi tersebut bisa berasal dari aktor di dalam negeri seperti para politisi, maupun aktor lintas batas negara. Walaupun dalam beberapa kasus, penyebaran informasi tersebut tidak selalu bermaksud buruk, tetapi konsekuensi akibat penyebaran informasi tersebut dapat menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat.

Untuk memastikan para pelaku dapat dihukum dan melindungi masyarakat dari disinformasi ini, diperlukan regulasi yang memadai. Di sinilah peran parlemen penting dalam memastikan produk hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang ada

3. Sesi Kedua - How can parliaments help reach emissions reduction targets and facilitate global cooperation on climate change in times of multiple crises?

Sesi kedua Parliamentary Forum membahas tentang peran Parlemen dalam mencapai target penurunan emisi dan memfasilitasi kerjasama global untuk mengatasi masalah iklim serta permasalahan global lainnya. Sesi ini dimoderatori oleh Ms. Evi Mariani, seorang jurnalis dan pendiri serta pemimpin proyek Multatuli yang merupakan organisasi jurnalis nirlaba asal Indonesia yang berinisiatif untuk melayani yang dipinggirkan demi mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan. Untuk memperdalam diskusi, sesi ini mengundang 4 orang panelis dari berbagai latar untuk mendapatkan pandangan dari berbagai sisi mengenai permasalahan iklim dan pencapaian target global.



a. Sir Lindsay Hoyle, Speaker of the House of Commons – United Kingdom

Dalam paparannya Sir Lindsay Hoyle menyampaikan betapa pentingnya panel, diskusi dan kegiatan seperti yang kita selenggarakan ini dalam mengatasi permasalahan global. Permasalahan iklim merupakan salah satu permasalahan yang perlu diatasi segera dan menjadi perhatian bersama, dimana kita sebagai Anggota parlemen memiliki konstituen yang mengharapkan aksi nyata dari kita dalam menyelamatkan planet ini.

Sebagai pengambil keputusan, Parlemen dapat mengambil peran penting dalam mengatasi permasalahan iklim di negaranya masing-masing. Peran ini perlu didukung dengan pengawasan kebijakan pemerintah yang efektif dan pemanfaatan peran legislasi secara optimal. Selain itu dalam melaksanakan fungsi mereka, Parlemen juga perlu melibatkan seluruh masyarakat dan komponennya dalam mengatasi permasalahan iklim ini. Dengan berkerja bersama usaha yang dihasilkan akan lebih signifikan dan kita semua perlu mengambil tindakan sekarang.

- b. Mr. Putu Supadma Rudana, Vice-Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation – The House of Representatives of the Republic of Indonesia

Mr. Putu Supadma Rudana merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat dengan daerah pemilihan Bali. Saat ini Mr. Putu merupakan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen yang juga Anggota Komisi VI DPR RI.



Putu Supadma Rudana sebagai panelist dalam kegiatan Parliamentary Forum

Dalam pemaparannya Mr. Putu menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmennya dilevel internasional, antara lain melalui dukungan terhadap berbagai kesepakatan internasional seperti the Paris Agreement through Law No. 16 of 2016; UN Framework Convention on Climate Change, through Law No. 6 of 1994; and The Kyoto Protocol, through Law No. 17 of 2004.

Parlemen memegang peran penting dalam proses formulasi aturan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim melalui tiga fungsi utamanya, yaitu: legislasi, penganggaran dan pengawasan. Parlemen harus memastikan bahwa aturan yang mengatur perubahan iklim bersifat inklusif,

dan selaras dengan tujuan SDGs dan tiga pilar utamanya: Ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pada akhir pidatonya, Mr. Putu menyampaikan bahwa masi banyak yang bisa dilakukan oleh Parlemen terkait permasalahan iklim. Diharapkan pertemuan P20 kedepan, yang juga membahas tentang “sustainable development and green economy”, akan memperkuat kerjasama kita semua dalam melaksanakan usaha-usaha dalam permasalahan iklim.

c. Dr. Dadan Kusdiana, Director General of New and Renewable Energies and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources

Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) mewakili pemerintah dalam pertemuan the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20). Pada kesempatan tersebut ia menyatakan komitmen pemerintah dalam mempromosikan energi terbarukan dan telah menyusun regulasi terkait hal tersebut. Berbagai hal yang telah dipersiapkan tentu telah melalui proses diskusi bersama dengan parlemen.

Indonesia juga telah mencapai beberapa kemajuan terkait pemanfaatan energi terbarukan ini. Lebih lanjut beliau juga melaporkan hasil yang telah disepakati pada pertemuan *Working Group* di Bali. Salah satu pencapaian itu adalah disepakatinya “Bali Compact” yang berisi prinsip-prinsip umum percepatan transisi menuju sumber energi bersih dan terbarukan. Kesepakatan ini sendiri, walaupun tidak mengikat, dapat menjadi fondasi dan referensi bagi negara-negara anggota G20 dalam implementasi transisi energi tersebut.

Ia juga mengidentifikasi tiga permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam upaya transisi energi tersebut, antara lain: akses terhadap sumber energi, transfer teknologi, dan pembiayaan terkait kedua hal di atas. Terkait akses dan *energy security*, Indonesia juga sedikit banyak terpengaruh dengan konflik di antara Rusia dan Ukraina, disebabkan pasokan internasional yang mengalami gangguan beberapa waktu belakangan ini. Permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan jika negara-negara berkolaborasi dan diharapkan forum P20 ini dapat menjadi wadah membangun kolaborasi tersebut.

Walaupun telah dicapai beberapa kemajuan terkait transisi energi ini, Indonesia masih terkandala terutama dengan ketergantungan pada sumber daya batu bara dan pembiayaan investasi energi bersih. Pemerintah telah menargetkan agar transisi tersebut bisa dicapai pada tahun 2030, dan secara bertahap membangun infrastruktur energi terbarukan tersebut. Sekali lagi Dirjen EBTKE menyatakan bahwa semua

upaya tersebut tentu saja memerlukan dukungan parlemen dalam pencapaian sesuai target yang telah ditetapkan

d. Ms. Tiza Mafira, Director of Climate Policy Initiative & Founder of Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik

Tiza Mafira merupakan pakar kebijakan publik yang terkait isu lingkungan dengan pengalaman selama 15 tahun. Ia hadir pada pertemuan Parliamentary Forum dan menyampaikan keyakinannya terhadap komitmen Pemerintah dan Parlemen terutama Ketua DPR RI yang secara konsisten telah bersuara terkait hal ini.

Di tengah komitmen tersebut, kita dihadapkan pada krisis iklim yang tidak menunjukkan pelambatan dan semakin mengkhawatirkan. Transisi menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan juga tidak mungkin dicapai dalam waktu singkat dan International Panel on Climate Change (IPCC) telah mengingatkan bahwa kita hanya memiliki waktu hingga tahun 2030 untuk mengurangi emisi karbon sebesar 50% secara global. Kita harus mulai mengurangi penggunaan energi fosil dan mempercepat proses transisi energi tersebut.

Komitmen Indonesia pada pengurangan emisi karbon tersebut telah diperlihatkan dengan diadopsinya beberapa teknologi yang secara relatif lebih ramah lingkungan. Terkait hal ini diharapkan parlemen dapat menunjukkan kontribusinya terkait percepatan upaya tersebut di atas sesuai dengan fungsi yang dimiliki, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

C. MEETING TO FINALIZE THE DRAFT JOINT STATEMENT

Penyelenggaraan the G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) diorientasikan untuk menghasilkan suatu *outcome document* berupa 'Joint Statement'. Penyusunan Joint Statement dilakukan oleh Indonesia sebagai host country, bekerjasama dengan sekretariat Inter-Parliamentary Union (IPU). Pada tanggal 29 Oktober 2022 telah dilaksanakan pertemuan virtual untuk membahas Joint Statement tersebut. Pembahasan dilakukan oleh sekretariat negara-negara anggota P20.

Tahap berikutnya dari perumusan Joint Statement diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2022 atau satu hari menjelang pelaksanaan P20 Summit. Pada kesempatan itu, sesi Joint Statement dipimpin oleh IPU dan didampingi oleh perwakilan DPR RI. Negara-negara yang hadir pada sesi tersebut antara lain: Uni Eropa, Thailand, China, Russia, Ukraina, Kamboja, Australia, India, Uni

Arab Emirates, dan Indonesia. Sesi sidang dilaksanakan sekitar pukul 18.30 WIB di Gedung DPR RI Jakarta.

Jalannya sidang diawali dengan pengantar dari Ambassador Anda Filip sebagai perwakilan dari IPU dan pengantar oleh Dr. Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP DPR RI sebagai perwakilan *host country*. Dalam pengantarnya, Anda Filip menyatakan bahwa proses penyusunan Joint Statement telah berlangsung cukup lama dimana draft awal disiapkan oleh IPU. Setelah disetujui oleh Indonesia sebagai *host country*, kemudian Joint Statement tersebut disirkulasikan ke negara-negara anggota P20 melalui sekretariat masing-masing. Sementara itu, Dr. Mardani menyampaikan secara garis besar bahwa Indonesia ingin berupaya menghasilkan suatu Joint Statement yang mencerminkan sikap semua pihak, mengedepankan dialog, dan komprehensif mencakup semua isu yang dibahas di tiap sesi pleno

Selanjutnya, pembahasan dilakukan secara berurutan dari paragraph awal hingga akhir. perdebatan panjang terjadi ketika membahas Paragraph 2 mengenai perang di Ukraina. Perdebatan berkecenderungan seputar diksi perang di Ukraina. Muncul dua pihak yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Grup negara-negara Barat seperti Kanada, Australia, Jepang, dan tentunya Uni Eropa menginginkan diksi yang tegas bahwa perang di Ukraina adalah bentuk agresi militer yang dilakukan oleh Russia. Usulan tersebut tentu mendapatkan penolakan dari delegasi Russia yang menyebutkan diksi tersebut sangat tendensius dan berbahaya. Di tengah-tengah perdebatan tersebut, delegasi Ukraina menyebutkan bahwa idealnya agresi militer dimulai sejak 2014 bukan sejak Februari 2022 seperti yang dituliskan di awal para tersebut. Oleh karena sengitnya perdebatan dan tidak mengarah pada kata sepakat, pembahasan Paragraph 2 akhirnya ditunda dan pembahasan dilanjutkan ke paragraph berikutnya

Sidang di sesi drafting akhirnya berhasil mengadopsi seluruh paragraph kecuali Paragraph 2 mengenai dampak perang di Ukraina. Chair sidang perumusan Joint Statement menutup persidangan dengan tidak dicapainya kesepakatan konsensus. Pihak negara-negara Barat menyampaikan keberatannya terhadap muatan Paragraph 2 dan mereka tidak memungkinkan untuk menyetujuinya sebagai bagian dari Joint Statement. Akhirnya, Chair sidang membuka opsi penggunaan footnote sebagai ruang bagi para delegasi untuk menyampaikan reservasi. Rumusan diksi baru menjadi bahan pertimbangan para delegasi untuk melakukan konsultasi dan deliberasi dengan parlemen masing-masing. Akhirnya sidang di tutup oleh Chair sekitar pukul 21.00 WIB.

D. OPENING SESSION – THE 8th G20 PARLIAMENTARY SPEAKERS’ SUMMIT (P20)



Suasana Opening Session
P20 Indonesia

1. Video Message from Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations

Dalam pidatonya Mr. Antonio Guterres menyampaikan kita semua sedang menghadapi tantangan yang berat. Alih-alih melaksanakan pemulihan atas pandemi Covid-19, kita dihadapkan dengan ancaman resesi, inflasi, utang, kesenjangan, kemiskinan, konflik dan perubahan iklim. Kita semua dihadapkan pada permasalahan yang kompleks dimana efek terbesar dirasakan oleh wanita dan generasi muda.

Kita membutuhkan solusi yang berorientasi terhadap manusia dengan pendekatan multilateral, bersifat kooperatif dan berskala global. Secara spesifik pemulihan yang bersifat berkelanjutan membutuhkan tiga aksi mendesak, yaitu: pertama untuk mengatasi permasalahan iklim kita perlu segera membatasi emisi dan menggantikan bahan bakar fosil dengan energi terbarukan; kedua untuk memastikan pencapaian target SDGs kita membutuhkan stimulus dimana G20 Summit di Bali dapat dijadikan tempat untuk memulainya; ketiga kita perlu menjembatani perbedaan antara negara maju dan negara berkembang yang dapat memunculkan ketidakpercayaan

antar negara. Hal ini berarti dalam bentuk penyeimbangan sumber daya dan pengaruh diantara negara-negara tersebut.

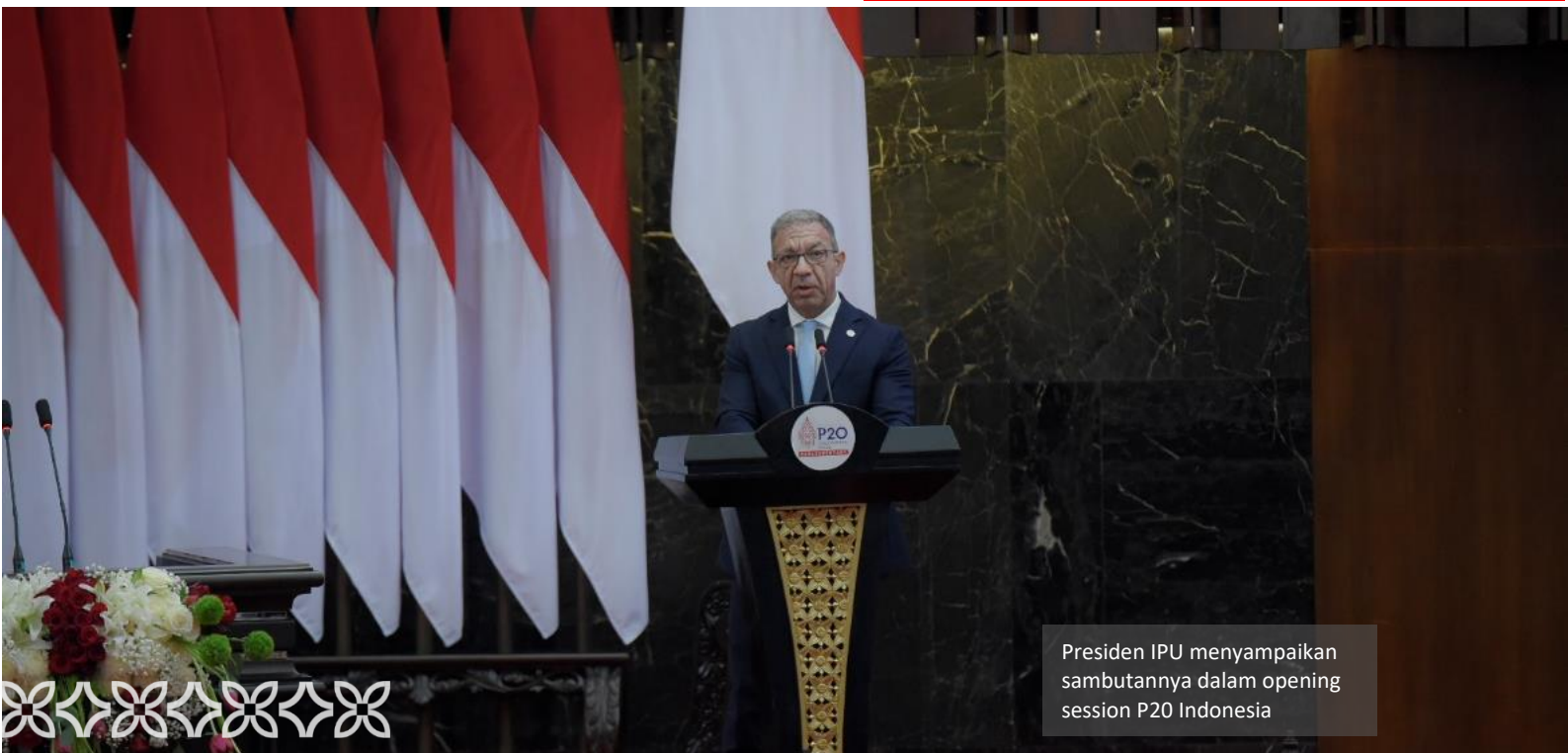


Untuk membangun dunia yang lebih baik dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, termasuk Perlemen yang merupakan representasi dari masyarakat.

2. Pidato dari Mr. Duarte Pacheco, President of the Inter-Parliamentary Union (IPU)

Dalam pidatonya Mr. Duarte Pacheco menyampaikan dunia sedang menghadapi tantangan yang besar. Setelah munculnya pandemi Covid-19, kita dihadapkan pada konsekuensi global dari perang di Ukraina. Sebagai para pemimpin parlemen, kita perlu menemukan jalan keluar yang mengedepankan aturan internasional dan memulihkan perdamaian sehingga kita dapat memfokuskan diri dalam memenuhi tuntutan masyarakat kita.

Kita perlu menerapkan aturan-aturan yang fokus kepada masyarakat dimana hal ini memerlukan penegasan kembali komitmen kita semua. IPU sebagai sebuah organisasi internasional telah mempersiapkan dirinya melalui pengembangan kriteria dan nilai ukur yang mendorong pertumbuhan pemerintahan demokratis, kesetaraan gender, peningkatan partisipasi generasi muda dan peningkatan peran publik dalam aktivitas parlemen.

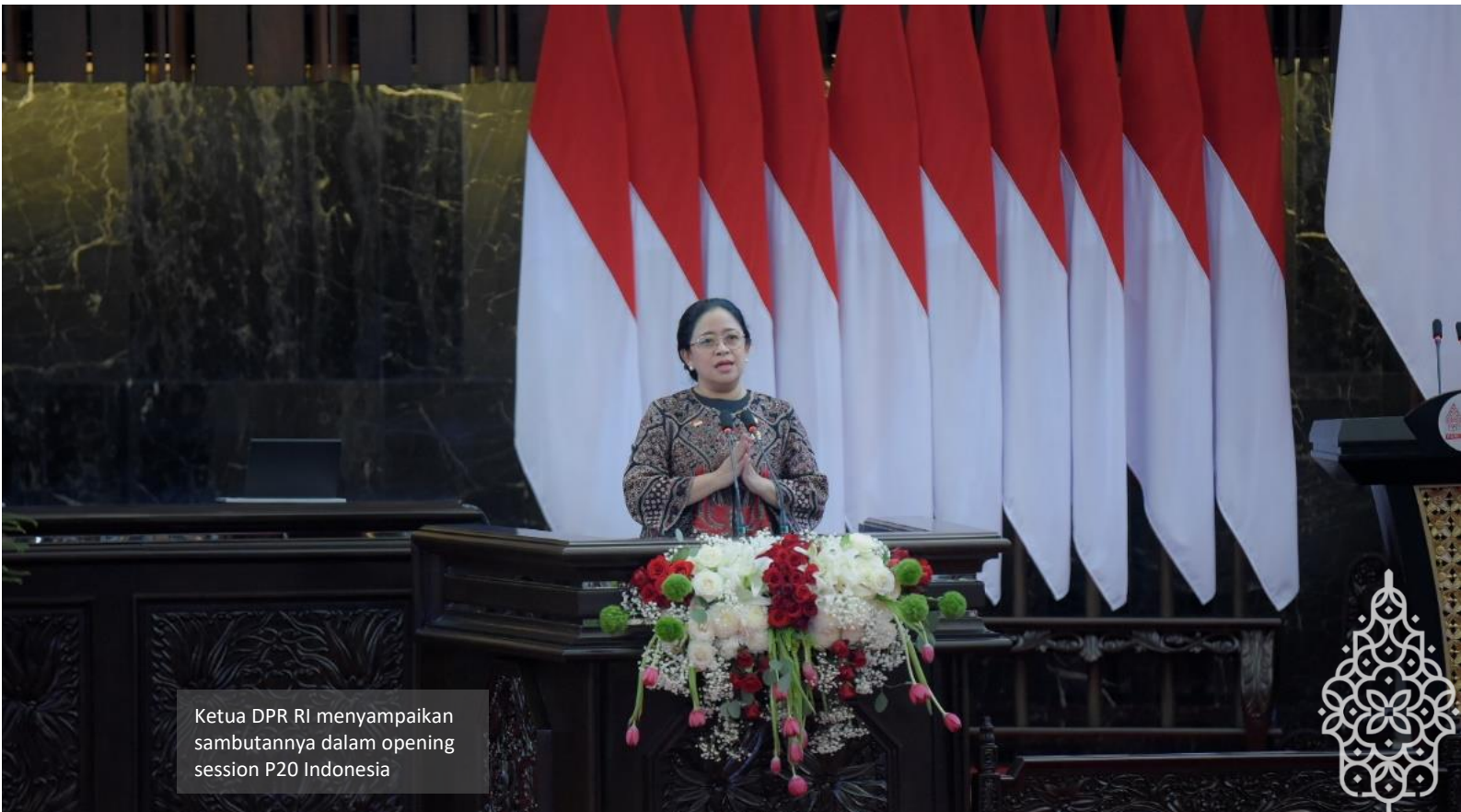


G20 Parliamentary Speakers Summit memegang peran penting dalam mewujudkan dunia yang lebih baik. Dengan memperkuat dimensi parlemen, hal ini akan menghasilkan kerjasama yang lebih optimal dan efektif dengan pemerintah. Kita semua harus berkerja bersama dan mengatasi semua masalah tanpa terkecuali. IPU berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap inisiatif yang akan diambil dalam pertemuan G20 Parliamentary Speakers' Summit ini.

3. Pidato dari Dr. (HC) Puan Maharani, Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia

Dr. (H.C.) Puan Maharani, Ketua DP RI membuka persidangan P20 dengan menyambut seluruh delegasi yang hadir pada pertemuan ini. Ketua DPR RI menyatakan tujuan pertemuan ini sebagai wadah untuk menggali kerja sama parlemen dalam mendukung agenda dan implementasi kesepakatan G20, khususnya dalam kerangka pemulihan global, pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, dan mengatasi berbagai tantangan global lainnya.

Ketua DPR RI juga mengingatkan seluruh delegasi yang hadir bahwa dunia sedang berada dalam kondisi perekonomian global yang rentan, yang ditandai inflasi yang tinggi, perlambatan ekonomi, konflik geopolitik, dan meluasnya stagflasi. Kondisi yang diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2023.



Ketua DPR RI menyampaikan sambutannya dalam opening session P20 Indonesia

Di samping tantangan ekonomi, dunia juga menghadapi tantangan lainnya berupa isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim, lingkungan hidup, ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

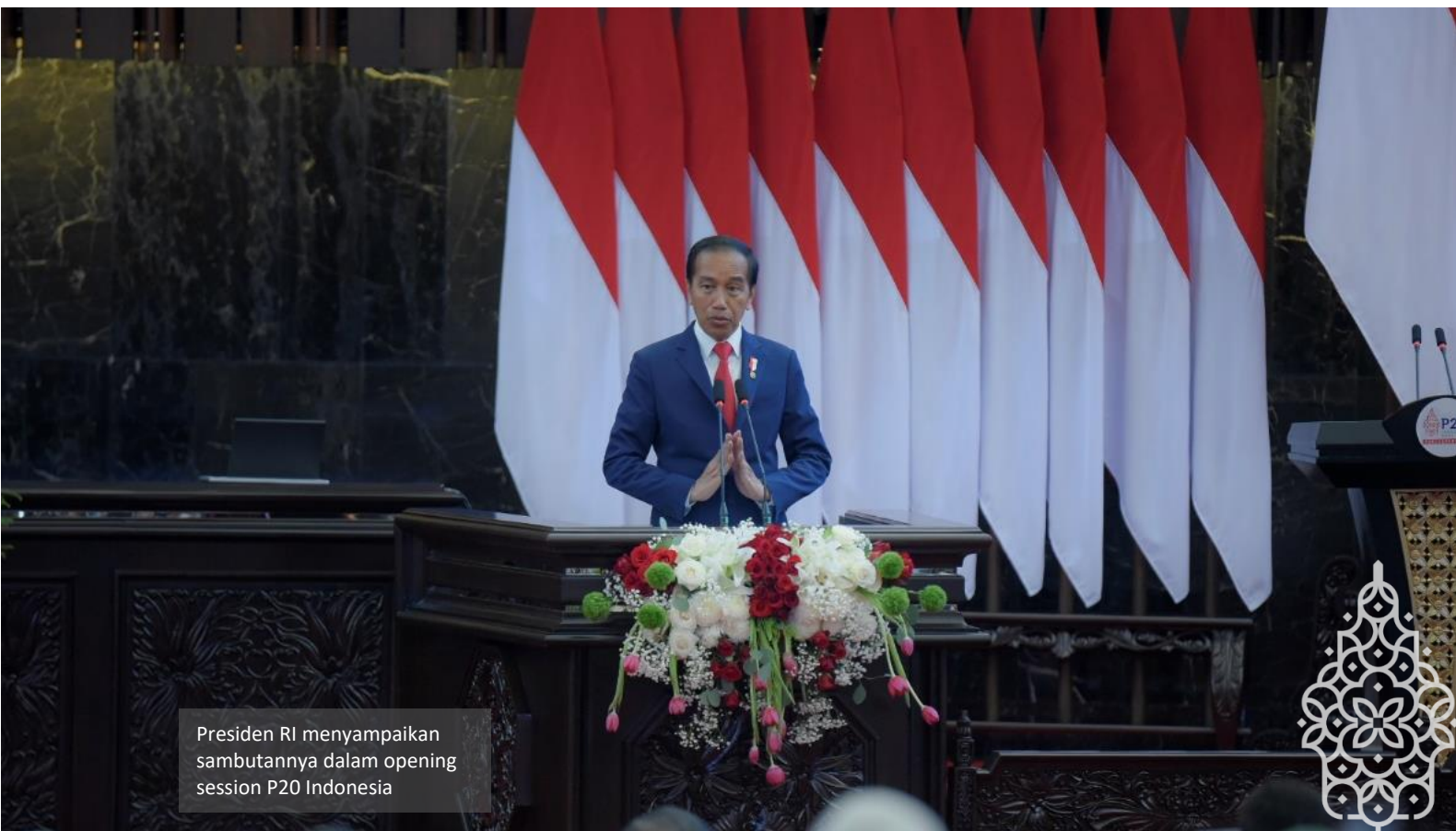
Ketua DPR menyatakan, dalam menghadapi tantangan global, tidak ada satu negara yang mampu menghadapinya sendirian. Setiap negara membutuhkan kerja sama dengan negara lainnya. Masalah lokal dapat dengan mudah berkembang menjadi krisis global dan krisis global dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari di berbagai negara.

P20 merupakan wadah yang mewakili suara masyarakat global, dan dapat memberikan legitimasi atas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terkait kebijakan luar negeri, pemulihan pasca pandemi, dan merespon tantangan global. P20 juga dibentuk guna membawa elemen demokrasi dan memperkuat akuntabilitas agenda G20. P20 dapat berperan untuk memberikan perspektif parlemen, memberikan kontribusi dalam menjembatani perbedaan antar negara, dan memperkuat interaksi dan jejaring antara Ketua Parlemen negara-negara G20 serta negara mitra lainnya.

Parlemen memiliki kesempatan untuk menyampaikan prespektif dari aspirasi rakyat yang menginginkan adanya ‘harapan baru’ (new hope), dalam mengelola tata dunia yang lebih humanis, ramah, nyaman, dan sejahtera bagi semua orang. Dalam mewujudkan komitmen parlemen untuk memberikan sebuah ‘harapan baru’ maka kita perlu mengedepankan: Pertama, komitmen kerja bersama antar negara adalah membangun kemajuan bersama; Kedua, membangun nilai global yang mempromosikan perdamaian, toleransi, dan solidaritas dalam persaudaraan dunia; dan Ketiga, agenda kerja bersama antar negara yang nyata.

Ketua DPR RI menyampaikan harapannya bahwa pada kesempatan ini, parlemen seluruh dunia dapat berupaya dalam membangun dunia yang berwajah humanis, memiliki budaya cinta pada kemanusiaan, cinta damai, dan cinta pada alam dan lingkungan hidup dengan berlandaskan pada dialog, kerja sama, gotong royong, dan tidak meninggalkan satu orangpun (No one left behind).

4. Pidato dari HE. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia



Presiden Jokowi membuka pertemuan P20 dengan menyampaikan optimismenya bahwa pertemuan para Ketua Parlemen negara G20 ini dapat menjadi wadah kerja sama dan kolaborasi di tengah tantangan berat yang dihadapi dunia dewasa ini. Konflik geopolitik menimbulkan dampak global, berupa ancaman krisis energi dunia, krisis pangan, dan krisis keuangan yang menghantui berbagai negara.

Pada saat yang bersamaan semua negara akan menghadapi dampak perubahan iklim yang turut menyumbang gangguan produksi pangan yang menyebabkan kelaparan di berbagai penjuru dunia. Banyak negara yang mampu bertahan dari ancaman ini, tetapi tidak sedikit yang terancam menjadi negara gagal. Hal itu mendorong kesenjangan yang lebih besar di antara berbagai negara, dan diharapkan forum P20 ini menjadi forum strategis untuk membicarakan agenda-agenda bersama dunia yang tentu saja memerlukan dukungan parlemen dalam menemukan solusinya.

Presiden mendorong agar seluruh negara di dunia bekerja sama, menurunkan ego, berupaya keras mengatasi perbedaan yang ada, serta memperkuat titik temu untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia, serta mengatasi krisis secara lebih efektif. Multilateralisme merupakan jalan yang paling efektif untuk mengatasi tantangan bersama, di mana tidak satupun negara dapat menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan dari negara lainnya.

Oleh karena itu Presiden menyampaikan harapannya agar parlemen global dapat menjadi bagian dari solusi, dan berperan sebagai jembatan pembawa misi perdamaian, membangun dialog, dan mengedepankan kebersamaan sebagai representasi suara rakyat secara global..

E. THEMATIC SESSIONS – THE 8th G20 PARLIAMENTARY SPEAKERS' SUMMIT (P20)

1. First Session – Accelerating Sustainable Development and the Green Economy

Ketua DPR RI, Dr (HC) Puan Maharani, membuka sesi pertama dengan memperkenalkan gedung DPR sebagai *venue* pelaksanaan P20 Indonesia. Gedung DPR didirikan pada tanggal 8 Maret 1965 yang berawal dari gagasan Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno untuk menyelenggarakan CONEFO (*Conference of the New Emerging Forces*). Ketua DPR juga menyampaikan jumlah Anggota DPR sebanyak 575 orang, dimana anggota parlemen perempuan sejumlah 123 orang atau 21,3 persen.



Ketua DPR menyampaikan ditengah kondisi dunia yang masih rentan dalam upaya pemulihan pandemi Covid-19, tantangan global menjadi semakin kompleks dengan keberadaan krisis multi-dimensi, antara lain tekanan geopolitik, krisis pangan dan energi, stagnasi ekonomi, hingga tantangan perubahan iklim dan lingkungan.

Untuk pertama kalinya dalam 32 tahun, Laporan Pembangunan Manusia PBB menunjukkan standar hidup negara-negara telah menurun secara global selama dua tahun berturut-turut. Pembangunan manusia telah jatuh kembali ke tingkat tahun 2016, membalikkan sebagian besar pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Ketimpangan antar penduduk dan negara semakin tinggi dan upaya pencapaian target tanpa kelaparan semakin berat. Hal ini menunjukkan pentingnya kita meningkatkan aksi karena waktu untuk memenuhi target SDGs kurang dari 8 tahun lagi. Untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan diperlukan langkah-langkah terobosan untuk pendanaan pembangunan, antara lain melalui memobilisasi semua sumber pendanaan serta mendorong skema pembiayaan inovatif seperti blended finance.

Disinilah Parlemen berperan penting dalam membantu mewujudkan pemulihan dunia yang lebih hijau, inklusif dan berkelanjutan. Parlemen sebagai mitra pemerintah dapat mendukung agar komitmen terwujud dalam aksi nyata. Dalam sesi pertama ini akan dilaksanakan diskusi dengan topik “*Accelerating Sustainable Development and the Green Economy*” dan bagaimana parlemen dapat berkontribusi dalam mencapai hal tersebut.

Keynote Speeches

a. Sir Lindsay Hoyle, Speaker of the House of Commons (United Kingdom)



Ketua Parlemen UK menyampaikan Keynote speech pada sesi pertama

Sir Lindsay Hoyle menyatakan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan sudah banyak diadopsi oleh semua negara. Untuk itu sangat penting bagi parlemen untuk mendorong pemerintahan di negara masing-masing agar mengembangkan energi hijau dan energi bersih yang terjangkau bagi masyarakat. Dan Parlemen UK/Inggris sangat berkomitmen dalam mendukung pemerintahannya untuk mewujudkan energi hijau.

Dirinya menyadari, tanpa dukungan pemerintah, Parlemen tidak akan bisa berdiri sendiri untuk mewujudkan energi hijau. Mengingat, dalam

mewujudkannya dibutuhkan sebuah regulasi yang diterapkan di berbagai lapisan masyarakat. Ia juga mencontohkan bahwasanya Jerman telah merintis ekonomi hijau, diantaranya menargetkan bahwa Jerman menjadi salah satu netral karbon di Tahun 2045.

b. **Mr. Duarte Pacheco**, President of the Inter-Parliamentary Union (IPU)

Presiden IPU, Duarte Pacheco, mengatakan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau sudah kembali digaungkan saat P20 di Italia. Apalagi saat itu pandemic Covid-19 sudah menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Namun, konsekuensi global dari konflik Rusia-Ukraina tak hanya menunda, melainkan juga merusak beberapa fokus agenda 2030 yang tengah dijalankan di berbagai negara. Ia berharap agar parlemen bersama pemerintah kembali mempercepat pembangunan berkelanjutan yang akan mendekati titik akhir yaitu pada 2030.

Pacheco juga mengingatkan agar parlemen antar negara saling mendukung dan memastikan tidak ada negara-negara yang tertinggal dalam pembangunannya. Sesuai dengan misi yang diemban IPU yang akan mewujudkan negara-negara yang mengedepankan pembangunan dengan tetap menjaga keberlangsungan alam lingkungan.

Ia juga minta agar para anggota parlemen, dengan pendekatan politik yang dimilikinya, untuk terlibat aktif mengatasi krisis yang terjadi saat ini demi masa depan yang inklusif. Termasuk juga menyosialisasikan terkait emisi karbon. Ia juga memuji beberapa negara yang sudah menerapkan pajak karbon dan penerapan tarif emisi berdasarkan tingkatannya.

c. **Mr. Chen Zhu**, Vice Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress (China)

Mr. **Chen Zhu** (Vice Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress) mengungkapkan bahwasanya ketegangan yang terjadi di beberapa belahan dunia menjadi langkah mundur dalam pemulihan ekonomi dunia. Hal tersebut ditandai dengan kemunduran industri global, terganggunya rantai pasokan, krisis ketahanan pangan dan energi.

Berkumpulnya para Anggota Parlemen di perhelatan P20 ini harus berdampak secara signifikan. Karena Parlemen dapat menjadi penggerak dalam memulihkan perekonomian global dan kemajuan dunia. Chen Zhu mengajak segenap anggota parlemen untuk bersatu memupuk multilateralisme, menjaga keadilan, dan perdamaian dunia berdasarkan hukum internasional dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.



Ia juga menyampaikan bahwasanya China siap bergandengan tangan untuk menjaga perdamaian dunia. Diantaranya dengan memperkuat koordinasi terkait kebijakan-kebijakan makro, menguatkan kerja sama di bidang energi dan pangan, serta bersama-sama membangun rantai industri global dan sistem rantai pasokan yang aman, stabil, dan lancar yang terbuka, inklusif, dan saling menguntungkan.

d. **Ms. Isma Yatun**, Chair of the Audit Board of the Republic of Indonesia / SAI20

Mewakili Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun mengenalkan Supreme Audit Institution 20 (SAI20) kepada delegasi yang hadir di sisi 1 Sidang P20. Dimana SAI 20 sendiri memiliki kontribusi yang tidak sedikit terhadap negara-negara G20. SAI 20 berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan berdasarkan tata kelola yang akuntabel.



Ketua BPK RI (SAI20) menyampaikan Keynote speech pada sesi pertama

la mengungkapkan, bahwasanya tantangan global terkait administrasi publik kian meningkat. Ada semacam keprihatinan pada akuntabilitas dan transparansi khususnya dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Namun, ia meyakini bahwa para Anggota Parlemen P20 telah berkontribusi secara signifikan dalam pengawasan implementasi di sektor keuangan.

Interventions

a. **Mr. Lukas Sinimbo Muha**, Chairperson of the National Council (Namibia)

Dalam intervensinya, Mr. Lukas Sinimbo Muha mengungkapkan, di beberapa negara, krisis keuangan dan ekonomi dunia sudah mencapai taraf yang memprihatinkan. Sehingga perlu upaya bersama untuk menemukan metode yang efektif dalam mengatasinya.

la menyambut baik adanya diskusi tentang percepatan pembangunan dan ekonomi hijau. Karena seringkali negara-negara kecil yang merupakan konsumen energi seringkali 'tercekik' oleh negara besar yang menjadi produsen energi. Untuk itu, ia meminta agar forum P20 ini atau melalui IPU, mampu menjamin kesetaraan terhadap peluang ekonomi bagi negara-negara kecil utamanya sebagai negara konsumen.

b. **Mr. Alfonso Rodriguez Gomez de Celis**, Deputy Speaker of the Congress of Deputies (Spain)

Dalam intervensinya, **Mr. Alfonso Rodriguez Gomez de Celis** menyampaikan, selain harus mempertimbangkan energi hijau, konsep pembangunan masa depan perlu menyesuaikan dengan ciri khas dan kultur masyarakat setempat.

Ia juga mengingatkan, agar parlemen meningkatkan kewaspadaannya akan tanggung jawab yang semakin kompleks kedepannya. Apalagi ketika dihadapkan dengan pergerakan arus populis yang semakin menguat dan mulai menggerogoti parlemen yang demokratis. Banyak proposal-proposal atau kegiatan dari kaum populis yang berupaya menjauhkan parlemen dari pedoman sah terkait pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan agenda PBB 2030.



2. Second Session – Emerging Issues: Food and Energy Security, and Economic Challenges

Ketua DPR RI, Dr (HC) Puan Maharani, membuka sesi kedua dengan menyampaikan krisis pangan dan energi global yang sedang berlangsung. Hal ini juga diperparah dengan krisis global seperti pandemi, perubahan iklim dan ketegangan geopolitik. Sebanyak 828 juta orang menderita kelaparan pada tahun 2022 (berdasarkan *data world food program*) dan kenaikan harga pangan mencapai 21% di tahun 2021.

Dunia perlu mengambil tindakan segera untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan dan energi, serta memulihkan gangguan pada rantai pasokan. Parlemen dalam hal ini perlu memastikan perdagangan pangan dan komoditas pertanian yang terbuka, adil, transparan dan non-diskriminatif. Tindakan pembatasan hanya akan mengancam rantai pasokan dan perdagangan pangan global yang berimbang paling besar pada negara-negara berkembang dan negara miskin.

Berbagai tantangan ini menegaskan bahwa kolaborasi inklusif antara semua pemangku kepentingan mutlak dilakukan, terutama dengan lembaga keuangan internasional, sektor swasta dan *like minded countries*. Kolaborasi tersebut juga harus diikuti dengan alih teknologi yang saling menguntungkan dan terus mendorong kebijakan transisi kepada energi bersih dan terbarukan.



Ketua DPR RI, Ketua BPK RI, Wakil Ketua DPR RI dan Pimpinan BKSAP dalam sesi P20 Indonesia

Pemerintah membutuhkan peran serta Parlemen yang lebih kuat dalam upaya mengatasi tantangan global, membangun ketahanan pangan dan energi serta mempercepat pemulihan ekonomi. Untuk itu dalam sesi kedua ini perlu dilakukan diskusi lebih lanjut dengan topik *Emerging Issues: Food and energy security, and economic challenges* dalam menjawab pertanyaan mengenai peran parlemen dalam mengatasi krisis global saat ini.

Keynote Speeches

a. Ms. Valentina Matvienko, Speaker of the Federation Council (Russia)

Ms. Valentina Matvienko selaku Speaker of the Federation Council menyampaikan bahwa pada saat ini, ada lebih dari cukup stok makanan yang diproduksi untuk memberi makan seluruh masyarakat. Situasi serupa juga telah berkembang di sektor energi dunia. Umat manusia mulai beralih dari sumber energi fosil ke sumber daya yang lebih bersih, dan kita memiliki kesempatan untuk beralih dari ekonomi konsumsi ke ekonomi reproduksi. Panen biji-bijian yang ada di Rusia juga berkontribusi pada pencapaian global ini. Selain itu, Rusia juga merupakan salah satu eksportir minyak terbesar dunia. Yang memiliki tingkat cadangan gas alam yang dapat dimanfaatkan dalam membantu kemakmuran masyarakat dunia, kendati demikian, lebih dari 800 juta orang di dunia mengalami kelaparan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan seperti distribusi sumber daya yang tidak adil, meningkatnya ketidaksetaraan global, dan lain sebagainya.



Beliau menyampaikan, bahwasanya sanksi ilegal sepihak yang dijatuhkan terhadap Rusia menyebabkan kekacauan yang sangat besar. Sanksi ekonomi global tersebut telah mempengaruhi pasar Rusia sebagai salah satu negara penghasil energi di dunia, dan secara signifikan menurunkan standar hidup di negara-negara yang mengeluarkan sanksi ini, tetapi yang paling terdampak dari adanya peristiwa ini adalah negara-negara miskin yang kekurangan sumber daya akan hal ini. Rencana penanaman kembali dalam mempromosikan perdagangan serta pertanian yang prosesnya dapat diprediksi dan transparan dalam menyediakan makanan untuk seluruh warga Rusia menjadi salah satu rencana yang dapat diambil kedepannya. Sanksi terhadap Rusia yang dilakukan saat ini dapat dianggap sebagai sanksi terhadap negara yang memiliki hubungan dengan Rusia. Dan sementara itu, upaya Rusia dalam meningkatkan pasokan makanan ke pasar diblokir oleh negara-negara barat. Rusia berharap agar masyarakat dunia memahami secara objektif terkait asal usul krisis Ukraina, serta alasan mengapa Rusia dipaksa membela warga sipil nya pada akhir – akhir ini. Beliau yakin bahwa persahabatan antar parlemen akan memperkuat tingkat kepedulian kita untuk mengambil tindakan tegas melalui mekanisme diplomasi parlemen. Pemerintah Rusia akan menemukan solusi untuk mengatasi semua tantangan yang ada pada saat ini, dan mengusahakan dalam memberikan kemakmuran bagi masyarakat di Rusia.

b. **Ms. Sahiba Gafarova**, Speaker of the National Assembly (Azerbaijan)

Ms. Sahiba Gafarova sebagai Speaker dari the National Assembly (Azerbaijan) menyampaikan bahwa tidak dapat dipungkiri jika dunia pada saat ini sedang menghadapi kondisi yang sulit dengan adanya berbagai tantangan seperti pandemi Covid-19, serta kesulitan yang dihadapi dalam pemulihan ekonomi menjadikan tantangan menjadi lebih berat, terutama di dalam bidang yang berhubungan dengan pangan dan keamanan wilayah yang menjadi isu prioritas bagi kebanyakan negara. Dalam hal ini, SDGs (Sustainable Development Goals) bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil tindakan sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan. Selain itu, implementasi SDGs secara nasional juga bisa didukung dengan kolaborasi dengan tingkat internasional. Apabila membahas terkait isu keamanan pangan, beliau percaya bahwa tidak ada negara yang sepenuhnya lepas dari tantangan ini. Dalam hal ini, peningkatan sumber daya dengan mendorong produksi pangan melalui sektor agrikultur menjadi kebutuhan saat ini.

Setelah itu, isu keamanan energi juga menjadi perhatian dari agenda internasional, dan juga merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi. Produksi bahan bakar dan energi di Azerbaijan telah dijamin

keamanannya, juga Azerbaijan memiliki peran penting dalam menjamin keamanan energi kepada rekan – rekan nya. Selama lebih dari 10 tahun, Azerbaijan telah menjadi pemasok minyak dan gas terpercaya bagi pasar internasional. Proyek pembangunan jalur pipa minyak Azerbaijan telah merubah peta persebaran energi di wilayah terdekat serta wilayah eropa.



c. **Ms. Kim Young Joo**, Deputy Speaker of the National Assembly (Korea)

Ms. Kim Young Joo selaku Deputy Speaker of the National Assembly (Korea) menyampaikan bahwa pada saat ini, dunia berada pada titik balik di mana kita harus mengembangkan tatanan ekonomi global ke tingkat berikutnya, yang sejalan dengan prinsip pada masa kini, yaitu pengembangan teknologi digital, konversi energi, serta respons terhadap krisis iklim. Ketidakstabilan di pasar energi internasional akibat perang di Rusia dan Ukraina menyebabkan inflasi bahan baku, energi, dan bahan pangan, yang berdampak negatif pada ekonomi global. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) telah memperingatkan terkait efek domino dalam krisis pangan global, dan menilai krisis pangan ini lebih serius daripada krisis – krisis yang telah terjadi sebelumnya. Semua negara harus bekerja sama untuk berhasil mengatasi tantangan tersebut. Masyarakat internasional, termasuk negara yang tergabung dalam G20, harus menjaga keterbukaan dan transparansi di pasar internasional, serta memperkuat

kerjasama dan solidaritas untuk meningkatkan kapasitas produksi guna merespon krisis ketahanan pangan ini.

Dalam penyampaianannya, beliau menyampaikan bahwa Korea Selatan berencana untuk terus memperluas proyek kerjasama pembangunan dengan negara berkembang untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi pertanian. Beliau mengakui bahwa Korea Selatan sendiri adalah negara yang kekurangan sumber daya alam yang bergantung pada negara asing untuk beberapa sumber energi yang dibutuhkan. Selain itu, sangat penting untuk mengamankan sumber daya yang stabil karena rantai pasokan energi internasional bisa mungkin saja akan menjadi sulit kedepannya. Parlemen Korea Selatan berencana untuk terus melakukan upaya di bidang legislatif untuk merevisi Undang-Undang Pengembangan, Penggunaan, dan Penyebaran Energi Baru dan Energi Terbarukan sehingga masyarakat negara yang tergabung dalam G20 dapat bekerja dalam solidaritas dan memperluas kerjasama untuk pengembangan teknologi energi bersih dan terbarukan.

Interventions

a. Sir Lindsay Hoyle, Speaker of the House of Commons (United Kingdom)

Sir Lindsay Hoyle, selaku Speaker of the House of Commons dari United Kingdom, menyampaikan bahwa sumber pangan dan energi merupakan salah satu isu terbesar yang dihadapi oleh dunia di saat ini. Namun dalam proses menghadapinya, terjadi berbagai konflik dan isu yang turut serta muncul. Dalam menanggulangnya, seluruh pihak yang terdampak dan terlibat harus bersatu dengan pendekatannya masing – masing untuk memberikan tindakan supportive bagi masyarakat luas. Ditengah kondisi seperti ini, adanya agresi juga merugikan banyak pihak. Seluruh negara menginginkan dunia yang memiliki toleransi dan saling menghormati satu sama lain.

Dalam peristiwa invasi Federasi Rusia ke wilayah Ukraina, Sir Lindsay Hoyle menyinggung bahwa banyak dari jumlah persediaan pangan di Ukraina menjadi tidak dapat digunakan ataupun dikonsumsi akibat kehancuran yang diakibatkan oleh invasi dari Rusia. Sir Lindsay menyatakan bahwa beliau merasakan kekecewaan yang amat tinggi terhadap tindakan tersebut. Selain itu, beliau selaku Speaker dari UK mendapatkan sanksi dari Rusia, dikarenakan pihaknya mengecam tindakan Rusia dengan berpihak kepada negara Ukraina.

Pada kesempatan ini, Sir Lindsay Hoyle sebagai representatif dari parlemen United Kingdom menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat menandatangani Draft G20 Speaker's Declaration. Beliau hanya akan

menandatangani apabila naskah nya telah inklusif menyatakan kutukan terhadap tindakan invasi yang dilakukan oleh Federasi Rusia terhadap Ukraina serta pelanggaran terhadap hukum internasional. Kutukan ini harus merupakan inti dari naskah yang dibuat dan bukan hanya sebagai catatan samping. Seluruh pihak harus dapat menjamin kedaulatan seluruh negara, dan tidak ada negara yang memiliki hak dalam melakukan invasi.

b. **Mr. Om Birla**, Speaker of the House of the People (Lok Sabha) (India)

Mr. Om Birla selaku Speaker of the House of the People menyampaikan bahwa setelah fenomena Perubahan iklim dan pandemi global COVID-19 yang terjadi sebelumnya, saat ini dunia sedang menghadapi krisis ketahanan pangan akibat situasi konflik internasional yang terjadi. Krisis ini telah memperburuk kondisi perekonomian global lebih dari sebelumnya. Oleh karena itu, perhatian terhadap pangan dan energi bagi negara-negara berkembang juga meningkat secara signifikan. Solusi yang tepat untuk masalah global dapat ditemukan melalui upaya kolektif dari semua pihak. Beliau percaya bahwa solusi yang dibentuk harus inklusif dengan memanfaatkan sumber daya energi dengan semaksimal mungkin. Memastikan energi terbarukan bagi dunia menjadi perhatian serius dalam tantangan globalisasi ini. Sebagian besar penduduk India bergantung pada Pemerintah untuk kebutuhan energi mereka.

Prioritas India pada saat ini adalah memastikan ketahanan pangan bagi warga negara India dengan mengambil semua langkah yang diperlukan oleh Pemerintah India dalam memenuhi tanggung jawab bagi warga negaranya. Ketahanan pangan warga selama pandemi menjadi prioritas pada saat ini. Atas dasar kondisi yang terjadi pada saat ini, beliau ingin memastikan bahwa ketahanan pangan harus bisa terjamin tidak hanya untuk warga India, tetapi juga untuk warga negara lain. Beliau menyampaikan rasa terima kasih kepada parlemen semua negara karena telah memenuhi komitmen mereka dalam Perjanjian Paris tentang Energi Hijau, Konservasi Energi, serta Energi Terbarukan, untuk bekerja sama untuk memerangi perubahan iklim serta mencegah konflik berkelanjutan.

c. **Mr. Mustafa Şentop**, Speaker of Grand National Assembly (Türkiye)

Mr. Mustafa Şentop, sebagai Speaker of Grand National Assembly (Türki) menyampaikan bahwa saat ini, isu ketahanan pangan dan energi menjadi perhatian dunia saat ini. Konflik yang terjadi menyebabkan produksi dan logistik dari beberapa komoditas penting di tingkat global terganggu. Oleh karena itu, Turki sendiri mengalami konsekuensi negatif dari kondisi yang terjadi saat ini. Perang antara Rusia dan Ukraina yang terjadi ketika dunia tengah dalam masa pemulihan dari kondisi sebelumnya, menggambarkan

bahwa ketahanan pangan dan energi setidaknya sama pentingnya dengan keamanan militer. Kondisi ini telah membuat jutaan orang harus bertahan dengan krisis pangan dan menghadapi ancaman serius lainnya. Dengan berbagai cara, Turki terus memberikan kontribusi penting pada operasi rantai pasokan global yang tidak terputus. Masalah ketahanan energi berdiri di hadapan kita sebagai masalah lain yang perlu segera diselesaikan. Perang sekali lagi menunjukkan betapa rapuhnya masyarakat dunia dalam hal stabilitas pasokan energi. Ancaman yang diakibatkan atas konflik ini juga berpengaruh pada gejolak harga energi, serta memiliki efek negatif yang besar pada ekonomi global, yang sebelumnya juga telah terpuruk akibat pandemi.

Dalam menanggulangi hal ini, dibutuhkan perencanaan, koordinasi, dan tata kelola yang lebih baik di tingkat nasional, regional, dan global. Mr. Mustafa Sentop mewakili National Assembly Turki tidak ingin menyatakan bahwa mereka selalu terbuka untuk setiap kerjasama konstruktif yang diperlukan untuk keselamatan masyarakat. Kita sebagai warga dunia dapat memberikan kontribusi nyata untuk mendukung keamanan energi internasional. Selain itu, kerjasama internasional merupakan langkah yang sangat baik dalam memberikan perlindungan dan peningkatan ketahanan pangan dan energi di tingkat global.

d. **Ms. Nicola Getrud Ruth Beer**, Vice President of the European Parliament (European Union)

Ms. Nicola Getrud Ruth Beer, selaku Wakil Presiden dari European Parliament (European Union), menyampaikan bahwa memang isu terkait pangan dan energi serta keamanan merupakan kunci kepada kemakmuran dan kedamaian. Sudah merupakan tanggung jawab bagi lembaga negara yang dalam hal ini bagian parlemen, dalam menjaga hak kebebasan dan kesejahteraan masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa tindakan Federasi Rusia dalam menggunakan tingkat kelaparan dan rasa kedinginan warga yang tidak memiliki tempat tinggal sebagai senjata yang digunakan oleh pihaknya, merupakan tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Agresi yang dilakukan telah mengakibatkan kekacauan yang tidak hanya berdampak bagi wilayah Eropa, namun berdampak bagi seluruh dunia juga. Selain itu, tidak dapat dipungkiri juga bahwa sebelum peristiwa invasi dari Rusia ini terjadi, dunia sudah mengalami keterpurukan akibat adanya pandemi Covid-19 dan perubahan iklim lingkungan. Hal – hal tersebut berdampak pada kelesuan ekonomi dan berpengaruh pada keamanan global. Berbagai kebutuhan masyarakat mengalami kenaikan harga seperti naiknya harga pangan dan bahan bakar, dan akan berpotensi dalam mentidak stabilkan kondisi dari berbagai negara.

Dalam sesi intervensi ini, Ms. Nicola Getrud Ruth Beer menyinggung bahwa peristiwa seperti ketidakstabilan kondisi dari berbagai negara yang terjadi, kelesuan ekonomi, meningkatnya tingkat kelaparan di berbagai belahan dunia dan yang lain sebagainya, merupakan imbas dari tindakan agresi ilegal yang dilakukan oleh Federasi Rusia kepada Ukraina yang seperti dikatakan sebelumnya, bukan hanya berpengaruh kepada wilayah di Eropa, namun hampir ke seluruh dunia. Beliau juga menyatakan bahwa Uni Eropa tidak akan menandatangani Draft G20 Speaker's Declaration, sebagai bentuk kecaman atas agresi yang dilakukan oleh Federasi Rusia.

- e. **Mrs. Olena Kondratiuk**, Deputy Chairwoman of the Verkhovna Rada (Ukraine)



Mrs. Olena Kondratiuk sebagai Deputy Chairwoman of the Verkhovna Rada menyatakan bahwa Ukraina sangat menghargai dukungan konsisten dari negara – negara eropa terhadap negaranya. Seluruh dunia sedang ramai membicarakan negara kami, semua orang menyanjung keberanian dari masyarakat ukraina dalam memperjuangkan kebebasan dan perdamaian, dan yang paling penting yaitu kemerdekaan. Pada saat ini, terjadi berbagai kekacauan di ukraina, runtuhnya bangunan, pelecehan seksual dan penderitaan terhadap perempuan dan anak – anak, serta

kejahatan perang lainnya telah dilakukan oleh Federasi Rusia terhadap masyarakat di Ukraina. Masyarakat dunia menyaksikan genosida yang dilakukan oleh Rusia. Beliau ingin menyampaikan pesan yang penting kepada seluruh dunia. Federasi Rusia telah melakukan berbagai kejahatan kemanusiaan di Ukraina seperti pembunuhan massal, penyiksaan terhadap penduduk sipil, penghancuran infrastruktur, pengadaan referendum palsu, dan berbagai kejahatan lainnya. Hal ini tentu sangat melanggar semua prinsip dan norma hukum internasional yang ada, membahayakan arsitektur keamanan internasional dan meningkatkan risiko konflik militer global.

Beliau mengutuk dan dalam keadaan apa pun tidak mengakui hasil referendum palsu dari Rusia, serta menyatakan dengan tegas bahwa setiap pencaplokan wilayah suatu negara oleh negara lain sebagai akibat dari ancaman kekerasan atau penggunaannya merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional. Ukraina mengajak masyarakat dunia untuk bekerja bersama untuk mengakhiri perang yang merusak dan tidak masuk akal ini dan mendukung piagam PBB dan hukum Internasional.

f. **Mr. Suos Yara**, Chairman of the Commission on Foreign Affairs, International Cooperation, Information and Media/MP (Cambodia)

Mr. Suos Yara selaku Chairman of the Commission on Foreign Affairs, International Cooperation, Information and Media/MP (Cambodia) menyatakan bahwa saat ini dunia tengah menghadapi kondisi yang sulit dengan adanya berbagai tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari isu tradisional maupun non tradisional yang terus melanda. Akibat dari adanya krisis yang saat ini melanda wilayah Eropa akibat adanya konflik yang terjadi, adanya masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang keamanan pangan dan energi. Saya mendukung para anggota G20 dan komunitas internasional, untuk mengadakan konsensus tentang kebutuhan terkait krisis pangan dan energi yang terjadi di berbagai wilayah di dunia, dan mencapai kestabilan serta keamanan. Berbagai tantangan serta perubahan iklim ini, harus dihadapi dengan cepat, tanggap serta konsisten, untuk menjaga kelayakan hidup dari masyarakat, serta menjaga kestabilan ekosistem lingkungan hidup dalam jangka panjang.

Dalam pembahasan ini, beliau menyampaikan kepada pemerintah serta parlemen yang tergabung kedalam G20 maupun tidak, untuk mempertimbangkan terkait sanksi atas komoditi seperti energi, pangan, pupuk, serta obat – obatan, serta pajak insentif atas produk – produk tersebut. Dalam hal ini, kerjasama regional dan kerjasama internasional dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk menjamin keamanan,

perdamaian, serta kemakmuran. Beliau mendukung pengembangan negara – negara di Asean, serta rencana kerjasamanya dengan Uni Eropa dalam konvensi kerangka kerja PBB serta perjanjian Paris. Selain itu, memperkuat kemitraan serta kerjasama antar parlemen untuk perdamaian serta pembangunan di era pasca Pandemi Covid-19, agar berbagai sektor seperti teknologi, pendidikan, dan sektor lainnya dapat pulih dan berkelanjutan.

3. Third Session – Effective Parliament, Vibrant Democracy

Diawal sesi ketiga ini Ketua DPR menyampaikan bahwa dunia sedang berada pada situasi global yang tidak menentu. Sistem demokrasi juga sedang mengalami ujian berat. Para ahli mengungkapkan adanya tren penurunan kualitas demokrasi pada beberapa tahun terakhir.



Suasana sesi ketiga P20 Indonesia

Pandemi Covid-19 dianggap sebagian kalangan sebagai salah satu faktor yang mengganggu praktik demokrasi. Pandemi Covid-19 juga menghambat pelaksanaan fungsi-fungsi legislatif sehingga mengganggu kinerja parlemen.

Meskipun demikian, pandemi juga memberikan peluang bagi kita untuk memperkuat parlemen dan demokrasi. Lewat memanfaatkan teknologi kita dapat meningkatkan interaksi dengan konstituen, memperluas partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi.

Kita tidak boleh membiarkan penurunan demokrasi terus berlarut. Kita harus memupuk kembali agar demokrasi lebih kuat, dinamis dan parlemen menjadi lebih efektif. Parlemen juga harus berkontribusi nyata terhadap pemulihan pandemi dan penyelesaian berbagai masalah global. Parlemen juga harus memastikan bahwa kesepakatan global membawa kebaikan bagi masyarakat.

Untuk itu dalam sesi ketiga ini, akan dilakukan diskusi dengan topik “*Effective Parliament, Vibrant Democracy*” yang akan memberikan kesempatan untuk bertukar pikiran mengenai peran parlemen dalam menjaga dan memperkuat demokrasi sekaligus mendorong agar demokrasi membawa dampak nyata bagi kebebasan, perdamaian dan kesejahteraan.

Keynote Speeches

a. Mr. Om Birla, Speaker of the House of the People (Lok Sabha) (India)

Mr. Om Birla selaku Speaker of the House of the People (Lok Sabha) (India) menyampaikan Dewan Perwakilan Rakyat India yang sering melakukan diskusi ekstensif tentang kepentingan publik dan nasional untuk supremasi hukum. Selain itu, dalam pemilihan terakhir jumlah pemilih di India meningkat dan hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat juga meningkat dalam berdemokrasi. Beliau menjelaskan hal ini tidak terlepas dari peran Komite parlemen yang telah dibentuk secara lebih efisien untuk meninjau kebijakan dan program pemerintah untuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah.

Keterlibatan masyarakat India dengan lembaga-lembaga demokrasi semakin meningkat melalui industrialisasi yang dilakukan oleh parlemen India. Hal ini dibuktikan dengan adanya aplikasi Sansad Digital yang bertujuan untuk menghubungkan generasi sekarang dengan Dewan Perwakilan Rakyat India. Beliau juga menyampaikan bahwa selain program diatas, adanya penerapan Undang-Undang Hak atas Informasi di Parlemen ini memperkuat sistem pemerintahan yang berpusat pada kepentingan warga negaranya.

Mr. Om Birla juga menuturkan bahwa parlemen India saat ini sedang berusaha untuk membuka jalan bagi pembangunan sosial-ekonomi rakyat yang inklusif serta bersiap untuk menjadi negara yang maju dan kuat. Kedudukan India saat ini sebagai anggota G20 membuat negara tersebut melakukan upaya untuk membuat organisasi lebih efektif dan relevan. Dalam semangat keanggotaan ini, maka India juga telah menyerukan beberapa konsep cerdas untuk perdamaian dan stabilitas global. Sebagai penutup, beliau menegaskan kembali komitmen India untuk solidaritas dan kerja sama yang lebih besar di antara negara-negara G20.



b. **Mr. Milton Dick**, Speaker of the House of Representatives (Australia)

Mr Milton Dick selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (Australia) menyinggung sedikit mengenai invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Beliau menyampaikan jika pada tanggal 31 maret 2022 lalu, parlemen Australia menyambut presiden ukraina Mr Zelensky untuk berpidato di parlemen dan sesama anggota parlemen untuk memperkuat dukungan atas tindakan invasi tersebut. Selain itu parlemen Australia juga turut mendesak sesama delegasi dan IPU untuk terus menjembatani dialog damai dan mendukung aturan multilateral demi mengakhiri konflik kedua negara tersebut. Hal ini dikarenakan menurutnya Parlemen harus memastikan bahwa mereka mengambil peran aktif dalam memperkuat keterlibatan warganya dan menjamin keterwakilan untuk menjaga kepercayaan warga negara terhadap demokrasi.

Selanjutnya Mr Milton Dick juga menyampaikan bahwa pada tahun 2022 ini preferensi Australia untuk demokrasi sebagai bentuk pemerintahan telah mencapai angka tertinggi dan didominasi oleh generasi muda. Menurutnya, ketika orang-orang muda menjadi lebih tertarik untuk terlibat dalam politik, maka sangatlah penting sebagai parlemen untuk memastikan mereka diberikan sumber daya yang tepat untuk tetap terlibat. Untuk mendorong

keterlibatan tersebut, pemerintah harus meningkatkan kepercayaan dan minat mereka terhadap demokrasi misalnya dengan memberikan layanan Pendidikan parlemen.

Kantor Pendidikan parlemen Australia tersebut juga diliputi oleh para profesional pendidikan dan komunikasi dengan pengetahuan luas tentang pendidikan proses parlementer. Salah satu program yang paling populer mereka adalah program “Gedung Parlemen” yang imersif di mana siswa sekolah melakukan perjalanan ke Gedung Parlemen di Canberra dan menjelajahi fungsi tujuan dan nilai-nilai sistem demokrasi Australia. Beliau menegaskan kembali bahwa keterlibatan dari generasi muda dalam pembuatan kebijakan, maka salah satu tujuan menciptakan parlemen yang efektif dan demokrasi yang dinamis dapat terjalin.

c. **Mr. Mustafa Sentop**, Speaker of Grand National Assembly (Turkiye)

Saat ini, isu ketahanan pangan dan energi menjadi perhatian dunia saat ini. Konflik yang terjadi menyebabkan produksi dan logistik dari beberapa komoditas penting di tingkat global terganggu. Oleh karena itu, Turki sendiri mengalami konsekuensi negatif dari kondisi yang terjadi saat ini. Perang antara Rusia dan Ukraina yang terjadi ketika dunia tengah dalam masa pemulihan dari kondisi sebelumnya, menggambarkan bahwa ketahanan pangan dan energi setidaknya sama pentingnya dengan keamanan militer.

Dengan berbagai cara, Turki terus memberikan kontribusi penting pada operasi rantai pasokan global yang tidak terputus. Masalah ketahanan energi berdiri di hadapan kita sebagai masalah lain yang perlu segera diselesaikan. Perang sekali lagi menunjukkan betapa rapuhnya masyarakat dunia dalam hal stabilitas pasokan energi. Ancaman yang diakibatkan atas konflik ini juga berpengaruh pada gejolak harga energi, serta memiliki efek negatif yang besar pada ekonomi global, yang sebelumnya juga telah terpuruk akibat pandemi.

Dalam menanggulangi hal ini, dibutuhkan perencanaan, koordinasi, dan tata kelola yang lebih baik di tingkat nasional, regional, dan global. Mr. Mustafa Sentop mewakili National Assembly Turki tidak ingin menyatakan bahwa mereka selalu terbuka untuk setiap kerjasama konstruktif yang diperlukan untuk keselamatan masyarakat. Kita sebagai warga dunia dapat memberikan kontribusi nyata untuk mendukung keamanan energi internasional. Selain itu, kerjasama internasional merupakan langkah yang sangat baik dalam memberikan perlindungan dan peningkatan ketahanan pangan dan energi di tingkat global.



Ketua Parlemen Turkiye menyampaikan Keynote speech pada sesi ketiga

d. **Mr. Chuan Leekpai**, Speaker of the House of Representatives (Thailand)

Mr. Chuan Leekpai selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (Thailand) sedikit menceritakan pengalaman berharganya selama kurang lebih 15 tahun menjadi praktisi demokrasi di Thailand, dimana menurutnya demokrasi berbeda di tiap negara mungkin hanya dalam struktur dan prosesnya. Namun, pada intinya arti demokrasi itu sendiri ialah tetap sama yakni kekuatan yang sama dari Rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dapat disimpulkan bahwa suatu parlemen yang baik ialah parlemen yang memberikan jalan bagi setiap orang untuk mengambil bagian dalam demokrasi melalui mekanisme atau warga negara.

Namun beliau menyayangkan sikap beberapa negara di kawasan yang kurang merangsang pelaksanaan demokrasi yang dinamis tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari permasalahan yang muncul seperti korupsi, politik uang, kurang meratanya peluang antar rakyat. Jika permasalahan ini dilihat dari sisi praktis politik dimana “Demokrasi berasal dari rakyat”, maka bisa jadi undang-undang saja tidak cukup. Menurutnya, orang-orang diperlukan pula orang-orang baik untuk membuat dan menegakkan undang-undang tersebut.

Mr. Chuan Leekpai menekankan bahwa demokrasi memberi orang kebebasan namun apabila individu tersebut hanya memahami atau menggunakan hak dan kebebasan mereka tanpa mengamati penerapan aturan dan peraturan publik, pelaksanaan demokrasi pasti akan gagal. Maka dari itu untuk membangun demokrasi yang dinamis, perlu dipastikan kembali para *stakeholders* atau pemangku jabatan untuk mematuhi hukum. Selain itu bagi parlemen itu sendiri dapat memperhatikan untuk menempatkan para pemangku jabatan yang tepat, terpercaya serta dapat mematuhi prinsip-prinsip Demokrat.

e. **Ms. Nicola Ruth Beer**, Vice President of the European Parliament (European Union)



Ms. Nicola Getrud Ruth Beer selaku Wakil Presiden dari European Parliament (European Union), menyampaikan bahwa adanya konflik atau perang hanyalah merusak dan tiada guna. Selain itu, apabila terjadi konflik atau perang, maka sangatlah penting untuk menjaga hak asasi manusia, demokrasi dan kebebasan. Beliau juga menuturkan bahwa sebagai anggota parlemen yang dipilih langsung oleh warga negara, parlemen yang efektif atau demokrasi yang dinamis tidak dapat kita janjikan ataupun realisasikan tanpa menjamin aspek perlindungan warga negara ini. Maka

dalam diskusi ini Ms. Nicola Getrud Ruth Beer menyatakan dukungan terkuat untuk ide-ide dasar dan fundamental yang tidak boleh dilupakan.

Ide dasar dan fundamental yang pertama yakni mengenai Hukum internasional yang harus dihormati. Berdasarkan aturan, ketertiban internasional serta kedaulatan dan Integritas teritorial semua negara harus dihormati, hak asasi manusia tidak dapat dilanggar, serta perdamaian harus dijaga. Dalam melihat konflik Rusia-Ukraina yang dinilai telah melanggar semua prinsip internasional yang telah disepakati bersama. Hal ini telah menimbulkan ancaman bagi Keamanan Global terutama kawasan Uni Eropa. Oleh karena itu, Uni Eropa menyatakan keberpihakannya terhadap rakyat Ukraina serta menekan agar agresi harus dihentikan.

Ms. Nicola Getrud Ruth Beer juga menegaskan bahwa tiap negara yang melakukan pelanggaran fundamental, prinsip dan kejahatan terhadap kemanusiaan, maka otomatis negara tersebut bertentangan bagi semua negara di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan parlemen memiliki kapasitas untuk mengarahkan kebijakan politik, diskusi dan mengidentifikasi kebijakan utama, masalah, dan tujuan yang berhubungan erat, dengan warga negaranya masing-masing. Sebagai parlemen, sudah semestinya mengutuk kejahatan perang, ancaman penggunaan senjata nuklir terhadap negara lain, ataupun invasi yang melanggar ketertiban Internasional. Hal tersebut dikarenakan menimbulkan ancaman nyata bagi warga negara. Beliau menyampaikan bahwa sebagai anggota parlemen harus memiliki pernyataan atas pelaksanaan agenda P20 yang kuat dalam hal ini.

f. **Mr. Gregory Meeks**, Chairman of Foreign Affairs Committee House of Representatives (USA)

Mr Gregory Meeks selaku Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat (AS) menyinggung mengenai ancaman modern dimana saat ini dunia sedang menghadapi salah satu ancaman dari adanya invasi ilegal Rusia ke Ukraina yang menurutnya merupakan suatu penghinaan terhadap front demokrasi. Beliau juga berpendapat bahwa konflik tak beralasan ini telah melampaui batas dan bukanlah ciri-ciri demokrasi yang bebas. Sampai saat ini kerjasama perdamaian terus diutamakan, disamping untuk melindungi warga negaranya, juga untuk mengatasi tantangan global yang kompleks.

Pada acara Summit ini, beliau juga menyampaikan mengenai krisis pangan global yang mengerikan serta krisis keamanan yang diperparah oleh adanya covid-19 serta konflik yang terjadi Ukraina. Menurutnya, dengan adanya krisis tersebut, maka dibutuhkan kerja sama Global untuk mengatasinya. Selain dari krisis pangan dan keamanan, beliau menuturkan bahwa ancaman dari perubahan iklim juga perlu untuk diperhatikan. Beliau

menegaskan bahwa parlemen di seluruh dunia harus turut membantu dalam memfasilitasi investasi Inovasi dan kebijakan yang diperlukan untuk memitigasi, beradaptasi, mengembangkan ketahanan terhadap pemanasan global.

Selanjutnya beliau memaparkan mengenai dampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan Inflasi global dan menjadi salah satu tantangan paling mendesak untuk dihadapi saat ini. Beliau menegaskan bahwa sebagai badan parlemen, perlu adanya koordinasi secara Internasional untuk mengatasi dampak tersebut. Kerja sama semacam itu juga diperlukan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Di samping melakukan kerjasama, parlemen harus juga harus melakukan pengawasan untuk memastikan intervensi kesehatan yang transparan efektif dan tepat. Sekali lagi beliau menegaskan bahwa kolaborasi secara kolektif yang bersifat multilateral sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai ancaman dan tantangan global.

Interventions

a. Ms. Nosiviwe Noluthando Mapisa-Nqakula, Speaker of the National Assembly (South Africa)

Ms. Nosiviwe Noluthando Mapisa-Nqakula selaku Speaker of the National Assembly (South Africa) menyinggung sedikit konflik antara Rusia dan Ukraina dan kaitannya dengan konteks demokrasi yang aktif dan dinamis. Beliau menuturkan bahwa anggota parlemen seharusnya dapat merekomendasikan, membujuk, atau menciptakan suatu platform agar kedua negara yang berkonflik tersebut bisa menyelesaikan konflik dengan damai. Di acara summit ini mereka juga ingin memastikan bahwa demokrasi selalu diperkuat tidak pernah terancam, serta mengakui atas kebebasan demokrasi yang dinikmati sampai saat ini. Beliau juga menyampaikan bahwa penguatan demokrasi ini dilakukan dengan cara menghormati, hukum internasional serta mempromosikan multilateralisme berbasis aturan, sebagai sarana untuk mencari konsensus dalam urusan dunia dalam menghadapi tantangan global.

Ms. Nosiviwe Noluthando Mapisa-Nqakula juga menyampaikan bahwa Afrika Selatan menyambut baik perjanjian PBB dan Ukraina untuk membuka jalan bagi ekspor jutaan ton biji-bijian, dan berharap akan cepat mencapai daerah dimana makanan ini dibutuhkan terutama di benua Afrika dan Timur Tengah. Selain itu, Afrika Selatan juga mendukung seruan WTO dan IMF bagi negara-negara untuk menjalani pembatasan perdagangan pasokan medis dan makanan pada pandemi Covid-19 dimana hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi demokrasi yang dicekik oleh pandemi.

Di situasi pandemi ini penting agar demokrasi menjadi responsif terhadap penderitaan sosial ekonomi semua orang serta memastikan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem yang melindungi legitimasinya sendiri dan menunjukkan otoritas moral yang dibutuhkan oleh pemerintah. Menurutnya dorongan positif dari demokrasi ini juga dapat memberi ruang bagi negara-negara untuk menanggapi keadaan darurat di berbagai sektor seperti kesehatan, ekonomi, dan sosial segera yang disebabkan oleh pandemi. Selain itu kekuatan dan peran multilateralisme dari negara-negara juga sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dunia lainnya.

b. Mr. Jan Anthoine Bruijn, President of the Senate (Netherlands)

Mr. Jan Anthoine Bruijn selaku President of the Senate (Netherlands) menyampaikan bahwa Parlemen yang efektif hanya dapat ada dalam demokrasi yang dinamis. Hal ini dapat kita lihat dalam situasi pandemi yang menyebabkan beberapa tindakan harus diambil dan berdampak signifikan pada kehidupan warga negara. Di sanalah keseimbangan harus dipertahankan antara kemampuan pemerintah untuk bertindak cepat, namun disisi lain terdapat keterlibatan Demokrat. Menurutnya, situasi khusus ini telah menjadi peran penting parlemen untuk membuat pemerintah bertanggung jawab secara publik atas tindakannya dan menggunakan data dari publik dalam dasar pengambilan keputusan.

Pada awalnya, pemerintah Belanda menggunakan keputusan darurat yang didasarkan pada undang-undang Umum yang sudah ada sebelumnya tentang kesehatan masyarakat. Namun akibat pandemi berlangsung sangat lama, maka sebuah undang-undang sementara diperkenalkan untuk memberikan dasar hukum yang lebih baik bagi tindakan pembatasan untuk memerangi pandemi Covid-19. Beliau juga menuturkan bahwa undang-undang sementara ini memberi Parlemen landasan yang lebih cocok untuk pengawasan Demokrat dan memberi Parlemen kemungkinan untuk menilai perluasan sementara yang diperlukan. Namun pemerintah kembali dihadapkan pada situasi di mana mereka terpaksa mengubah undang-undang untuk bertindak dalam krisis epidemi dengan persetujuan kedua majelis jenderal negara di Belanda.

Mr. Jan Anthoine Bruijn, President of the Senate (Netherlands) menegaskan bahwa dari contoh kasus diatas, sangatlah penting bahwa sebagai anggota parlemen harus memiliki pemahaman mengenai situasi yang menantang atau darurat sekalipun. Terus gunakan kekuatan parlemen yang ada karena hanya dengan cara itu Parlemen bisa berjalan secara dan demokrasi bisa hidup. Sebagai penutup, beliau juga

menyampaikan keberpihakan dan dukungannya terhadap rakyat Ukraina atas invasi yang dilakukan oleh Rusia.

c. **Mr. Tan Chuan-Jin**, Speaker of Parliament (Singapore)

Mr. Tan Chuan-Jin selaku Speaker of Parliament (Singapore) memberi sedikit gambaran bagaimana Singapura mencoba untuk lebih inklusif dan representatif di Parlemen kita sehingga kita dapat mencerminkan multi-ras kita. Dan bagaimana mereka memastikan perwakilan dengan suara yang berbeda dari partai-partai oposisi, serta bagaimana memasukkan pandangan dari berbagai sektor dan non-partisan masyarakat kita. Hal Pertama yang dilakukan yakni perwakilan kelompok daerah pemilihan melalui divisi pemilihan atau konstituen *Group Representation Constituency* (GRC). Saat ini dalam masa jabatan parlemen Singapura, terdapat sekitar 28% minoritas ras dari jumlah keseluruhan.



Selanjutnya beliau menyampaikan hal kedua yang dilakukan dalam rangka inklusivitas dan representatif parlemennya yang multi-ras yakni dengan adanya skema Anggota parlemen konstituen sendiri yang memastikan bahwa akan selalu ada jumlah minimum anggota oposisi yang diwakili di Parlemen. Skema Anggota Parlemen ini diperkenalkan pada tahun 1990 dan dibawah skema ini, kandidat oposisi yang kalah dengan jumlah tertinggi persentase perolehan suara dalam pemilihan umum dapat ditawarkan di kursi Parlemen.

Konstitusi Singapura juga menetapkan hingga sembilan orang anggota parlemen yang telah memberikan pelayanan publik dengan terhormat untuk diangkat. Selain itu, selain itu mereka juga dapat memberikan suara pada semua hal kecuali Amandemen Konstitusi dan mosi tidak percaya pada pemerintah. Dalam kesimpulannya, Mr. Tan Chuan-Jin menegaskan bahwa Parlemen Singapura berusaha untuk memastikan inklusivitas dan representasi. Namun dari beberapa langkah diatas, menurutnya langkah yang sangat penting untuk dilakukan yakni mereka harus saling melengkapi dan memaksimalkan upaya keterlibatan warga negara secara langsung dalam proses demokrasi melalui teknologi Progresif misalnya melalui media sosial.

d. **Dr. Cheryl Saunders**, Senior Constitution Building Expert, International IDEA / Laureate Professor of Law Emeritus, University of Melbourne

Dr. Cheryl Saunders selaku Senior Constitution Building Expert, International IDEA menyampaikan terkait beberapa hasil pekerjaan dari International IDEA yang berkaitan dengan peran oposisi di legislator pada keadaan darurat, merujuk pada pandemi covid-19. Disampaikan bahwa pandemi covid-19 telah memperumit kontribusi yang dapat diberikan oleh anggota oposisi. Adapun kontribusi yang dimaksud selalu dilakukan oleh anggota oposisi ini berkaitan dengan tiga fungsi, diantaranya adalah perwakilan masyarakat, pengawasan terhadap pemerintah, dan menyediakan alternatif politik. Ketiga fungsi ini dinilai penting untuk diimplementasikan, terutama pada masa pandemi covid-19.

Pada masa pandemi, parlemen tidak saling bertemu dalam jangka waktu yang lama. Pertemuannya pun beralih menjadi ke pertemuan yang lebih kecil atau sesi diskusi dengan durasi yang lebih singkat. Kondisi tersebut memiliki aspek positif, namun pada satu sisi lain, kondisi tersebut juga dinilai telah menghambat diskusi inklusif, mengganggu efektivitas parlemen, dan mengganggu parlemen untuk menjalankan perannya tanpa mengurangi efektivitas respons pemerintah terhadap keadaan darurat yang sebenarnya. Terkait hal ini, terkadang parlemen merespons secara ad hoc dan memberikan peran khusus kepada anggota oposisi.

Terkait hal tersebut, Dr. Cheryl Saunders menyampaikan beberapa poin kunci dan solusi. Pertama, berkaitan dengan nilai-nilai yang dapat dibawa oleh anggota oposisi ke legislatif, yang diterapkan juga terutama dalam kondisi darurat. Kedua, dampak kondisi darurat terhadap anggota oposisi perlu dipahami. Ketiga, aturan alternatif perlu dibuat dengan menyesuaikan budaya dan politik lokal agar memungkinkan legislatif untuk memainkan peran demokratis. Sebagai penutup, disampaikan juga bahwa di sisi lain, anggota oposisi juga perlu menyesuaikan sikap pertentangannya dalam kepentingan merespons secara efektif atas keadaan darurat.

4. Fourth Session – Social Inclusion, Gender Equality, and Women Empowerment



Ketua DPR RI dan Presiden IPU dalam sesi ke empat P20 Indonesia

Ketua DPR , Dr (HC) Puan Maharani, membuka sesi keempat dengan menyampaikan tantangan global dan konflik geopolitik yang telah memukul mundur berbagai kemajuan dalam bidang setaraan gender. Banyak perempuan terhalang dari partisipasi politik, akses ekonomi dan pendidikan, hingga jaminan keamanan dan kesehatan. Pendidikan merupakan pintu pertama peningkatan literasi, keterampilan dan keahlian, partisipasi politik serta kesadaran terhadap kesehatan kaum perempuan. Pendidikan juga berperan penting dalam membangun kesadaran kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Disamping itu, salah satu hal paling utama adalah kepemimpinan dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang perlu terus didorong. Indeks kesetaraan gender PBB menunjukkan bahwa pada tahun 2021, 95% perempuan telah menempuh pendidikan sekunder dan 57,7% perempuan

terserap ke pasar tenaga kerja. Hanya 39,7% perempuan yang menduduki kursi dalam parlemen.

Partisipasi politik perempuan tentu sangat penting dalam perlindungan perempuan dari diskriminasi dan kekerasan, termasuk penyelundupan dan perdagangan orang. Selain sektor prioritas tersebut, perempuan juga merupakan bagian integral dari pemberdayaan komunitas yang efektif dan berkelanjutan. Untuk itu dalam sesi keempat ini dilaksanakan diskusi lebih lanjut mengenai topik “Social Inclusion, Gender Equality and Women Empowerment” dan membahas lebih dalam mengenai permasalahan dan solusi-solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Keynote Speeches

- a. **Ms. Nosiviwe Noluthando Mapisa-Nqakula**, Speaker of the National Assembly (South Africa)



Ketua Parlemen Afrika Selatan membuka pidatonya dengan menyatakan bahwa parlemen merupakan institusi yang penting dalam menjaga demokrasi. Oleh karena itulah penting agar parlemen bersifat terbuka dan inklusif yang dapat menyerap aspirasi seluas mungkin. Parlemen harus mampu menjadi suara dari seluruh perwakilan masyarakat, termasuk perempuan. Data terakhir menyebutkan bahwa hanya 26% persen anggota

parlemen seluruh dunia adalah perempuan, hanya meningkat sebanyak 11% sejak tahun 1995.

Perempuan mendapatkan kesulitan, tidak hanya dalam upayanya meningkatkan kesetaraan, tetapi juga agar suara mereka didengar, baik secara domestik hingga di lingkungan profesional. Walaupun berbagai upaya afirmatif, termasuk legislasi yang mendorong partisipasi perempuan dalam dunia politik terus digalakkan, kecenderungan yang terlihat adalah, berbagai tantangan masih terus dihadapi.

Beberapa dekade belakangan ini, berbagai pertemuan multilateral telah diselenggarakan dan menghasilkan berbagai protokol yang mengangkat kondisi perempuan di berbagai negara. Salah satu yang dihasilkan adalah kesepakatan terkait Sustainable Development Goals (SDGs), hanya saja hal tersebut belum cukup dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Pandemi Covid-19 dan perubahan iklim telah menyumbang ketidaksetaraan lebih jauh dan menghambat berbagai kemajuan yang telah dicapai selama ini.

Lebih jauh, Ketua DPR Afrika Selatan menjelaskan beberapa hal yang masih dihadapi oleh perempuan, yaitu kekerasan domestik, baik dari pasangan, hingga kerabat, ketidaksetaraan kesempatan, hingga akses yang dibatasi untuk bekerja pada bidang industri tertentu. Di seluruh negara anggota G20, perempuan masih mendapat gaji yang lebih sedikit dari pada laki-laki, dan masih kesulitan untuk masuk ke dalam manajemen di berbagai perusahaan. Perempuan juga masih mendapatkan kesulitan terkait akses pendanaan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup mereka.

Oleh karena itulah, untuk memastikan suara perempuan didengarkan dalam setiap pengambilan keputusan, maka harus dipastikan keterwakilan perempuan memadai di seluruh parlemen negara anggota G20.

b. **Ms. Susan Lines**, President of the Senate (Australia)

Presiden Senat Australia membuka pidatonya dengan mengingatkan kembali bahwa perang dan konflik memiliki pengaruh besar pada memburuknya kualitas kehidupan perempuan, termasuk perang yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina. Perempuan dan anak-anak dipaksa untuk meninggalkan kehidupan normal mereka, menjadi pengungsi, dan mengandalkan belas kasihan hanya untuk bertahan hidup. Posisi Australia terkait perang ini adalah mengutuk aksi Rusia di Ukraina yang berakibat pada memburuknya kualitas hidup perempuan di negara tersebut.



Ketua Senat Australia menyampaikan Keynote speech pada sesi keempat

Keterlibatan perempuan dalam parlemen Australia memiliki sejarah panjang sejak awal awal kemerdekaan, tetapi hingga saat ini perempuan masih menghadapi perilaku seksis dan patriarkis dari anggota parlemen laki-laki, dimana para anggota parlemen perempuan secara konsisten mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dan dibaiakan suaranya dalam pengambilan keputusan. Keterwakilan perempuan di dalam parlemen Australia telah mengalami peningkatan berkat aksi afirmatif yang dilakukan selama ini. Keterwakilan perempuan pada Senat Australia telah mencapai 57% dan pada the House of Representatives, perwakilan perempuan hanya mencapai 38%, karena banyak perempuan kehilangan kursi mereka pada pemilu terkahir yang diselenggarakan pada tahun 2022.

Ketua Senat Australia juga menyatakan bahwa IPU telah menyusun rencana aksi terkait parlemen yang responsif jender dan mendorong parlemen untuk menyusun regulasi yang inklusif. Commonwealth Parliamentary Association juga telah mengembangkan panduan terkait parlemen yang responsif jender. Regulasi tersebut dirancang untuk mendorong parlemen melakukan reformasi yang dibutuhkan dalam mengurangi perundungan, kekerasan, pelecehan dan kekerasan seksual. Mekanisme internal parlemen Australia juga telah membentuk Komisi Anti Diskriminasi yang bertugas untuk melakukan investigasi terkait beberapa

kasus kekerasan seksual. Australia juga tengah membangun model untuk memastikan inklusi sosial dan kesetaraan gender.

Ketua Senat Australia menyampaikan harapannya kepada seluruh parlemen negara G20 untuk melakukan transformasi. Kita bisa melakukan mobilisasi seluruh anggota parlemen perempuan untuk menghasilkan perubahan legislasi dan substansi dalam mendorong kesetaraan gender baik pada sektor publik maupun private.

c. **Mr. Saqr Saeed Ghobash**, Speaker of the Federal National Council (United Arab Emirates)

Ketua Parlemen Uni Emirat Arab (UAE) memulai pidatonya dalam persidangan P20 dengan menyampaikan belasungkawa atas peristiwa Kanjuruhan yang menelan banyak korban. Melanjutkan pidatonya, ia menuturkan bahwa kesetaraan, pemberdayaan perempuan, dan inklusi sosial merupakan poin terpenting dalam Hak Asasi Manusia (HAM) demi terwujudnya keadilan sosial.



Ketua Parlemen UEA menyampaikan Keynote speech pada sesi keempat

Memahami tiga poin penting yang telah disinggung sebelumnya, Ketua Parlemen Uni Emirat menyampaikan bahwa institusi parlemen berperan besar dalam membuat dan menerapkan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mencapai keadilan. Namun, ia juga menuturkan bahwa dalam

mencapai kesetaraan gender, hukum dan legislasi tidak dapat melindungi sepenuhnya karena pada kenyataannya, kesetaraan berbicara tentang tidak adanya diskriminasi gender dalam berbagai kesempatan. Oleh karena itu, pemerintah dan parlemen perlu bekerja sama untuk mengembangkan strategi nasional dalam mencapai kesetaraan sosial.

Untuk mencapai kesetaraan, UAE mengatakan bahwa terdapat beberapa poin yang dapat diperhatikan. Pertama, UAE telah menandatangani Dokumen Persaudaraan yang juga diperingati sebagai Hari Persaudaraan Internasional Manusia, sebagai bentuk dukungan UAE terhadap keadilan sosial. Kedua, peran lembaga parlemen dan pemerintah dalam membentuk undang-undang yang mencakup pemberdayaan perempuan serta kesetaraan gender yang berdasar pada tiga parameter, yaitu kesetaraan kesempatan, kesetaraan hasil, dan kesetaraan pembangunan. Ketiga, pentingnya menyepakati definisi pembangunan berkelanjutan yang akan dicapai. Terakhir, peran lembaga parlemen di tingkat nasional, regional, dan internasional dalam menuju capaian kesetaraan yang sudah disepakati bersama.

Pada akhir pidatonya, Uni Emirat Arab berharap prinsip-prinsip kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan inklusi sosial dan parlemen dapat berperan dalam mempercepat tercapainya tujuan-tujuan di atas.

Interventions

a. Mr. Marinus Bee, Speaker of the National Assembly (Suriname)

Ketua Parlemen Suriname memulai pidatonya dengan mengangkat isu keterlibatan perempuan dalam semua tingkat pengambilan keputusan yang disebutkan pada Agenda 5.5 pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan perempuan dapat dimulai dengan peningkatan representasi perempuan di partai politik dan pengikutsertaan perempuan dalam daftar pemilu. Walaupun sudah ada strategi dan legislasi yang sudah mengatur hal tersebut, pada prakteknya baik secara formal maupun informal masih terdapat beberapa upaya yang menghambat.

Ketua Parlemen Suriname menyatakan bahwa parlemen di seluruh dunia perlu membuat kuota untuk memudahkan perempuan terlibat di dalamnya. Perempuan akan membawa perspektif berbeda yang penting untuk memetakan tantangan dan mengembangkan solusi. Ia juga menyampaikan dengan bangga bahwa sebanyak 29,4% anggota Parlemennya merupakan perempuan.

Dalam hal ekonomi, pemerintah perlu mendukung bisnis yang dipimpin oleh perempuan dengan menawarkan hibah dan pinjaman. Selain memberikan dukungan material, dukungan non-material berupa memastikan pendapatan bagi perempuan. Hal tersebut berkaitan dengan kesenjangan upah gender sehingga diperlukan Undang-Undang yang menjamin kesetaraan upah.

Untuk mengakhiri pidatonya, Ketua Parlemen Suriname mengakui pentingnya kontribusi perempuan, sehingga hal tersebut membutuhkan upaya bersama dan jika merujuk pada Agenda 2030, tidak satu orangpun tertinggal.

b. Mr. Ratu Epeli Nailatikau, Speaker of the Parliament (Fiji)

Ketua Parlemen Fiji membuka pidatonya dengan menyinggung isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang krusial untuk pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan yang inklusif. Nyatanya, perempuan masih tertinggal jauh di belakang laki-laki, secara global perempuan hanya mewakili sekitar 20,5% dari seluruh anggota parlemen.

Ia menyampaikan bahwa pada pemilu tahun 2018, terdapat peningkatan jumlah anggota parlemen perempuan. Fiji berada di urutan keempat terkait keterwakilan perempuan di kawasan Pasifik. Di seluruh kawasan, sekitar 9% anggota parlemen adalah perempuan. Di tengah sulitnya perempuan untuk masuk dunia politik, akibat pengaruh budaya tradisional dan sistem sosial yang sudah tertanam. Hal tersebut juga mempengaruhi rendahnya jumlah kandidat yang turut serta dalam pemilu yang hanya mencapai 24% pada tahun 2018.

Parlemen Fiji telah berupaya untuk membangun sistem yang lebih inklusif dan sensitif gender. Hal lainnya yang telah dilakukan adalah memfasilitasi mekanisme yang dapat menarik calon-calon pemimpin perempuan untuk bergabung dalam Parlemen Fiji. Terdapat standing committees untuk memastikan segala kebijakan yang ramah terhadap perempuan.

Untuk mengakhiri pidatonya, Ketua Parlemen Fiji menyampaikan harapannya untuk menciptakan parlemen sebagai tempat yang ramah gender sehingga dapat menarik lebih banyak lagi perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik dan kepemimpinan nasional. Sebagai Ketua Parlemen, kita harus dapat mengambil langkah dan aksi untuk menjadikan tujuan di atas sebagai realitas.

c. **Ms. Valentina Matvienko**, Speaker of the Federation Council (Russia)

Ketua Parlemen Rusia memulai pidatonya dengan menyatakan bahwa tingkat kontribusi wanita harus lebih meluas. Komunitas internasional harus membangun dialog untuk memastikan peran perempuan dalam mendorong stabilitas dan kemajuan. Perempuan harus menunjukkan bahwa salah satu kunci untuk menangani krisis adalah kemitraan di antara berbagai kelompok masyarakat.

Ia menyatakan bahwa solidaritas dan kerja sama adalah kunci perdamaian dunia. Sanksi sepihak yang dijatuhkan untuk Rusia menghambat tercapainya tujuan Agenda 2030 karena represi ekonomi membuat banyak pihak menderita dengan sanksi tersebut, termasuk perempuan dan anak-anak. Ia juga menyebutkan selama tahun 2003 sampai dengan 2010, sekitar 4.000 wanita hilang di Irak pada masa pembebasan perempuan.

Dalam menutup pidatonya, Ketua Parlemen Rusia memberikan ucapan selamat atas terlaksananya sidang P20 yang diyakini dapat menyatukan berbagai suara untuk mencapai keharmonian bersama.

d. **Ms. Paola Taverna**, Vice President of the Senate (Italy)



Ketua delegasi Italia menyampaikan intervensi pada sesi keempat

Wakil Ketua Parlemen Italy menyampaikan terima kasihnya kepada parlemen Indonesia yang telah menjadi tuan rumah persidangan P20 pada

tahun 2022. Sebagai tuan rumah pertemuan tahun sebelumnya, Italia menegaskan kembali tiga prinsip dasar yang disepakati pada pertemuan tahun 2020 yang dapat menjadi pedoman kita dalam menanggulangi berbagai tantangan dewasa ini, yaitu *people, planet, prosperity*.

Pertemuan kali ini adalah kelanjutan pertemuan sebelumnya yang fokus pada pembangunan, lingkungan hidup, dan kehormatan martabat manusia. Italia meyakini bahwa pengakuan terkait keberagaman manusia baik terkait agama, ras, pilihan politik, termasuk kelompok yang paling terpinggirkan merupakan kunci kohesifitas dan stabilitas masyarakat.

Ketua Parlemen Italy juga menyampaikan sedikit pandangannya terkait situasi di Ukraina yang menyebabkan penderitaan bagi masyarakat, termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua, yang tentu saja akan mendorong ketidakstabilan lebih lanjut. Oleh karena itulah perdamaian merupakan kunci yang harus terus digaungkan.

e. **Mr. Harivansh**, Deputy Chairman of the Council of States (Rayja Sabha) (India)

Dalam membuka pidatonya, Ketua Parlemen India mengangkat isu kesetaraan gender yang ada di India. Ia menyatakan bahwa perempuan-perempuan di India telah mengalami perluasan peran, termasuk ke dalam area yang didominasi oleh laki-laki. Hal tersebut ditunjukkan dengan mulai bermunculan berbagai bisnis yang dipimpin oleh perempuan.

Tidak hanya di area bisnis, diketahui juga sebanyak 34.000 wanita bergabung ke dalam angkatan bersenjata India. Perempuan sudah banyak bergabung dalam kepolisian, dan mengalami peningkatan dari 11% menjadi 25%. Di bidang pendidikan tinggi, perempuan sudah mencapai 27% lebih banyak daripada laki-laki yang mencapai 26,9%. Ilmuwan perempuan juga memainkan peranan penting dalam mengembangkan vaksin di masa pandemi.

Sebagai anggota parlemen dari negara anggota G20, India mendorong kerja sama antar parlemen untuk membuat perubahan besar dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan.

f. **Ms. Michiko Miyamoto**, Director of the ILO Country Office for Indonesia and Timor Leste

Perwakilan ILO menyampaikan beberapa permasalahan terkait ketenagakerjaan dewasa ini. Hal yang mendesak untuk diperhatikan adalah banyak perempuan yang tidak dapat bergabung dengan dunia

kerja, disebabkan beban pekerjaan domestik yang tidak dapat ditinggalkan. Permasalahan lainnya adalah kualitas pekerjaan yang rendah dengan upah minimal. Perempuan juga menghadapi tantangan di tempat kerja, seperti upah rendah, pelecehan, dan seksisme.

Ia menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan ini, kita harus terus melakukan investasi, upah cuti, dan layanan pengasuhan bagi yang memiliki anak. Hal ini untuk memastikan pendapatan yang berkelanjutan, tetapi juga membantu sebagian kewajiban tugas domestik yang harus diemban oleh perempuan. Kebijakan tersebut akan mendorong partisipasi perempuan di dunia kerja secara lebih luas, mempertahankan pekerjaan mereka, dan mencegah kemiskinan.

Pidato tersebut ditutup dengan harapan kepada pemerintah, Civil Society, akademik, dan berbagai aktor lainnya terkait tugas yang harus dilakukan. Dan tentu saja kepada para anggota parlemen yang dapat mendorong usulan tersebut menjadi kebijakan nasional.

g. **Mr. Jamshed M. Kazi**, Representative and Liason to ASEAN UN Women Indonesia

Perwakilan UN Women membuka pidatonya dengan memberikan apresiasi atas kerja keras para anggota parlemen yang tidak hanya berfokus pada kepentingan negara di tingkat internasional, tetapi juga memerhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan gender.

Ia menyebutkan bahwa partisipasi wanita di dunia politik merupakan kunci untuk memenuhi perubahan yang lebih baik karena semakin banyak perspektif muncul dan semakin beragam suara yang terdengar. Partisipasi perempuan akan melahirkan lebih banyak lagi solusi, terutama dalam aspek kesehatan, edukasi, dan anak-anak. Oleh karena itu, kita harus lebih jauh mempromosikan peran wanita di ranah publik.

Dalam mengakhiri pidatonya, perwakilan UN Women menyampaikan harapannya agar terciptanya ruang yang lebih luas untuk wanita bergerak di publik, bahkan ruang wanita untuk menjadi pemimpin di berbagai kesempatan. Tidak ada alasan untuk menolak kehadiran perempuan, sebagaimana prinsip kesetaraan gender yang ingin dicapai kita bersama.

F. CLOSING SESSION – THE 8th G20 PARLIAMENTARY SPEAKERS’ SUMMIT (P20)

Dalam closing session, Ketua DPR RI menyampaikan terima kasih kepada IPU yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan serta kepada seluruh delegasi P20 yang telah berpartisipasi dan berkontribusi selama dua hari ini. Seperti yang telah ditekankan oleh banyak pembicara, G20 harus dapat memberikan contoh nyata dan menghasilkan sesuatu yang konkrit bagi masyarakat internasional. Sebagai hasil dari pertemuan dari the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) Indonesia akan mengeluarkan Chairs’ Summary dan akan mendistribusikannya ke seluruh peserta pertemuan P20 Indonesia.

Pada kesempatan ini, Ketua DPR RI memberikan kesempatan kepada Parlemen India (Lok Sabha) untuk menyampaikan pidato dan melanjutkan tongkat presidensi P20 serta sekaligus akan menjadi tuan rumah pelaksanaan the Ninth G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) tahun 2023 mendatang.



1. Pidato penutup dari Mr. Duarte Pacheco, President of the Inter-Parliamentary Union (IPU)

Dalam pidato penutupnya, Presiden IPU, Mr. Duarte Pacheco menyampaikan terima kasih kepada Indonesia yang telah menyelenggarakan pertemuan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit ini. Pertemuan ini telah

memberikan kesempatan bagi kita semua untuk saling belajar dan bertukar pengalaman dalam berbagai tema yang dibahas.

Seperti yang disampaikan oleh Presiden RI, H.E. Joko Widodo pada pidatonya saat pembukaan, bahwa parlemen merupakan bagian dari solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan kompleks yang kita hadapi saat ini. Parlemen juga berperan sebagai jembatan dalam mengembangkan dialog khususnya disaat sekarang, dimana dunia sedang menghadapi permasalahan global.

Saat ini kita semua dapat duduk bersama, terlepas dari perbedaan sudut pandang dalam berbagai isu, merupakan sebuah keberhasilan. Hal ini menunjukkan bahwa kita semua dapat bersama untuk berdiskusi dan berdialog, dimana ini merupakan salah satu dari nilai yang diusung oleh IPU.

P20 merupakan salah satu bagian penting dari G20 dan kita harus terus memperkuat dimensi parlemen dalam kerjasama internasional. Kerjasama internasional harus terus dibangun dan salah satunya dalam Assembly IPU ke 145 di Kigali, Rwanda tanggal 10 s.d. 15 Oktober nanti.

2. Pidato penutup dari Dr. (HC) Puan Maharani, Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia

Dalam pidato penutupannya, Ketua DPR RI, Dr. (HC) Puan Maharani menyapaikan bahwa the 8th Parliamentary Spakers' Summit (P20) ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mencapai upaya menjembatani perbedaan di antara kita.

Kehadiran para Ketua Parlemen dan anggota parlemen merupakan wujud komitmen nyata akan semangat untuk memperkuat multilateralisme dan kerjasama internasional, khususnya melalui kerjasama antar parlemen. Ditengah berbagai perbedaan yang kita miliki, pertemuan ini telah membuktikan bahwa parlemen telah mengedepankan kerjasama internasional, dan bukannya langkah unilateral. Parlemen telah menegaskan pentingnya bukan sekedar untuk membuat komitmen, namun melakukan aksi nyata dalam setiap komitmen untuk mengatasi masalah global.

Selanjutnya kita perlu menerjemahkan apa yang telah kita bahas bersama kedalam kebijakan di negara masing-masing. Kita semua memiliki komitmen yang sama, satu dunia yang lebih baik untuk semua orang. Semoga pertemuan P20 ini berkontribusi positif dalam membangun dunia yang lebih baik, tentram dan sejahtera untuk kita semua.



G. PERTEMUAN BILATERAL

1. Pertemuan Bilateral Ketua DPR RI

- a. Delegasi United Kingdom (UK) yang dipimpin oleh Sir. Lindsey Harvey Hoyle, Speaker of the House of Commons pada tanggal 4 Oktober 2022

Dalam pertemuan ini DPR RI menggarisbawahi pentingnya tindak lanjut Roadmap Kemitraan Indonesia-Inggris 2022–2024, pemanfaatan forum Joint Economic and Trade Committee (JETCO), dan kerja sama sektor ekonomi hijau, seperti investasi dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan untuk transisi ekonomi.

Inggris mendorong kerja sama pendidikan khususnya bidang Pendidikan Tinggi, serta menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi persoalan global, baik itu krisis ekonomi, perubahan iklim, atau konflik Rusia-Ukraina. Inggris juga menegaskan dukungan terhadap kedaulatan Indonesia.



b. Delegasi Australia yang dipimpin oleh Ms. Sue Lines, President of the Senate pada tanggal 5 Oktober 2022



Kedua negara sambut baik hubungan bilateral yang sangat erat dan strategis, serta berharap dapat meningkatkan *people-to-people relations* terutama di bidang pendidikan dan pariwisata.

DPR RI menyampaikan harapan agar Roadmap IA-CEPA dapat segera diimplementasikan dimana DPR RI juga mengapresiasi dukungan dan kerjasama Australia dalam mempertahankan stabilitas regional seperti penanggulangan terorisme, dan keberlanjutan Bali Process.

- c. Delegasi Singapura yang dipimpin oleh Mr. Tan Chuan-Jin, Speaker of the Parliament of Singapore pada tanggal 5 Oktober 2022

Kedua pihak senang atas keberhasilan kerja sama pemulihan ekonomi pasca pandemi dan investasi. Indonesia harapkan Singapura dapat tingkatkan kemitraan dalam sektor investasi, transportasi, tenaga kerja, agribisnis, pendidikan dan pariwisata, termasuk pembangunan Kawasan Batam-Bintan-Karimun dan Kawasan Ekonomi Khusus lainnya.

DPR RI juga mengapresiasi patroli kerja sama Indonesia-Singapura-Malaysia, yang penting bagi diplomasi maritim dan keamanan di Selat Malaka. Kedua pihak juga akan menjajaki skenario dan peta jalan yang komprehensif untuk kerja sama pengembangan energi terbarukan, terutama di bidang mekanisme kredit karbon dan skema perdagangannya.



Singapura banyak belajar dari kepemimpinan Indonesia di G20, dan Perdana Menteri Singapura akan hadir secara langsung di acara puncak KTT G20 dimana Ketua Parlemen Singapura juga akan menyampaikan undangan resmi bagi Ketua DPR RI untuk melakukan kunjungan resmi ke Singapura.

- d. Delegasi Uni Emirat Arab (UEA) yang dipimpin oleh Mr. Saqr Ghobash, Speaker of the Federal National Council pada tanggal 5 Oktober 2022

Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan *p-to-p contact*, memperkuat kerja sama dan saling dukung dalam kerangka multilateral, serta mengedepankan pendekatan kerja sama yang komprehensif dan koordinatif. UAE juga menyampaikan kesiapan berinvestasi di Indonesia, dan selalu mempertimbangkan kemanfaatan serta dampak lingkungan dalam setiap investasi yang diberikan UAE.

Ketua DPR RI menyampaikan rencana kunjungan ke UEA pada tanggal 17 Oktober 2022, dan disambut baik Ketua Federal National Council of UAE. GKSB DPR RI dan kelompok kerja sama UAE akan mengadakan pertemuan *virtual* untuk persiapan materi yang akan dibahas dalam kunjungan tersebut.



- e. Delegasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang dipimpin oleh Mr. Chen Zu, Vice Chairman of the Standing Committee of National Peoples Congress of China pada tanggal 5 Oktober 2022

Kedua pihak sepakat untuk mendorong peningkatan kerja sama bilateral khususnya bidang infrastruktur (kereta api cepat JKT-BDG, *belt and road initiative*) kesehatan (pengembangan RI sebagai hub vaksin kawasan, dan impor alat medis), perdagangan sector pertanian dan perikanan, serta investasi (pembangunan IKN).

RI-RRT saling memperkuat komitmen mendukung diplomasi bebas aktif, menghormati one china policy (dalam isu Xinjiang dan Taiwan), serta upaya bersama menjaga perdamaian di kawasan. Indonesia dan RRT mengapresiasi pembentukan komunitas senasib sepenanggungan, untuk perdalam kerja sama internasional dan regional.

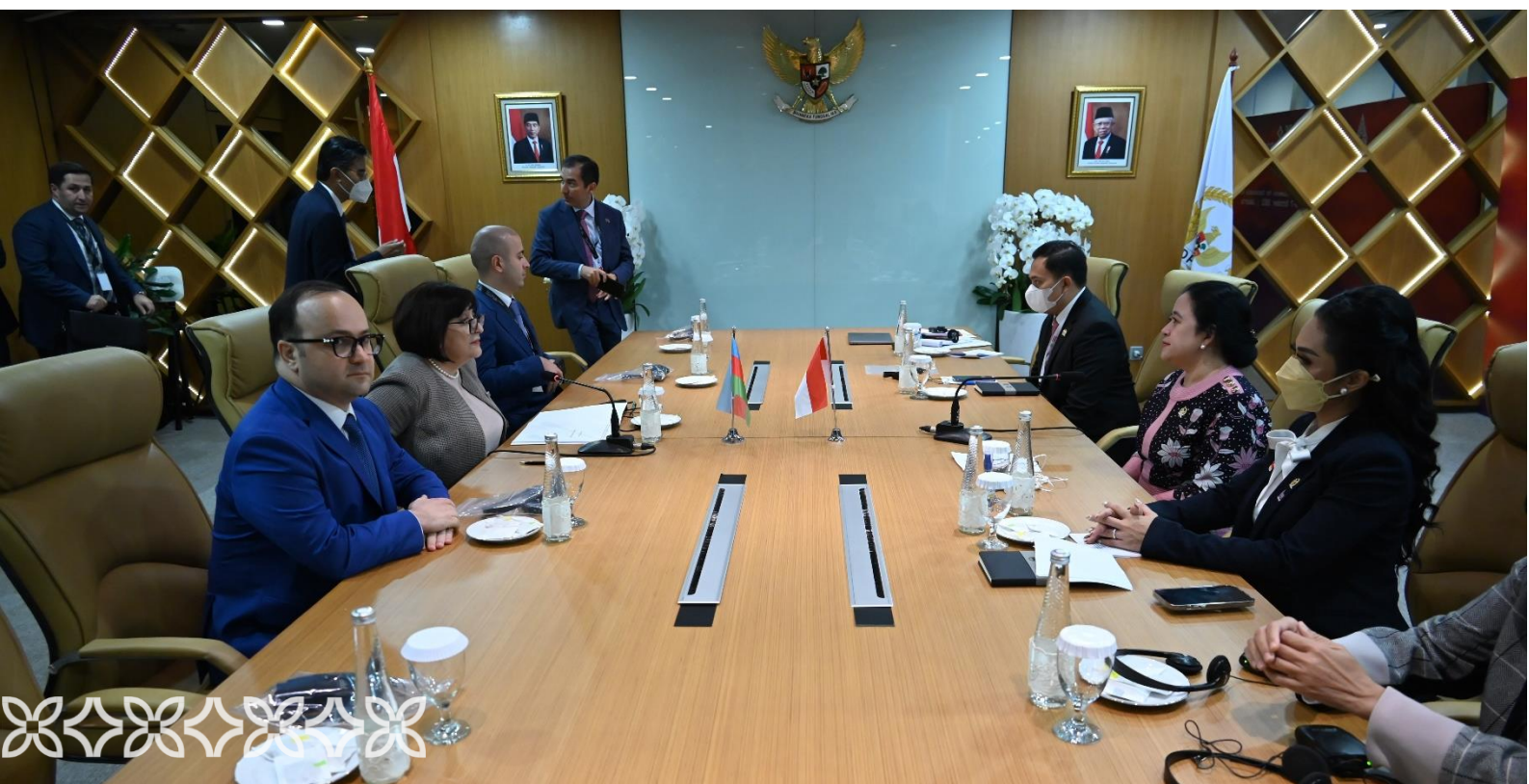
RRT tegaskan selalu mendukung kepemimpinan RI dalam G20, dan akan hadir KTT G20 di Bali pada bulan November. Kedua pihak juga sepakat untuk dorong pertukaran kunjungan antar Parlemen, G to G, dan B to B, khususnya kunjungan ke RRT.



- f. Delegasi Azerbaijan yang dipimpin oleh Ms. Sahiba Gafarova Ketua Parlemen Azerbaijan pada tanggal 5 Oktober 2022

Kedua pihak sepakat untuk mengembangkan potensi kerja sama di bidang minyak bumi dan gas, serta mendorong solusi inovatif melalui transisi energi. Parlemen Azerbaijan mendorong peningkatan kerja sama diantara Parlemen kedua negara, baik melalui Grup Kerja Sama Bilateral, maupun melalui keanggotaan pada organisasi internasional seperti Parliamentary Network on the Non-Aligned Movement (PN-NAM).

DPR-RI menyampaikan keprihatinan atas konflik antara Azerbaijan dan Armenia yang berkembang di Nagorno-Karabakh, dan berharap kedua belah pihak dapat menahan diri untuk mencegah lebih banyak korban jiwa, serta mengutamakan penyelesaian konflik melalui diplomasi dan dialog.



- g. Delegasi Ukraina yang dipimpin oleh Ms. Olena Kondratiuk, Deputy Chairwoman of the Verkhovna Rada of Ukraine pada tanggal 5 Oktober 2022

DPR RI sampaikan keprihatinan atas kondisi perang di Ukraina dan penderitaan rakyat, khususnya perempuan dan anak-anak. Indonesia berharap agar inisiatif untuk membuka alur pasok pangan (Black Sea Grain Initiative) tetap dilanjutkan, untuk kepentingan bersama seluruh pihak.

Indonesia menyampaikan bahwa referendum di 4 wilayah Ukraina melanggar prinsip piagam PBB dan hukum internasional, dan menegaskan perlunya penguatan dialog dan diplomasi untuk hentikan perang dan mencapai perdamaian.



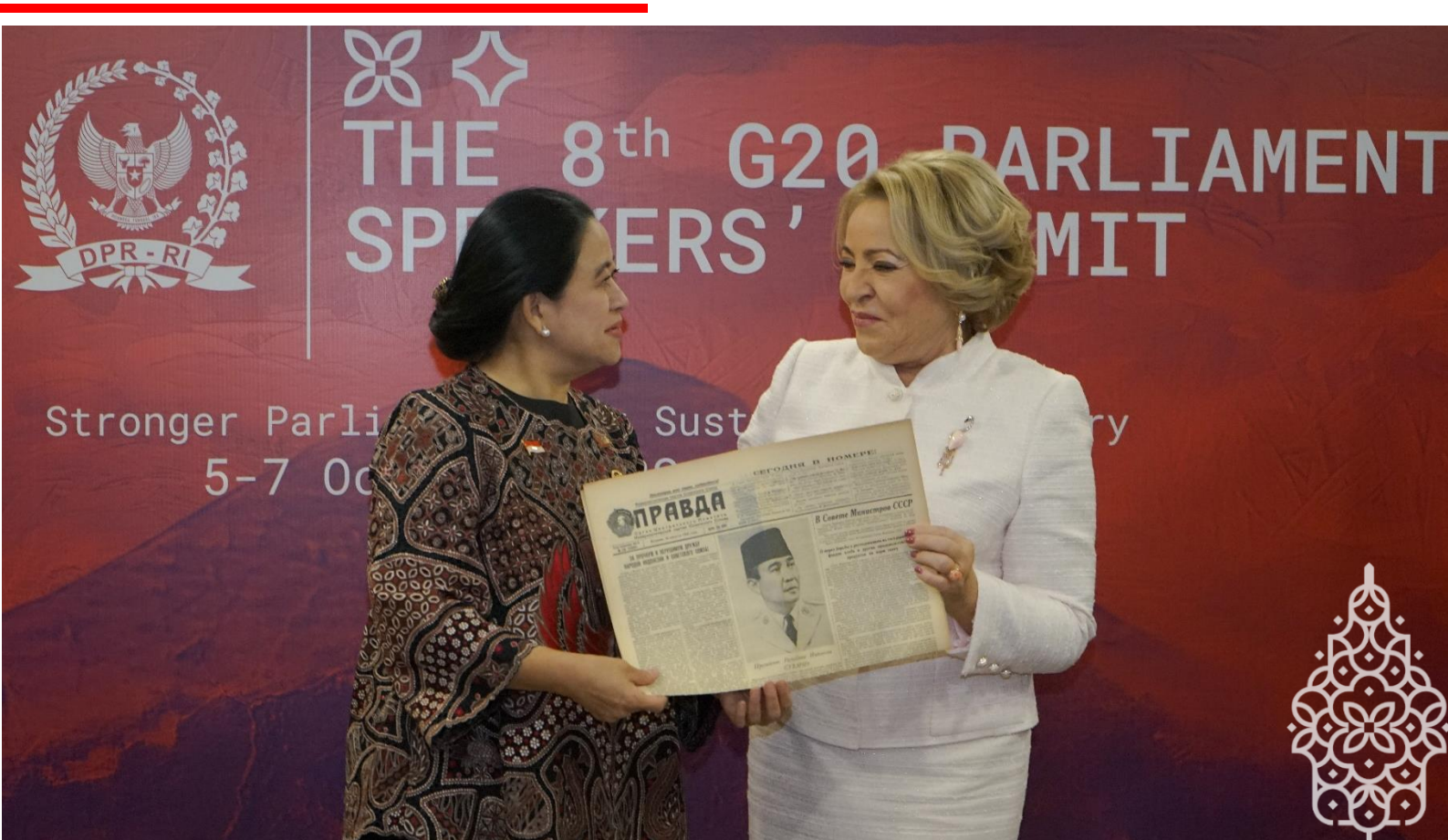
Ukraina menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan RI sejak awal perang, dan kunjungan Presiden RI ke Ukraina pada Juni 2022. Ukraina mengundang Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan investasi untuk membangun kembali infrastruktur sosial Ukraina (dengan nilai proyek USD 175 milyar).

Ukraina meminta dukungan resolusi perang, penegakan demokrasi dan perlindungan HAM bagi masyarakat Ukraina. Salah satunya dengan menolak referendum di 4 wilayah Ukraina, serta mendorong reformasi PBB dan DK PBB (menghilangkan hak veto).

Ukraina mengundang ibu Puan Maharani untuk menghadiri Global Parliamentary Summit di Zagreb, Kroasia, pada tanggal 25 Oktober 2022 (dapat dilakukan partisipasi secara *online* maupun pesan video).

Kedua negara sepakat untuk bersama-sama IPU Task Force on Ukraine menjembatani komunikasi dan negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina.

- h. Delegasi Rusia yang dipimpin oleh Ms. Valentina Matvienko, Chairwoman of the Federation Council of the Russian Federation pada tanggal 6 Oktober 2022



DPR RI sampaikan harapan untuk tingkatkan kemitraan strategis dan implementasi berbagai kesepakatan yang telah dibuat serta capai target hubungan perdagangan sebesar USD 5 miliar. DPR RI juga meminta Rusia untuk mempertahankan komitmen *Black Sea Grain Initiative* untuk kepentingan bersama, serta mendorong dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik.

DPR RI dan IPU Task Force on Ukraina berharap dapat jembatani perbedaan serta komunikasi antara Rusia dan Ukraina. Hasil dari komunikasi Task Force akan disampaikan pada 45th IPU Assembly di Kigali pada 9 Oktober 2022.

Parlemen Rusia menghormati politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, termasuk kebijakan Indonesia terhadap masalah di Ukraina. Sikap Rusia terhadap Ukraina dilakukan setelah gagalnya diplomasi damai Rusia yang dilakukan selama 10 tahun. Rusia nyatakan mempunyai hak untuk

melindungi negaranya atas keinginan Pemerintah Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan memiliki senjata nuklir. Rusia berpandangan sanksi unilateral kepada Rusia sebabkan pasokan pangan dan energi terhambat, dan meminta bantuan Indonesia untuk dapat menghapus sanksi tersebut.

Kedua parlemen sepakat untuk tingkatkan kerja sama bidang energi, produk pangan dan pupuk, investasi (pembangunan IKN), pendidikan dan pariwisata. Pada kesempatan tersebut, Parlemen Rusia mengundang Indonesia pada Eurasian Women's Forum, yang akan diselenggarakan tahun 2024.

- i. Delegasi Inter-Parliamentary Union (IPU) yang dipimpin oleh Mr. Duarte Pacheco, Presiden IPU pada tanggal 6 Oktober 2022

DPR RI sampaikan harapan agar kesuksesan Sidang IPU ke-144 di Bali di awal tahun ini dapat terulang di P20, dan dapat jembatani perbedaan yang ada serta hasilkan hal konstruktif bagi KTT G20 di Bali November mendatang. DPR RI sampaikan bahwa dukungan IPU sangat penting agar hasil P20 dapat menjadi *outcome* yang konkrit bagi dunia internasional.



IPU sampaikan apresiasi atas partisipasi perwakilan DPR RI dalam Task Force on Ukraina, dan tekankan bahwa perang bukan solusi serta harus ada dialog untuk selesaikan perbedaan pandangan yang ada. Kedua pihak

sepakat mengupayakan Joint Statement P20 yang dihasilkan melalui kompromi dan harapkan imparisialitas dari IPU dan Indonesia.

- j. Delegasi Turkiye yang dipimpin oleh Mr. Mustafa Sentop, Ketua Parlemen Turki pada tanggal 6 Oktober 2022



Kedua parlemen menggarisbawahi keberhasilan *Joint Declaration Indonesia-Turkiye: Towards an Enhanced Partnership in a New World Setting*, dan berharap dapat segera menyepakati Indonesia-Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA) untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara.

Kedua pihak juga sepakat untuk mengeksplor peluang kerja sama di bidang infrastruktur (pembangunan IKN), perdagangan, pertahanan (tank, kendaraan amfibi dan pesawat), konektivitas antarkedua negara, serta sosial budaya (bahasa dan pendidikan).

Kedua pihak juga sepakat untuk mendorong kerja sama Indonesia-Turki, terutama dalam memperjuangkan isu muslim seperti di Rohingya, dan kerja sama pertukaran informasi intelejen dalam penanggulangan ancaman terorisme.

- k. Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin oleh Mr. Gregory Meeks, Chairman of the U.S. House of Representatives Foreign Relations Committee pada tanggal 6 Oktober 2022



Kedua parlemen menyambut baik peningkatan hubungan bilateral kedua negara yang berlangsung sangat baik di tengah-tengah kondisi dunia saat ini. Kedua parlemen sepakat untuk terus mendorong peningkatan kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan, investasi, pendidikan, pariwisata dan sosial budaya.

DPR RI mengapresiasi Kemitraan Strategis RI-AS dan berharap dapat meningkatkan kerjasama bukan hanya antar parlemen tetapi juga *people-to-people*.

AS menyampaikan pentingnya peran RI sebagai negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia, serta mitra strategis AS dalam kerjasama regional dan global. Congressman AS menyampaikan apresiasi atas upaya Indonesia dalam menanggapi krisis di Myanmar, dan memberikan suaka kepada para pengungsi Rohingya. AS menyambut baik Keketuaan Indonesia ASEAN 2023, dan menyampaikan akan ada lebih banyak lagi kunjungan delegasi Kongres AS.

- I. Delegasi Belanda yang dipimpin oleh Mr. Jan Anthonie Bruijn, the President of the Senate pada tanggal 6 Oktober 2022

DPR RI apresiasi peningkatan kerja sama perdagangan bilateral kedua negara, serta hargai sikap Belanda yang mengedepankan dialog dan kerja sama dalam isu pelarangan minyak sawit ke Eropa.

DPR RI menyampaikan kritik terhadap beberapa anggota Parlemen Belanda yang baru-baru ini berkomentar mengenai isu separatisme di Papua dan juga aktivitas separatisme yang mengatasnamakan Republik Maluku Selatan.

Parlemen Belanda sampaikan bahwa Indonesia sangat penting bagi stabilitas dan keamanan serta kesejahteraan Kawasan, dan Parlemen Belanda siap membantu dan memberikan dukungan terhadap berbagai program yang dijalankan Indonesia.

Kedua parlemen sepakat mendorong prioritas kerja sama pada sektor perdagangan dan investasi, green economy dan blue economy, climate change dan transisi energi, pertahanan dan keamanan, pengelolaan sumber daya air, dan infrastruktur. Kedua pihak mendorong agar perjanjian Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat segera disepakati dan direalisasikan.



- m. Delegasi Republik of Korea yang dipimpin oleh Ms. Kim Young Joo, Deputy Speaker of the National Assembly of Republic of Korea pada tanggal 6 Oktober 2022

Kedua Parlemen sepakat bekerjasama untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan di dunia politik dan mempromosikan kesetaraan gender. Kedua Parlemen akan mempersiapkan kunjungan kehormatan Ketua DPR RI ke Korea Selatan pada 9 November 2022, serta merencanakan pertemuan dengan Presiden Korsel dan Speakers National Assembly.



RI dan Korsel berharap untuk memperkuat *strategic partnership* dan meningkatkan kerja sama sektor teknologi tinggi, ekonomi, dan keamanan untuk perdamaian.

- n. Delegasi India yang dipimpin oleh Mr. Om Birla, Speaker of Lok Sabha (House of People) pada tanggal 6 Oktober 2022

Kedua parlemen sambut baik hubungan bilateral kedua negara dan berharap dapat meningkatkan kerja sama *people-to-people contact* dan penambahan wisatawan dari masing-masing negara. Kedua pihak sepakat untuk mengupayakan pembukaan jalur penerbangan langsung Indonesia-India.



Kedua Parlemen menyampaikan pencalonan masing-masing kandidat sebagai anggota *Executive Committee Inter-Parliamentary Union* dari Asia Pacific Group yang pemilihannya akan berlangsung di Kigali, Rwanda, 11-12 Oktober 2022.

Parlemen India mengundang Parlemen Indonesia untuk menghadiri rangkaian acara P20 dalam Ketetuaan India 2023.

2. Pertemuan Bilateral Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB)

- a. Delegasi European Union (EU) yang dipimpin oleh Ms. Nicola Getrud Ruth Beer, Vice President of European Parliament pada tanggal 6 Oktober 2022

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Bapak H. Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang). Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan *p-to-p cooperation* dan mencari solusi bersama masalah paska pandemi, perubahan lingkungan dan dampak perang Ukraina (*energy and food crisis*). DPR RI dan Parlemen EU sepakat untuk mendorong tindaklanjut konkrit kerja sama terkait *Paris Agreement*, *green transition* serta dekarbonisasi dengan aksi bersama untuk pembangunan berkelanjutan.

Parlemen EU sampaikan telah membentuk Department of International Parliamentarian Diplomacy Exchange untuk meningkatkan kerja sama antar parlemen dan menyusun rekomendasi regulasi. DPR RI dan Parlemen EU akan bertemu segera di Brussels, untuk *sharing of knowledge* mengenai ETS dan mendorong IAEU-CEPA.



b. Delegasi Australia yang dipimpin oleh Mr. Milton Dick, Ketua Parlemen Australia pada tanggal 7 Oktober 2022

Delegasi Indonesia diwakili oleh Bapak Ravindra Airlangga, Anggota DPR RI (Komisi IV dan BKSAP) dari Fraksi Golkar. Indonesia harapkan dukungan Australia dalam kerja sama ketahanan pangan, teknologi pertanian, peternakan dan *illegal fishing*, perubahan iklim dan pendanaan iklim, penanggulangan bencana, transportasi dan infrastruktur (termasuk kerja sama dalam pengembangan IKN).

Kedua pihak sepakat untuk memperkuat implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) khususnya melalui ekspor impor produk pertanian dan peternakan, maupun *sharing of technology*. Australia sampaikan kesiapan dukungan kerja sama bilateral khususnya bidang peternakan dan kerja sama antar parlemen.



- c. Delegasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang dipimpin oleh Mr. Chen Zu, Vice Chairman of the Standing Committee of National Peoples Congress of China pada tanggal 7 Oktober 2022

Delegasi Indonesia diwakili oleh Ibu Puteri Anetta Komarudin, Anggota DPR RI (Komisi XI, Panitia Khusus dan BKSAP) dari Fraksi Golkar. Indonesia-RRT sepakat untuk saling berkomitmen dalam kerja sama terkait infrastruktur yang ramah lingkungan, kendaraan elektrik, dan edukasi pengembangan teknologi ramah lingkungan.

Kedua pihak membahas pengembangan kerja sama RI-RRT di bidang pembangunan yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal di Indonesia. Hal ini perlu diimbangi dengan transfer knowledge dalam setiap proyek investasi yang ditanamkan oleh Tiongkok, baik dalam bidang kesehatan, energi baru terbarukan, dan pertanian.

Indonesia juga mengapresiasi dukungan dari Tiongkok untuk pembuatan dan distribusi vaksin di Indonesia, mengharapkan pembukaan ekspor sarang burung walet dari Indonesia yang selama ini dihentikan. RRT mendorong Indonesia untuk memenuhi standar produksi yang ditetapkan oleh otoritas Tiongkok guna mempermudah upaya ekspor berbagai produk termasuk sarang burung walet.



- d. Delegasi Republik of Korea yang dipimpin oleh Ms. Kim Young Joo, Deputy Speaker of the National Assembly of Republic of Korea pada tanggal 7 Oktober 2022

Delegasi Indonesia diwakili oleh Bapak Edward Tannur, Anggota DPR RI (Komisi IV dan Panitia Khusus) dari Fraksi PKB. Indonesia harapkan peningkatan kerja sama di bidang kesehatan dan kosmetika, teknologi pertanian (revolusi hijau untuk peningkatan hasil tani siap ekspor) dan pengembangan produk kelautan.

Korea Selatan mengharapkan dukungan Indonesia terkait pencalonan kota Busan di Korea Selatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan World Expo 2023. Korea Selatan bersaing dengan Arab Saudi sebelum pemilihan pemenang yang akan diumumkan pada Juni 2023.

Selain meningkatkan kerja sama bilateral, kedua negara berharap dapat berkontribusi positif untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas situasi keamanan di Semenanjung Korea, melalui diplomasi dan dialog.



H. SOCIAL FUNCTIONS

1. Working dinner hosted by the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation, the House of Representatives of the Republic of Indonesia



Working dinner dilaksanakan di The Sultan Hotel Residence Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2022. Kegiatan dihadiri oleh Delegasi negara-negara peserta P20 Indonesia dan kedutaannya, Anggota DPR RI, Organisasi Internasional, Kementerian/ Lembaga terkait serta tamu undangan lainnya.

2. Working dinner hosted by the Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia

Working dinner dilaksanakan di J.W. Marriot Hotel Kuningan – Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2022. Kegiatan dihadiri oleh para Ketua Parlemen, Head of Delegation (HoD), anggota Delegasi P20 Indonesia beserta tamu undangan lainnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan dan memperkuat komitmen seluruh peserta P20 Indonesia dalam mengatasi masalah bersama. Lewat pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi tempat dalam berdialog dan diskusi, saling memahami satu sama lainnya, bertukar pandangan dan informasi mengenai harapan dari masyarakat kita serta membicarakan aksi-aksi konkrit yang dapat diambil.



3. Tree Planting to Commemorate P20 Indonesia

Kegiatan tree planting dilaksanakan di halaman depan kompleks gedung DPR RI pada tanggal 7 Oktober 2022. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Speaker dan Head of Delegations beserta tamu undangan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di area yang berdekatan dengan Monumen Energi Surya

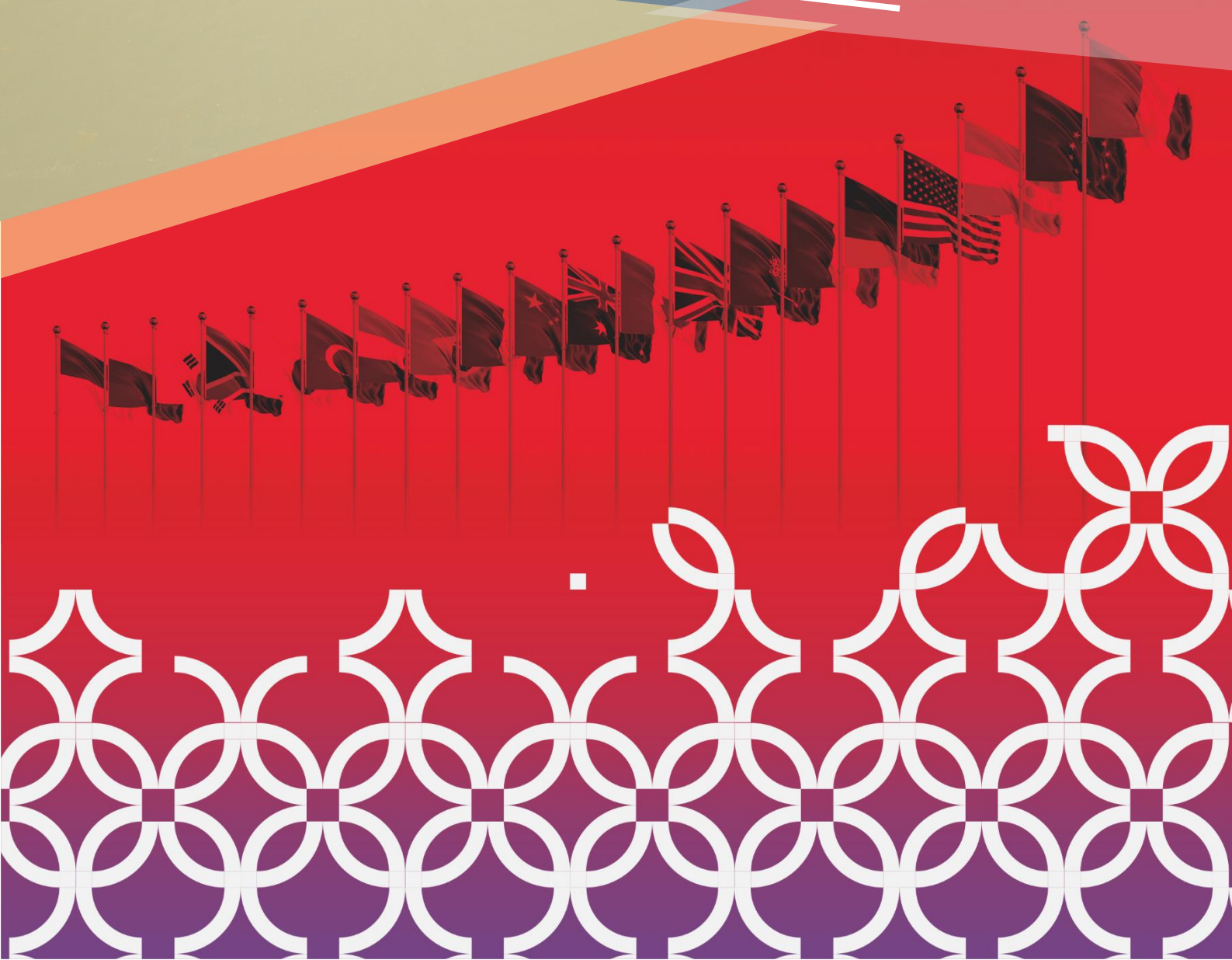
Indonesia (MESI) kompleks DPR dan bertujuan untuk menandai pelaksanaan P20 di Indonesia dan menegaskan komitmen Indonesia dalam mengatasi permasalahan iklim.



4. Working lunch hosted by the Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia

Rangkaian kegiatan the 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) diakhiri dengan kegiatan working lunch bagi seluruh delegasi P20 beserta tamu undangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2022 di Ruang Pustakaloka gedung Nusantara IV kompleks DPR RI. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi para delegasi P20 untuk membahas hasil pelaksanaan P20 Indonesia dan rencana di masa yang akan datang.





III. PENUTUP



A. ANGGARAN

Anggaran Penyelenggaraan persidangan The Eighth G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) di Komplek DPR RI, Jakarta pada tanggal 5 – 7 Oktober 2022 menggunakan Anggaran DPR RI DIPA DPR RI Tahun 2022 Nomor 002.02.CF, 5805 Pelaksanaan Tugas DPR RI dalam Kerjasama Internasional.

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran dan/atau dapat diunduh melalui link sebagai berikut:

1. The Eighth G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) Chairs' Summary, Lampiran I.
2. Dokumentasi kegiatan,
<https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/i7y6F9EAMa8xNkk>
3. List of Participants,
<https://p20indonesia.dpr.go.id/default/page/detail/id/427>
4. Concept Note,
<https://p20indonesia.dpr.go.id/default/page/detail/id/422>
5. General Information,
<https://p20indonesia.dpr.go.id/default/page/detail/id/410>
6. Health Protocol,
<https://p20indonesia.dpr.go.id/default/page/detail/id/424>
7. Agenda,
<https://p20indonesia.dpr.go.id/default/page/detail/id/413>
8. Parliamentary Forum Concept Note,
<https://p20indonesia.dpr.go.id/default/page/detail/id/425>
9. Berita Media Elektronik
 - <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39202/t/Setjen+DPR+RI+Dukung+Penuh+DPR+Jadi+Tuan+Rumah+P20>
 - <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39231/t/Tuan+Rumah+P20%2C+DPR+Siap+Tampilkan+Wajah+Terbaik+Indonesia+di+Forum+Dunia>



- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39293/t/Puan+Maharani+Akan+Bu+ka+%E2%80%98Kickoff+Meeting%E2%80%99+P20+di+Surabaya>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39314/t/Menuju+P20%2C+DPR+A+jak+Negara+G20+Selamatkan+Nasib+Dunia+dari+Berbagai+Krisis+Gl+obal>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39315/t/Puteri+Komarudin+Dorong+Penguatan+Peran+Parlemen+G20+dalam+Pemulihan+Pandemi+Glo+bal>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39312/t/BKSAP%3A+P20+Momen+tum+Perkuat+Kolaborasi+Parlemen+Untuk+Hadapi+Tantangan+di+Ma+sa+Depan>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39314/t/Menuju+P20%2C+DPR+A+jak+Negara+G20+Selamatkan+Nasib+Dunia+dari+Berbagai+Krisis+Gl+obal>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39792/t/Setjen+DPR+Sambut+Bai+k+Ketertarikan+Parlemen+Vietnam+dalam+Agenda+P20>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39790/t/Setjen+DPR+Terima+Kunj+ungan+Dubes+Vietnam+Guna+Partisipasi+dalam+Agenda+P20>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39831/t/Di+Y20+Summit%2C+Pua+n+Maharani+Ajak+Kaum+Muda+Jadi+Agen+Pembangunan+dengan+T+erlibat+di+Bidang+Politik>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40406/t/Bertemu+Para+Ketua+SAI+G20%2C+Puan+Maharani+Dorong+Penguatan+Kerja+Sama+dengan+Parlemen>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40400/t/Hadir+di+Forum+G20%2C+Puan+Maharani+Ajak+Dunia+Kolaborasi+Bangun+Dunia+yang+Lebi+h+Baik>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40018/t/Sambut+G20+dan+P20%2C+Fadli+Zon+Hadirkan+Kompetisi+dan+Pameran+Filateli+Dunia>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40512/t/Gelar+%E2%80%98P20+Friendship+Ride+%26+Run%E2%80%99%2C+Sekjen+DPR%3A+Pac+u+Semangat+Menyambut+P20>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40513/t/Setjen+DPR+Sosialisasika+n+P20+Melalui+Kegiatan+%E2%80%98P20+Friendship+Ride+%26+R+un%E2%80%99>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40597/t/Persiapan+P20%2C+Setje+n+DPR+Laksanakan+Rapat+Koordinasi+Lintas+Instansi>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40720/t/Sidang+P20+Diharap+Ma+mpu+Stabilkan+Dampak+Perubahan+Iklim+Global>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40741/t/Dimiyati+Natakusumah+Ap+resiasi+Sosialisasi+P20+kepada+KWP>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40740/t/Hafisz+Tohir%3A+KWP+P+unya+Andil+Besar+Sukseskan+P20>

- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40751/t/Hafizh+Tohir%3A+DPR+Akan+Undang+Parlemen+Ukraina+pada+P20>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40753/t/Biro+Pemberitaan+Parlemen+Kuatkan+Sinergi+Pers+Demi+Sukseskan+P20>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40754/t/Hafisz+Tohir%3A+P20+Dorongan+Upaya+Pemulihan+Pasca+Pandemi+yang+Berkelanjutan>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40892/t/Puteri+Komarudin+Harap+Keterlibatan+UMKM+dalam+Penyelenggaraan+P20>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40954/t/Empat+Isu+Besar+akan+Dibahas+dalam+P20>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40961/t/Sekjen+DPR+Jelaskan+Mekanisme+dan+Prosedur+Teknis+P20>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41013/t/Di+P20%2C+DPR+Siap+Tunjukkan+Komitmen+Indonesia+Kurangi+Emisi+Lewat+Konsep+Go+Green>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41016/t/Dukungan+%E2%80%99Green+Energy%E2%80%99+dalam+Rangkaian+Kegiatan+P20>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41020/t/Puan+Maharani+Optimistis+Perhelatan+P20+Berdampak+Positif+untuk+Pariwisata+Indonesia>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41036/t/Jajal+Setir+Mobil+Listrik+Keliling+Gedung+Parlemen%2C+Puan%3A+DPR+Siap+Terima+Delegasi+P20>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41083/t/Sambut+P20%2C+RI-UK+Suarakan+Dukungan+Penerapan+Ekonomi+Hijau>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41082/t/Ungkap+Rasa+Duka+Cita+Mendalam%2C+Parlemen+RI-UK+Makin+Perkuat+Dukung+Implementasi+Peta+Jalan+Kemitraan+2022-2024>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41085/t/Sekjen+DPR+Pastikan+Kesiapan+Penyelenggaraan+P20>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41084/t/Wakil+Ketua+DPR+Lodewijk+Jajal+Mobil+Listrik+Produksi+Rakitan+Anak+Bangsa>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41087/t/Puan+Ajak+Parlemen+Dunia+Secara+Bersama+Atasi+%E2%80%99Scary+Effect%E2%80%99+Gejolak+Ekonomi+Global>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41089/t/Respon+Gejolak+Ekonomi+Dunia%2C+Puan+Maharani+Ajak+Parlemen+Bangun+Komitmen+Bersama>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41088/t/Forum+Parlemen+P20%2C+Puan+Ajak+Parlemen+Bangun+Kerjasama+Multilateralisme>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41090/t/P20+Buka+Potensi+Perkuat+Solidaritas+Hadapi+Krisis+Global>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41092/t/Ketua+DPR+RI+Ajak+Parlemen+Australia+Tingkatkan+Kerja+Sama+Bilateral>

- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41095/t/Irine%3A+Parlemen+Berkontribusi+Positif+Kuatkan+Multilateralisme>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41097/t/Sejalan+dengan+Isu+Prioritas+P20%2C+Ketua+DPR+Harap+Kerja+Sama+Indonesia-UEA+Fokus+pada+Ekonomi+Hijau>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41096/t/Puan+Maharani+Apresiasi+Solidnya+Hubungan+Bilateral+Indonesia-Australia>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41100/t/Puan+Harap+P20+Hasilkan+Langkah+Nyata+Atasi+Perubahan+Iklim>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41099/t/Proses+Perdamaian+Ukraina-Rusia+Prioritas+Utama+Indonesia>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41103/t/Ketua+DPR+Apresiasi+Peningkatan+Kerja+Sama+Indonesia-Singapura>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41102/t/Ketua+DPR+Pandang+Penting+Grup+Kerja+Sama+Bilateral+Indonesia-Ukraina>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41107/t/Ketua+DPR%3A+Azerbaijan-Indonesia+Banyak+Miliki+Kesamaan>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41104/t/Lakukan+Pertemuan+Bilateral%2C+Puan+Sambut+Baik+Investasi+UEA+pada+IKN>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41098/t/Adies+Kadir%3A+Rusia+Negara+Potensial+untuk+Kerja+Sama+Investasi>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41101/t/Putu+Supadma+Sampaikan+Peran+Parlemen+Indonesia+Hadapi+Perubahan+Iklim+di+Forum+P20>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41105/t/Fadli+Zon%3A+Saatnya+Parlemen+Ambil+Tindakan+Nyata+Selesaikan+Masalah+Global>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41106/t/DPR+Dorong+Kerja+Sama+Antar+Parlemen+Upayakan+Perdamaian+di+Ukraina>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41109/t/Bertemu+Parlemen+Tiongkok%2C+Puan+Dorong+Peningkatan+Kerja+Sama+dan+Investasi>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41115/t/Bertemu+Ketua+Parlemen+Rusia%2C+Ketua+DPR+Bicara+Soal+Ukraina+Hingga+Minat+Putin+Bantu+Pengembangan+IKN>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41117/t/Belum+Disepakatinya+Indonesia-Turki+CEPA%2C+DPR+Berharap+Kerja+Sama+Intensif+di+Masa+Depan>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41118/t/Ketua+DPR+Harap+P20+Dapat+Berkontribusi+Besar+Selesaikan+Tantangan+Global>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41121/t/Ketua+DPR+Ungkap+Hubungan+Indonesia-Belanda+Semakin+Harmonis+di+Berbagai+Bidang>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41120/t/P20+Perkuat+Elemen+Demokrasi+dan+Akuntabilitas+Agenda+G20>

- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41124/t/Hubungan+Bilateral+Indonesia-Korea+Selatan+Semakin+Kuat+dan+Solid>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41122/t/Puan+Maharani+Sambut+Baik+Hubungan+Bilateral+Indonesia-Amerika+Serikat>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41126/t/Hadapi+Tantangan+Ketahanan+Pangan+dan+Energi%2C+Parlemen+Perlu+Perkuat+Kerja+Sam+a+Multilateral>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41125/t/Indonesia-India+Targetkan+Peningkatan+Perdagangan+2025+Sekitar+USD50+Miliar>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41133/t/P20+Tegaskan+Penguatan+Peran+Parlemen+Hadapi+Tantangan+Demokrasi+Global>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41130/t/Ketua+DPR+Apresiasi+Perpanjangan+Pemberian+Fasilitas+GSP+dari+Amerika+Serikat>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41137/t/Ketahanan+Pangan+Kunci+Antisipasi+Resesi+Global+2023>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41136/t/P20+Wujud+Gotong+Royong+Parlemen+Pulihkan+Kesejahteraan+Dunia>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41113/t/Gus+Muhaimin+Ungkapkan+Ketua+Parlemen+Inggris+Kagumi+Kebhinekaan+RI>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41110/t/Mengenang+Dukungan+Diplomasi+Rusia+terhadap+Perjuangan+Kemerdekaan+Indonesia>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41112/t/P20+Dorong+Tingkatkan+Keterlibatan+Perempuan+di+Dunia+Politik>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41119/t/Konferensi+P20+Menambah+Optimisme+Baru>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41114/t/Ekonomi+Hijau+Jadi+Perhatian+Penting+Parlemen+Indonesia-Tiongkok>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41127/t/Hafisz+Thohir+Apresiasi+Penggunaan+Mobil+Listrik+dalam+Forum+P20>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41123/t/Sekjen+PBB+Sambut+Baik+P20+yang+Berkonsentrasi+pada+Pemulihan+Berkelanjutan>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41132/t/Mardani+Ali+Sera%3A+Perlu+Adanya+Kesamaan+%27Framework%27+untuk+Hadapi+Krisis+Global>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41131/t/Presiden+IPU+Duarte+Pacheco+Ingatkan+Delegasi+P20%2C+Dunia+Masih+Menghadapi+Berbagai+Tantangan>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41138/t/Terdapat+Perbedaan+Pandangan+Terhadap+Krisis+Pangan%2C+Hafisz+Thohir+Upayakan+Tetap+akan+Ada+Kesepakatan>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41134/t/Presiden+IPU+Sampaikan+Duka+Cita+Pada+Tragedi+Kanjuruhan>

- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41142/t/Parlemen+Kuat+Solusi+Atasi+Krisis+Global>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41139/t/Kerja+Sama+Indonesia-India+di+Bidang+Sosial+Budaya+Bawa+Kemakmuran+bagi+Kedua+Bangsa>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41149/t/Akses+Pendidikan+Bagi+Perempuan+Penting+Demi+Menunjang+Kesetaraan+Gender>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41150/t/P20+%27Chair%27s+Summary%27+Bentuk+Komitmen+untuk+Dunia+yang+Lebih+Baik>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41141/t/Penanaman+Pohon+Wujud+P20+Gaungkan+Bumi+Lebih+Hijau>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41140/t/Minimalisir+Polarisasi%2C+P20+Utamakan+Dialog+dalam+Demokrasi>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41145/t/Bahas+Berbagai+Isu+Krusial%2C+P20+Hasilkan+%E2%80%98Chair%27s+Summary%E2%80%99>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41144/t/Parlemen+Indonesia-Korea+Selatan+Saling+Dukung+Hadapi+Krisis+Global>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41147/t/Diskriminasi+Terhadap+Perempuan+Harus+Lebih+Diperhatikan>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41146/t/Ravindra+Harap+Transfer+Teknologi+Transisi+Energi+antara+Indonesia-Australia>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41148/t/Hafisz+Tohir+Nilai%2C+DPR+Sukses+Selenggarakan+P20>

C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Pelaksanaan dan Partisipasi Delegasi DPR RI dalam The Eighth G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20): Stronger Parliaments for Sustainable Recovery yang dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 7 Oktober 2022. Keberhasilan Indonesia dalam Penyelenggaraan sidang dan keikutsertaan Delegasi DPR RI dalam menghadiri Sidang The Eighth G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) ini tidak terlepas dari peran dan dukungan berbagai pihak yaitu Presiden RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM RI (Dirjen Imigrasi), Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Keuangan RI (Dijen Bea Cukai), Kementerian Perhubungan RI (Dirjen Hubungan Udara, dan Otband Wilayah I Soetta) Kementerian Kesehatan RI (Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta) Kementerian Komunikasi dan Informasi RI (Dirjen Komunikasi dan Informasi), Kepala BNPB / Ketua Satgas Covid 19, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, Badan Intelijen Negara RI, Kodam Jaya/ Jayakarta, Polda Metro Jaya, Baintelkan Polri, PT. Angkasa Pura II, Otoritas Bandara Wilayah I, Airnav, PT. PLN (Persero), PT. Hyundai Motors Indonesia dan PT. Exelly Elektrik Indonesia, Sekretariat

Jenderal DPR RI dan pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Atas nama Delegasi DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan semoga dokumen laporan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, November 2022
Ketua DPR RI

Dr. (HC) PUAN MAHARANI



**Chair's Summary on
The Eighth G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20)**
Jakarta, Indonesia, 6 and 7 October 2022

The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit was held on 6 and 7 October 2022 in Jakarta, Indonesia and was chaired by the Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Dr. (HC). Puan Maharani.

Under the theme ‘Stronger Parliament for Sustainable Recovery’, the Summit featured substantive discussions around four core themes: first, accelerating sustainable development and the green economy, second, emerging issues: food and energy security, and economic challenges, third, effective parliament, vibrant democracy; and fourth, social inclusion, gender equality and women empowerment.

The meeting was held in person and attended by 15 of G20 member countries, 13 guests of the host, and 5 international organisations.

Part I:

During the meeting, there is agreement on the following points:

1. The world is facing daunting and intertwined political, socio-economic and environmental challenges. The global economy is weakening and the COVID-19 pandemic has caused development setbacks, deepened inequalities and increased extreme poverty across the planet, including developing countries. Hard on the heels of the pandemic, which is still not fully under control, soaring food and energy prices are stoking international inflation and generating a global food crisis. Climate-related disasters such as flooding, drought, heatwaves and extreme weather events are occurring with unprecedented frequency and intensity. We are convinced that multilateralism is the most effective route to address common challenges, whether climate change, conflicts, pandemics, transnational crime, terrorism, global economic imbalances or threats to the environment.
2. We acknowledge the G20’s long-standing commitment to accelerate progress on implementing the 2030 Agenda and achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in support of a sustainable, inclusive and resilient world, while recognizing the importance of national strategies and priorities. As parliamentarians, we pledge, through our legislative, budgetary and oversight functions, to work hard to transform these global commitments into national realities. But even before the COVID-19 pandemic, the world was already off-track in terms of achieving the SDGs by 2030. We urgently call for the necessary levels of SDG investment to be made by all stakeholders and with the support of an enabling global financial architecture. Parliaments must redouble their efforts in mobilizing resources to keep the SDGs on track.

3. We remain deeply concerned about the adverse impact of the COVID-19 crisis, especially in developing countries and on those most adversely affected such as women, children and marginalized groups and communities, which has set back progress towards the 2030 Agenda and the Addis Ababa Action Agenda on financing for development. Countries are recovering from the pandemic at a very uneven pace, which is made worse by vaccine inequalities. With the heightened global economic uncertainty, it is crucial that the G20 maintain a strong focus on supporting the most vulnerable countries and continue to address their debt problems and liquidity needs, in accordance with SDG 17 on Partnerships for the Goals. We reiterate our call – made at our seventh Speakers' Summit in Rome – to the G20 to devise plans that create employment opportunities, boost infrastructure investments, and promote innovation, with a view to reducing inequalities and promoting prosperity for all. We further underscore the need for effective and innovative means of financing, including blended finance, so as to help narrow the SDG financial gap.
4. We recognize the role of technology and innovation as key enablers for the global recovery and sustainable development, including in incorporating micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) in local and international value chains. We call for an inclusive, open, fair and non-discriminatory digital economy that fosters the application of new technologies, allows businesses and entrepreneurs to thrive, and protects and empowers consumers while addressing the challenges related to privacy, data protection, intellectual property rights, security and the digital divides, including those between developed and developing countries, between rural and urban populations, between groups of different income and educational levels and of different ages, and between men and women.
5. We strongly believe that economic growth and increased human activities must respect the physical environment and be compatible with ensuring a low-carbon, climate-resilient and nature-positive future for the planet and the people. The G20 countries need to accelerate the transition of their economies to better harness the opportunities that arise from a green economy perspective, including circular and sharing economies and the digital economy, which grew exponentially in the COVID-19 pandemic. We recall the Nusa Dua Declaration on climate change adopted at the 144th IPU Assembly in March 2022 and the Hanoi Declaration on the SDGs adopted at the 132nd IPU Assembly in March 2015. As parliamentarians, we will do all we can to promote environmentally sound economic development within our societies and so help achieve the environmental goals laid down in the SDGs as well as the commitments in the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and its Paris Agreement, the Convention on Biological Diversity and other relevant multilateral environmental agreements.
6. In this regard, we encourage the G20 to step up the fight against climate change and efforts to meet Paris Agreement targets on global warming, acting across mitigation, adaptation and finance, while honouring common but differentiated responsibilities, respective capabilities and in the light of different national circumstances. G20 parliaments should lead by example by becoming greener and reducing their own carbon footprint. We welcome progress made at COP26 in Glasgow, Scotland, to advance implementation of the UNFCCC and the Paris Agreement and achieve global net zero greenhouse gas emissions or carbon neutrality in the second half of this century, on the basis of equity, and in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty. But we recognize more needs to be done urgently in partnership among governments, parliaments, the private sector and civil society among others, and call for stronger action at the upcoming COP27 in Sharm El-Sheikh, Egypt. We also urge developed countries to fully deliver on their climate change funding commitments to support developing countries.

7. We must support developing countries to recover from the COVID-19 pandemic and related crises in a way that is low-carbon, climate-resilient and nature-positive without worsening their indebtedness. We urge developed countries to fully deliver on the USD 100 billion goal urgently, and to fulfil the other commitments regarding technology transfer and climate finance. We recall that one of the Paris Agreement goals is to make finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions (GHG) and climate-resilient development. We encourage international financial institutions to increase support for relevant national strategies and plans, including Nationally Determined Contributions (NDCs), National Adaptation Strategies, support for loss and damage, long-term low emissions development strategies, and National Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAPs) in developing countries.
8. We note the G20's commitment to ensure the conservation, protection and sustainable use of biodiversity and its components, as well as other natural resources. In particular, it has pledged to take concrete measures to end overfishing and illegal, unreported and unregulated fishing, and to combat crimes that affect the environment such as illegal logging, illegal mining, illegal wildlife trade, and illegal movement and disposal of waste and hazardous substances, as well as to address marine litter. We undertake to work through our parliamentary processes to help turn these political commitments into legislative reality in our countries.
9. We note that regular, systematic, and safe migration movements are the engine of sustainable development. Immigrants make significant contributions to both source and destination countries in terms of economic, social and cultural diversity. On the other hand, irregular and forced migration has the potential to cause instability for the economies and security of the countries concerned. We emphasize that the international community should act together to improve the political, social, cultural, and economic conditions and to ensure minimum living conditions in the source countries in order to prevent forced and irregular migration.
10. We congratulate World Trade Organization (WTO) members on successfully adopting an agreement on fisheries subsidies after 20 years, providing fresh testimony to the validity of the multilateral approach to resolving global problems. We are aware that this is just a first step towards safeguarding the future of fisheries, which support the livelihoods of millions worldwide. With a view to building momentum, we encourage parliaments to make necessary arrangements to facilitate the ratification of the agreement on fisheries which paves the way for a lasting solution in this area. Moreover, as noted in the recent Statement issued by the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO, we believe that the WTO needs to be reformed so it may more effectively play its role in addressing the challenges of the twenty-first century, including issues such as climate change and sustainability. As part of the reform process, we believe that a WTO fit for the twenty-first century must continue to preserve the core values and basic principles of the multilateral trading system, including the centrality of development in its work.
11. We welcome the June 2022 WTO Ministerial Decision on the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) to allow developing countries an option to waive patents for five years on COVID vaccine production and supply, and encourage continued negotiation to expand the waiver to diagnostics and therapeutics as crucial and integral parts of COVID-19 countermeasures. We believe that health systems must be strengthened to anticipate and react speedily and effectively to future international health crises. In this regard, and given the heightened concerns about communicable diseases and their political, economic and social impacts, we look forward to the outcomes of the G20 Joint Finance-Health Task Force, established in October 2021 to enhance dialogue and global cooperation on issues relating to

pandemic prevention, preparedness and response (PPR) and promote the exchange of experiences and best practices. We take note of the establishment of a Financial Intermediary Fund for PPPR, as developed by the G20 Joint Finance-Health Task Force, and call upon all stakeholders to contribute.

12. We recall that all countries have committed to try to achieve universal health coverage (UHC) by 2030, including financial risk protection, access to quality essential health services, including sexual and reproductive health services, and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines. We note that the 141st IPU Assembly in October 2019 approved the first global parliamentary resolution on UHC) and called on parliaments to take specific actions in terms of legislation, budget allocation, accountability and advocacy to achieve UHC. The resolution also calls for UHC policies that address malnutrition in all its forms. Good nutrition requires multisectoral action to deliver improved health and wellbeing for all – especially women and girls – and to ensure the long-term prosperity of societies.
13. Gender equality, providing equal opportunities for women and men, as well as women and girls empowerment generate greater prosperity and sustainable development for all. Studies show that discrimination against women costs the global economy up to US\$ 12 trillion annually. We recognize that the COVID-19 pandemic exacerbated existing inequalities between women and men in many spheres – from health and the economy to security and social protection – and that sexual and reproductive health, rights and justice are central to the realization of social justice and to the achievement of global, regional and national commitments for sustainable development. According to the United Nations, the pandemic also led to a steep increase in sexual and gender-based violence. As parliamentarians, we pledge to work with governments to ensure that global and national pandemic recovery plans are gender-sensitive and include reforms, budgets and new legislation that significantly advance progress on both SDG 5 on gender equality and the Brisbane Goal, which calls for reducing the gender gap in labour force participation by 25% by the year 2025 compared with 2012. We acknowledge the work of the G20 Alliance for the Empowerment and Progression of Women’s Economic Representation (G20 EMPOWER) in accelerating women’s leadership and empowerment in the private sector.
14. As parliamentary leaders, we pledge to set a good example and ensure that our respective parliaments are gender-sensitive institutions. We are therefore committed to increasing the number of women in parliaments as this is crucial to bringing a wide range of perspectives, needs and interests to bear on political decision-making and enhancing legislative effectiveness. We categorically condemn the increase in the harassment of women politicians both online and in person, and pledge to strengthen our efforts to ensure that all parliamentarians and their families enjoy a safe workspace and home life. As we mark the 10-year anniversary of the IPU Plan of Action for Gender-sensitive Parliaments, we recommit to fulfilling this agenda by striving to achieve gender parity in parliament, including in leadership positions; advancing internal policies, mechanisms and expertise to support gender-sensitive laws, policies and budgets; and ensuring our parliaments are free from sexism, discrimination, harassment and all forms of gender-based violence.
15. Youth participation is key to democracy, and inclusive, efficient political processes. Youth participation in politics promotes active citizenship and offers innovation, creativity and new thinking. In 2021, the proportion of MPs under the age of 30 remained low, at just 2.6%. We applaud the global campaign launched by IPU in 2021 – *I Say Yes to Youth in Parliament* – in which hundreds of MPs, leaders and advocates pledged to rejuvenate their parliaments.

16. Countering corruption must be at the heart of national, regional and global efforts to learn the lessons from the COVID-19 crisis and come out of it stronger, more transparent, more accountable and more resilient. More than ever, the fight against corruption requires increased and intensified international cooperation and renewed global commitment. We urge G20 members to make good on the call made by the Anti-Corruption Working Group in its 2022-2024 Action Plan and turn the lessons learned into action-oriented policies and an opportunity to strengthen global anti-corruption efforts. We promise to lead by example in bolstering domestic and collective action to assess and tackle corruption, including emerging new forms.
17. In this regard, we note the critically important role of public sector auditing, including financial and compliance audits to improve governance and ensure the accountability of public sector institutions. In line with our parliamentary functions, we are committed to strengthening synergies with our national supreme audit institutions so as to ensure that public spending is carried out in the service of all relevant stakeholders, including those who live in vulnerable situations, as envisaged by the 2030 Agenda for Sustainable Development.
18. Terrorism in all its manifestations remains one of the most serious threats to international peace and security. It hinders sustainable development and the well-being of societies. We emphasize that we will continue to show a united, sincere and determined stance and engage actively in efforts to combat all terrorist organizations, their extensions, networks and affiliated groups, without any double standards in our fight against terrorism.
19. The G20 has emphasized the need to address the increased security challenges in the digital environment. As parliamentarians, we will work through our legislative processes to strengthen bilateral and multilateral cooperation to ensure our information and communications technologies (ICT) are safe and secure, address shared vulnerabilities and threats, and combat cybercrime. We note the G20's commitment to work in 2022 towards enhancing confidence in the digital environment by improving internet safety and countering online abuse, hate speech, online violence and terrorism, while protecting human rights and fundamental freedoms. Recognizing the key role of the digital economy in the economic recovery process, we will also step up our efforts to foster an open, fair and non-discriminatory digital environment and to help bridge the digital divide.
20. Governments around the world used emergency powers and extraordinary measures to manage the COVID-19 health crisis. We note that such measures should be proportionate, temporary and non-discriminatory, and aimed at preserving the well-being of people and their lives. We affirm that parliaments are best placed to conduct democratic oversight of pandemic responses, particularly the use of emergency powers. As parliamentarians, we encourage governments to make sure that all COVID-19 related policies are in accordance with democratic principles, human rights and the rule of law.
21. We note the increasing vitality and advancement of information and communication technology (ICT) in the public sector during the COVID-19 pandemic. The pandemic is believed to have spurred more innovative public engagement in the public sector through ICT, which creates a more vibrant and dynamic democracy. The parliaments of the G20 countries are committed to mainstreaming the use of ICT in strengthening democracy, particularly for the purpose of channelling public voices into the policy-making process and ensuring the inclusiveness of public decision-making during the post-pandemic era.

22. The COVID-19 pandemic is undoubtedly having a varying degree of impact on the daily practices of procedural democracy, including in terms of the postponement of national elections and democratic backsliding. Parliaments, as a main pillar of democracy, have a moral and institutional responsibility to restore democratic practices including free and periodic elections, public deliberation, and inclusive policy making.
23. Strong parliaments are key to strong democracies and to ensuring that citizens' welfare and well-being are at the centre of policymaking and legislation. As the representatives of the people and of all interests in society, the G20 parliaments need to be actively engaged in the G20 processes and duly represented in a gender and age balanced manner. Parliaments can and should provide a substantive contribution to G20 deliberations, alongside civil society, the private sector and the other constituencies of the G20. We therefore call upon the G20 leaders to formally acknowledge the role of the P20.

Part II.

The Chair also views that :

24. Wars around the world, including the war in Ukraine, pose a threat to global security and to effective multilateralism based on the fundamental principles of international law. All Speakers of Parliament expressed their commitment to the United Nations Charter and to the principles of international law. Several Speakers reiterated their strong condemnation of Russia's actions in Ukraine, including in their views the unjustifiable military aggression against the country and its people, and the illegal annexation of the territories of another sovereign State. The Russian Federation strongly denied such condemnations referring to freely expressed will of millions of people, who have exercised the legal right to self-determination after denying to accept the coup d'état in Ukraine in 2014, and been exposed to armed offence by the Ukrainian authorities. Other Speakers wished to avoid qualification of these actions and focus the language in the outcome document on the steps ahead to restore peace, through dialogue and in observance of international law. Speakers welcome the mandate and peacebuilding mission of the IPU Task Force on Ukraine, established pursuant to the Resolution on the *Peaceful resolution of the war in Ukraine, respecting international law, the Charter of the United Nations and territorial integrity*, adopted on the occasion of the 144th IPU Assembly held in Nusa Dua in March 2022. In addition to deepening the food crisis induced by the pandemic, the war has threatened energy security and increased global complexities and uncertainties, including in the financial markets. Speakers urge G20 leaders to redouble their efforts to overcome differences, promote peace and economic recovery, effectively address the current crises and seize all opportunities to create a fairer, more sustainable and prosperous global society. Parliaments too, through diplomacy and dialogue, must strengthen their contributions towards advancing peace, sustainable development and economic recovery.

Closing

25. All Speakers thank the Parliament of Indonesia for hosting the Eighth P20 Speakers' Summit and the Inter-Parliamentary Union (IPU) for its support, and look forward to working with the Parliament of India during the country's presidency of the G20 in 2023.



Produced by:

**COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)**



**email: biro_ksap@dpr.go.id
phone: (+62 21) 5715813
ksap.dpr.go.id**



Bagian Sekretariat Kerja Organisasi Internasional -
Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional

2022



@bksapdpr



bksapdpr